



Katalog: 1105031

# POTENSI KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

## HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2021



BADAN PUSAT STATISTIK





Katalog: 1105031

# POTENSI KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

HASIL PENDATAAN POTENSI DESA  
(PODES) 2021

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

# **POTENSI KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN**

## **HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2021**

**Katalog** : 1105031  
**No. Publikasi** : 04300.2305

**Ukuran Buku** : 18,2 cm x 25,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xx+149 halaman

**Penyusun Naskah** :  
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

**Penyunting** :  
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

**Pembuat Kover** :  
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

**Sumber Ilustrasi** :  
freepik.com, storyset.com, flaticon.com

**Penerbit** :  
© Badan Pusat Statistik RI

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# **TIM PENYUSUN**

## **POTENSI KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN**

### **HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2021**

#### **Pengarah:**

Ateng Hartono

#### **Penanggung Jawab:**

Nurma Midayanti

#### **Penyunting:**

Masfufah  
Tri Windiarto  
Tanno Kamila Helaw

#### **Penulis Naskah:**

Masfufah  
Tanno Kamila Helaw  
Elda Herinda Br Tobing  
I Kadek Dede Dwipayana  
Suci Ayu Lestari

#### **Pengolah Data:**

Tanno Kamila Helaw  
Elda Herinda Br Tobing  
I Kadek Dede Dwipayana  
Suci Ayu Lestari

#### **Penata Letak:**

Suci Ayu Lestari





## KATA PENGANTAR

Desa sebagai unit terkecil wilayah administrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Desa bukan hanya sekadar menjadi wilayah tempat tinggal, melainkan juga sebuah entitas wilayah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, dan potensi-potensi lain yang dapat menjadi pendorong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kabupaten/kota dan kecamatan yang menjadi unit observasi pada publikasi ini, juga memiliki keberagaman potensi yang perlu diungkap dan dikembangkan. Melalui keterpaparan informasi terhadap beragam potensi tersebut, diharapkan dapat memotivasi pihak terkait untuk menelurkan kebijakan pembangunan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Publikasi "Potensi Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) 2021" ini adalah upaya rintisan untuk memperkaya khazanah data kewilayahan yang selama ini hanya tersedia untuk level desa/kelurahan. Publikasi ini didesain dalam format tematik dengan pemilihan konten antara lain, transportasi, industri dan tenaga kerja, lokasi pertambangan, potensi pesisir, pariwisata, transaksi ekonomi, dan mitigasi bencana.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan pembangunan kewilayahan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2023  
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti



# DAFTAR ISI

## POTENSI KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

### HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2021

	halaman
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	xix
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	5
1.2    Metodologi .....	6
1.3    Pemanfaatan dan Diseminasi Data .....	7
 <b>BAB II TRANSPORTASI.....</b>	 <b>9</b>
2.1    Perjalanan Panjang Transportasi Indonesia .....	13
2.2    Potret Transportasi Indonesia .....	14
 <b>BAB III INDUSTRI DAN TENAGA KERJA .....</b>	 <b>21</b>
3.1    Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan .....	25
3.2    Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja .....	28
 <b>BAB IV LOKASI PERTAMBANGAN .....</b>	 <b>33</b>
4.1    Pertambangan Berkelanjutan untuk Investasi Jangka Panjang .....	37
4.2    Potret Pertambangan Migas dan Nonmigas Indonesia .....	38
 <b>BAB V POTENSI PESISIR .....</b>	 <b>43</b>
5.1    Negeri Maritim .....	47
5.2    Permukiman di Wilayah Pesisir .....	48
5.3    Potensi Perikanan Laut .....	50
 <b>BAB VI. PARIWISATA.....</b>	 <b>53</b>
6.1    Pariwisata dan Desa Wisata .....	57
6.2    Wisata Komersial .....	59

6.3 Situs/Bangunan Bersejarah .....	64
<b>BAB VII. TRANSAKSI EKONOMI.....</b>	<b>71</b>
7.1 Interaksi Ekonomi.....	75
7.2 Pasar Modern.....	76
7.3 Pasar Tradisional .....	77
7.4 Pasar Khusus .....	78
<b>BAB VIII. MITIGASI BENCANA .....</b>	<b>81</b>
8.1 Kejadian Bencana .....	85
8.2 Mitigasi Bencana .....	87
8.3 Simulasi dan Pendidikan Kebencanaan .....	92
<b>BAB IX. PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
9.1 Penutup.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	101
LAMPIRAN .....	105

## **DAFTAR TABEL**

	halaman
Tabel 3.1	Sebaran Keberadaan Kawasan Industri Menurut Wilayah .....
Tabel 3.2	27 Sebaran Keberadaan Kawasan Pergudangan Menurut Wilayah.....
Tabel 3.3	27 Korelasi Antara Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan Dengan TPT dan TPAK.....
Tabel 3.4	29 Sebaran Wilayah dengan Keberadaan Perusahaan PJTKI.....
Tabel 7.1	31 Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pasar Modern .....
Tabel 8.1	77 Banyaknya Desa yang Terjadi Bencana.....
	86



## DAFTAR GAMBAR

	halaman	
Gambar 2.1	Percentase Kabupaten/Kota yang Terdapat Fasilitas Transportasi di Indonesia .....	15
Gambar 2.2	Percentase Kabupaten/Kota Terdapat Sungai yang Digunakan untuk Transportasi Menurut 5 Provinsi Tertinggi.....	16
Gambar 2.3	Percentase Kabupaten/Kota Terdapat Lapangan Terbang Perintis Menurut 5 Provinsi Tertinggi .....	17
Gambar 2.4	Percentase Kabupaten/Kota Terdapat Terminal Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Menurut 5 Provinsi Terendah.....	18
Gambar 2.5	Percentase Kabupaten/Kota Terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut 5 Provinsi Terendah.....	19
Gambar 3.1	Percentase Kabupaten/Kota Dengan Keberadaan Kawasan Industri Dan Kawasan Pergudangan .....	25
Gambar 3.2	Percentase Kabupaten/Kota dengan Keberadaan PJTKI .....	30
Gambar 4.1	Percentase Kabupaten/Kota yang Terdapat Lokasi Pertambangan di Indonesia .....	39
Gambar 4.2	Percentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Minyak Menurut Provinsi .....	40
Gambar 4.3	Percentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Gas Menurut Provinsi .....	41
Gambar 4.4	Percentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Nonmigas Menurut Provinsi .....	42
Gambar 5.1	Percentase Kecamatan yang Ditetapkan sebagai Kecamatan Pesisir .....	48
Gambar 5.2	Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Permukiman di Atas Permukaan Air .....	49
Gambar 5.3	Banyaknya Kecamatan Pesisir dan Keberadaan Permukiman di Atas Permukaan Air Laut .....	50
Gambar 5.4	Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan.....	51
Gambar 5.5	Banyaknya Kecamatan Pesisir dan Keberadaan Pelabuhan	

Pangkalan Pendaratan Ikan .....	52
Gambar 6.1 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Wisata Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	58
Gambar 6.2 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebun Binatang Menurut Provinsi Tahun 2021.....	59
Gambar 6.3 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Tirta Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	60
Gambar 6.4 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Agrowisata Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	61
Gambar 6.5 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Wisata Budaya Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	62
Gambar 6.6 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Taman Rekreasi Menurut Provinsi Tahun 2021.....	63
Gambar 6.7 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Taman Rekreasi Menurut Provinsi Tahun 2021.....	64
Gambar 6.8 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Gedung Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021.....	65
Gambar 6.9 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Jembatan Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021.....	66
Gambar 6.10 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Candi Menurut Provinsi Tahun 2021.....	67
Gambar 6.11 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelabuhan Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021.....	68
Gambar 6.12 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Stasiun Kereta Api Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	69
Gambar 6.13 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Tempat Ibadah Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	70
Gambar 7.1 Persentase Kabupaten/Kota dengan Keberadaan Supermarket/ Swalayan/Mall.....	76
Gambar 7.2 Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pasar.....	78
Gambar 7.3 Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Keberadaan Pasar Khusus .....	79
Gambar 7.4 Banyaknya Kecamatan Menurut Keberadaan Pasar Khusus.....	79
Gambar 8.1 Persentase Total Kabupaten yang Desanya Terkena Bencana Berulang Selama Dua Tahun Terakhir di Indonesia Tahun 2020 dan 2021 .....	87

Gambar 8.2	Persentase Kecamatan di Indonesia yang Memiliki Kendaraan Pemadam Kebakaran .....	89
Gambar 8.3	Persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Memiliki Kendaraan Pemadam Kebakaran .....	90
Gambar 8.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Keberadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran.....	90
Gambar 8.5	Persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Melakukan Kegiatan Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai dalam 3 Tahun Terakhir .....	91
Gambar 8.6	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Kegiatan Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai dalam 3 Tahun Terakhir.....	92
Gambar 8.7	Persentase Kecamatan yang Melakukan Kegiatan Simulasi Bencana.....	94
Gambar 8.8	Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Kegiatan Simulasi Bencana.....	94
Gambar 8.9	Persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam dalam 3 Tahun Terakhir.....	95



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.	Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Sungai yang Digenakan untuk Transportasi Menurut Provinsi Tahun 2021.....	107
Lampiran 2.	Jumlah dan Persentase Kabupaten/kota Terdapat Lapangan Terbang Perintis Menurut Provinsi Tahun 2021.....	108
Lampiran 3.	Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Terminal Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	109
Lampiran 4.	Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	110
Lampiran 5.	Jumlah dan Persentase Kecamatan Terdapat Terminal Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Menurut Provinsi Tahun 2021.....	111
Lampiran 6.	Jumlah dan Persentase Kecamatan Terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	112
Lampiran 7.	Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Minyak Menurut Provinsi Tahun 2021.....	113
Lampiran 8.	Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Gas Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	114
Lampiran 9.	Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Nonmigas Menurut Provinsi Tahun 2021 .....	115
Lampiran 10.	Jumlah Kabupaten/Kota Terdapat Kawasan Industri, Pergudangan Dan PJTKI Menurut Provinsi Tahun 2021.....	116
Lampiran 11.	Banyaknya Kecamatan yang Ditetapkan Sebagai Kecamatan Pesisir .....	117
Lampiran 12.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Wilayah Pesisir.....	118
Lampiran 13.	Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) .....	119
Lampiran 14.	Banyaknya Kabupaten/Kota dengan Keberadaan Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....	120
Lampiran 15.	Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Permukiman Diatas Permukaan Air Laut dan Permukiman Diatas Sungai/Danau.....	121

Lampiran 16.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Permukiman di Atas Permukaan Laut .....	122
Lampiran 17.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Desa Wisata yang Ditetapkan Pesisir .....	123
Lampiran 18.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Desa Wisata yang Ditetapkan Pesisir.....	124
Lampiran 19.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata .....	125
Lampiran 20.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata (Lanjutan).....	126
Lampiran 21.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata.....	127
Lampiran 22.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata(Lanjutan).....	128
Lampiran 23.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah.....	129
Lampiran 24.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah (Lanjutan).....	130
Lampiran 25.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah.....	131
Lampiran 26.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah (Lanjutan) .....	132
Lampiran 27.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat <i>Supermarket/Swalayan/Mall</i> .....	133
Lampiran 28.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat <i>Supermarket/Swalayan/Mall</i> .....	134
Lampiran 29.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Pasar Tradisional.....	135
Lampiran 30.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Pasar Tradisional.....	136
Lampiran 31.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus.....	137
Lampiran 32.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus (Lanjutan) .....	138
Lampiran 33.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Pasar Khusus .....	139
Lampiran 34.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Pasar Khusus (Lanjutan).....	140
Lampiran 35.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam .....	141
Lampiran 36.	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Pembuatan, Perawatan, Atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai Pantai.	142

Lampiran 37.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Kendaraan Pemadam Kebakaran.....	143
Lampiran 38.	Banyaknya Kebupaten/Kota yang Terdapat Kendaraan Pemadam Kebakaran.....	144
Lampiran 39.	Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Kegiatan Simulasi Bencana Alam .....	145
Lampiran 40.	Banyaknya Kebupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Simulasi Bencana Alam .....	146
Lampiran 41.	Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Kejadian Bencana .....	147
Lampiran 42.	Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Kejadian Bencana (Lanjutan).....	148
Lampiran 43.	Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Kejadian Bencana (Lanjutan).....	149



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Gerakan reformasi 1998 telah memantik perluasan definisi otonomi daerah yang bermuara pada cita-cita mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Cita-cita tersebut kemudian menjadi latar belakang terbentuknya daerah-daerah otonom baru, mulai dari provinsi, kabupaten dan kota madya, kecamatan, hingga kelurahan dan desa. Selama periode 1996 - 2021, terjadi penambahan wilayah setingkat desa sebanyak 17.991, kecamatan sebanyak 3.252, dan kabupaten/kota sebanyak 204.

Sejalan dengan maraknya pemekaran wilayah administratif baru tersebut, tuntutan terhadap penyediaan data berkualitas yang merangkum beragam potensi kewilayahan juga semakin meningkat. Dengan tersedianya data yang komprehensif, setiap daerah diharapkan dapat memetakan potensi wilayahnya sehingga perencanaan kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran.

Data dan informasi kewilayahan pada level kecamatan dan level kabupaten/kota dalam publikasi ini adalah upaya rintisan untuk memperkaya khazanah data kewilayahan yang selama ini hanya tersedia pada level desa/kelurahan. Format tematik yang digunakan dalam publikasi ini diharapkan dapat memudahkan para pengguna data dalam mengidentifikasi kebutuhannya.

Terdapat 7 (tujuh) tema besar yang dibahas dalam publikasi ini, yaitu transportasi, industri dan tenaga kerja, lokasi pertambangan, potensi pesisir, pariwisata, transaksi ekonomi, dan mitigasi bencana. Berdasarkan data Podes 2021, ada 29,57 persen kabupaten/kota di Indonesia yang terdapat sungai yang digunakan untuk transportasi. Sementara itu, terdapat 15,95 persen kabupaten/kota yang terdapat lapangan terbang perintis. Selanjutnya dari sisi industri, hanya 23,54 persen kabupaten/kota di Indonesia yang terdapat kawasan industri. Pada sektor pertambangan, ada sekitar 9,92 persen kabupaten/kota yang terdapat lokasi pertambangan minyak, 9,14 persen kabupaten/kota yang terdapat lokasi pertambangan gas, dan 51,36 persen kabupaten/kota terdapat lokasi pertambangan non-migas.

Berdasarkan data Podes 2021, terdapat sekitar 66,54 persen kabupaten/kota di Indonesia terdapat wilayah pesisir. Dari sisi pariwisata juga terlihat bahwa sekitar 84,63 persen kabupaten/kota terdapat objek wisata alam. Sementara jika dilihat dari transaksi ekonomi, sebanyak 965 dari 7.274 kecamatan di Indonesia sudah terdapat supermarket/swalayan/mall, dan sebanyak 5.425 dari 7.274 kecamatan di Indonesia, terdapat pasar tradisional. Terkait mitigasi bencana, 87,55 persen kabupaten/kota di Indonesia sudah terdapat mobil pemadam kebakaran, dan sebanyak 85,02 persen kabupaten/kota sudah ada kegiatan pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, kanal, waduk, dan pantai.





<http://www.bps.go.id>

# BAB I

# PENDAHULUAN



# PERKEMBANGAN HASIL POTENSI DESA

Tahun  
**1996**

Tahun  
**2021**

**60.530**



**Desa**

**75.584**

**5.575**



**Kelurahan**

**8.461**



**UPT/SPT**

**51**

Wilayah administratif desa **bertambah sebanyak** 15.054 desa  
Wilayah administratif kelurahan **bertambah sebanyak** 2.886 kelurahan

Wilayah administratif kecamatan **bertambah sebanyak** 3.252 kecamatan

Wilayah administratif kabupaten/kota **bertambah sebanyak** 204 kabupaten/kota

**4.022**



**Kecamatan**

**7.242**

**310**



**Kabupaten/Kota**

**514**

Terjadi penambahan jumlah **desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota** di Indonesia sejak tahun 1996 (2 tahun sebelum reformasi) sampai dengan tahun 2021





## 1.1. Latar Belakang

Momentum reformasi 1998 adalah batu pijakan penting bagi lompatan perubahan sosial politik di Indonesia. Pada saat itu, gugatan dan penolakan terhadap pemerintahan yang sentralistik dan pembangunan yang "Jawa sentris" makin mengemuka. Desakan perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih demokratis menjadi tema utama dari setiap demonstrasi yang berlangsung. Masyarakat mendesak diterapkannya demokrasi substansial, bukan demokrasi prosedural yang secara simbolik diwakili dengan berlangsungnya Pemilu yang penuh rekayasa. Masyarakat menuntut adanya kebebasan (*freedom*), keterbukaan (*transparency*), dan kesetaraan (*equality*) yang menjadi nilai inti dari demokrasi.

Penolakan terhadap pemerintahan yang sentralistik tersebut berimplikasi pada makin menguatnya desakan untuk memperluas definisi otonomi daerah. Di mana selama ini, sebagaimana nasib demokrasi yang hanya diwakili oleh ikon Pemilu, narasi desentralisasi selama ini hanya direpresentasikan dengan ditunjuknya pejabat gubernur di setiap provinsi untuk menjadi kepanjangan tangan penguasa yang sentralistik. Untuk itulah, hal lain yang menjadi agenda besar perjuangan reformasi adalah perluasan definisi otonomi daerah, yaitu semangat independensi daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan perluasan definisi tersebut, pembentukan daerah otonom baru tidak lagi sekadar menjadi tentakel pemerintah pusat untuk mengontrol daerah, namun telah bertransformasi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dari konsepsi seperti itulah kemudian bermunculan daerah-daerah otonom baru, mulai dari provinsi, kabupaten dan kotamadya, kecamatan, hingga kelurahan dan desa.

Merujuk pada publikasi Statistik Indonesia Tahun 1996, diketahui bahwa pada tahun 1996, atau 2 tahun sebelum reformasi, jumlah wilayah setingkat desa sebanyak 66.105. Dengan rincian, sebanyak 60.530 desa, dan sisanya, 5.575 adalah kelurahan. Dua puluh tiga tahun setelah reformasi atau pada tahun 2021, jumlah desa melonjak menjadi 75.584 desa, dan kelurahan sebanyak 8.461. Selain itu, terdapat pula wilayah setingkat desa yang berupa UPT/SPT sebanyak 51 unit. Dengan demikian total wilayah setingkat desa di tahun 2021 sebanyak 84.096, atau bertambah sebanyak 17.991 wilayah pemerintahan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1996. Tidak hanya di level desa, perkembangan wilayah pemerintahan juga terjadi pada level kecamatan dan level kabupaten/kota. Pada tahun 1996, jumlah kecamatan tercatat sebanyak 4.022 dan jumlah kabupaten/kota sebanyak 310, sementara di tahun 2021 jumlah kecamatan menjadi 7.274 (bertambah sebanyak 3.252 wilayah administratif), dan jumlah kabupaten/kota menjadi 514, atau bertambah sebanyak 204 wilayah administratif.

Sejalan dengan maraknya pemekaran wilayah administratif baru, tuntutan atas penyediaan data berkualitas yang merangkum beragam potensi kewilayahan juga semakin meningkat. Tuntutan atas validitas dan akurasi data semakin tinggi. Tuntutan tersebut tentu saja didorong oleh semangat wilayah administratif baru tersebut untuk berdikari mengatur urusannya sendiri. Kebutuhan terhadap data tersebut adalah upaya daerah dalam memetakan potensi wilayahnya agar perencanaan kebijakan pembangunan semakin tepat sasaran. Sejalan dengan hal tersebut, sejak tahun 2014

pemerintah pusat juga mencanangkan kebijakan yang memprioritaskan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Itikad baik pemerintah untuk menerapkan desentralisasi yang lebih substansial itu salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan alokasi dana desa.

Dengan ruang lingkup semacam itulah posisi Pendataan Potensi Desa (Podes) dalam peta otonomi daerah. Podes digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah. Selain itu Podes juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan. Podes telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Pada tahun berakhiran '1', pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru.

## 1.2. Metodologi

Hingga saat ini Podes masih menjadi satu-satunya kegiatan pendataan lengkap yang berdimensi kewilayahan (spasial). Unit observasi pendataan Podes adalah wilayah administrasi selevel desa/kelurahan. Cakupan pendataan Podes adalah seluruh wilayah administrasi selevel desa/kelurahan yang membentang dari Sabang di ujung Barat hingga Merauke di ujung Timur Indonesia.

Podes mengumpulkan beragam informasi, baik yang bersifat potensi yang dimiliki desa/kelurahan maupun informasi terkait kerawanan atau tantangan yang dihadapi desa/kelurahan. Informasi terkait potensi desa/kelurahan meliputi: ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, olahraga dan hiburan, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Informasi terkait kerawanan atau tantangan meliputi bencana alam, pencemaran lingkungan, permasalahan sosial dan kesehatan di masyarakat, dan gangguan keamanan yang terjadi di desa/kelurahan.

Pendataan Podes menggunakan tiga jenis kuesioner yang disesuaikan dengan jenjang wilayah pencacahannya, yaitu: kabupaten/kota (PODES2021- KAB/KOTA), kecamatan (PODES2021-KEC), dan desa (PODES2021-DESA). Pembedaan ini dilakukan untuk menjaga kelengkapan dan akurasi data. Sementara itu, referensi waktu bagi setiap data merujuk pada periode pencacahan, kecuali bagi beberapa data tertentu yang dinyatakan memiliki referensi waktu yang berbeda, misalnya satu atau tiga tahun sebelum periode pencacahan.

Tata kelola pendataan mulai dari proses bisnis, batasan konsep dan definisi setiap variabel, hingga tahapan input data didesain dengan komprehensif dan disampaikan kepada seluruh petugas secara berjenjang. Tahapan proses *transfer knowledge* atau *training of trainer* berjenjang itu meliputi: *workshop* instruktur utama (Intama), pelatihan instruktur nasional (Innas), pelatihan instruktur daerah (Inda), hingga pelatihan calon petugas pendata. Seluruh materi terkait pendataan disampaikan secara lengkap pada setiap tahapan pelatihan tersebut. Dengan pola kerja semacam itu, data-data yang dikumpulkan Podes dari setiap unit observasinya diharapkan akan memiliki standar data dan metadata yang terjaga.

Narasumber atau responden dari pendataan Podes adalah aparat pemerintahan dari setiap levelnya. Responden untuk kuesioner Podes desa adalah aparat pemerintah desa/kelurahan. Sedangkan untuk kuesioner Podes kecamatan adalah aparat pemerintah kecamatan, dan untuk kuesioner Podes kabupaten adalah aparat pemerintah kabupaten/kota.

### **1.3. Pemanfaatan dan Diseminasi Data**

Diseminasi hasil pendataan Podes secara lengkap umumnya dibuat menjadi 2 (dua) jenis publikasi, yaitu: Statistik Potensi Desa Indonesia (publikasi level nasional), dan Statistik Potensi Desa Provinsi (publikasi level provinsi). Selain di dua publikasi yang menyajikan hasil pendataan Podes secara lengkap itu, konten yang berasal dari Podes secara parsial juga terdapat di banyak publikasi, baik itu di level nasional maupun di level provinsi, salah satunya terdapat di publikasi Statistik Indonesia. Selain disediakan dalam bentuk publikasi (*hardcopy* dan *softcopy*), disseminasi hasil pendataan Podes juga disediakan dalam bentuk hasil tabulasi data yang dapat diunduh secara bebas di laman resmi website Badan Pusat Statistik (BPS).

Akan tetapi, dari semua produk diseminasi tersebut, seluruh konten datanya berasal dari kuesioner Podes desa. Sementara, sejak awal dioperasionalkannya kuesioner Podes kecamatan dan kuesioner Podes kabupaten, konten data dari kedua kuesioner tersebut sama sekali belum pernah didiseminasi, baik itu dalam bentuk publikasi atau pun dalam bentuk hasil tabulasi di laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

Publikasi Podes kecamatan dan kabupaten ini adalah upaya rintisan dari BPS untuk memperluas dan memperbanyak konten data dalam rangka penyebarluasan data statistik. Selain itu, upaya rintisan ini juga dilakukan agar para pengguna data mengetahui bahwa data-data terkait potensi wilayah di level kecamatan dan di level kabupaten/kota juga tersedia di BPS. Dengan diterbitkannya publikasi Podes kecamatan dan kabupaten ini diharapkan mampu memperkaya khasanah data agar perencanaan pembangunan semakin tepat sasaran.

Publikasi ini secara tematik tersusun menjadi sembilan bagian dengan pemilihan tema sebagai berikut:

1. BAB I. PENDAHULUAN, berisi latar belakang, metodologi dan diseminasi Podes.
2. BAB 2. TRANSPORTASI, memaparkan tentang kondisi dan ketersediaan infrastruktur transportasi.
3. BAB 3. INDUSTRI DAN TENAGA KERJA, membahas tentang kawasan industri.
4. BAB 4. LOKASI PERTAMBANGAN, memaparkan tentang sebaran lokasi pertambangan.
5. BAB 5, POTENSI PESISIR, mengulas tentang sebaran dan potensi wilayah pesisir.
6. BAB 6. PARIWISATA, memaparkan potensi pariwisata di Indonesia.
7. BAB 7. TRANSAKSI EKONOMI, mengulas tentang sebaran *supermarket* dan keberadaan pasar.
8. BAB 8. MITIGASI BENCANA, memotret wilayah yang melakukan mitigasi bencana.
9. BAB 9. PENUTUP, menyajikan narasi reflektif tentang disrupsi seputar data.



<https://www.bps.go.id>

## BAB II

# TRANSPORTASI



# TRANSPORTASI



**29,57 %**

kabupaten/kota di Indonesia terdapat **sungai yang digunakan untuk transportasi**

i

## Sungai yang melintasi

**kabupaten/kota** adalah sungai yang dapat dilayari kapal motor sepanjang tahun untuk mobilitas barang (lalu lintas perdagangan) atau transportasi dari desa ke kota dan sebaliknya. Dilayari sepanjang tahun artinya tidak tergantung pada saat air pasang atau surut atau musim



**15,95 %**

kabupaten/kota di Indonesia terdapat **lapangan terbang perintis**

i

## Lapangan Terbang Perintis

adalah lapangan terbang khusus untuk angkutan udara perintis yang melayani rute penerbangan dari/ke: daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan daerah dengan rute penerbangan yang secara komersial belum menguntungkan





## 2.1. Perjalanan Panjang Transportasi Indonesia

Perkembangan pesat transportasi di Indonesia terjadi pada masa penjajahan oleh kolonial Belanda yang berlangsung selama 350 tahun. Ada berbagai aspek utama transportasi pada masa itu meliputi kereta api, jalan raya, transportasi udara, transportasi laut, hingga transportasi pedati. Pada bidang kereta api, Pemerintah Belanda membangun sistem kereta api yang cukup luas di berbagai wilayah, utamanya pulau Jawa. Saat itu, kereta api digunakan sebagai sarana pengangkutan atau pendistribusian komoditas teh, kopi, dan hasil pertanian lainnya dari daerah produksi ke pelabuhan-pelabuhan untuk dieksport. Ini membantu meningkatkan mobilitas barang-barang dan memfasilitasi eksploitasi sumber daya alam. Pembangunan jalan raya juga dilakukan secara masif untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dan daerah produksi. Tidak hanya itu, layanan penerbangan mulai digunakan untuk menghubungkan beberapa kota dan wilayah terpencil. Ini juga merupakan salah satu langkah awal perkembangan transportasi udara di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut selama masa penjajahan. Pemerintah kolonial Belanda mengelola pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia untuk mengangkut berbagai komoditas, seperti hasil bumi dan barang-barang industri, antarpulau, dan ke Belanda. Di daerah perdesaan, transportasi dengan menggunakan pedati atau kereta kuda masih umum digunakan oleh penduduk pribumi. Transportasi ini sangat tergantung pada tenaga hewan dan dikuasai oleh penduduk setempat.

Transportasi pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Pembangunan pada bidang transportasi memiliki fokus utama untuk memfasilitasi pengangkutan sumber daya alam dan komoditas ekspor ke Belanda. Di sisi lain, kesejahteraan penduduk pribumi kerap diabaikan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, upaya besar-besaran dilakukan untuk membangun infrastruktur transportasi yang lebih merata dan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, infrastruktur transportasi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Tidak hanya sebagai alat bantu untuk mobilitas, tetapi juga menjadi penguatan pondasi pembangunan fisik maupun non fisik. Transportasi kini menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional meliputi dukungan terhadap pergerakan perekonomian, stabilitas nasional dan juga mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dengan memperluas jangkauan arus distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok nusantara.

Berbagai kemajuan transportasi masa kini telah melampaui kondisi beberapa dekade masa lalu. Transportasi darat, transportasi air, hingga transportasi udara bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi, ekonomi, dan kebutuhan mobilitas penduduk. Infrastruktur transportasi yang berkembang pesat salah satunya adalah jaringan jalan raya. Selama reformasi, pembangunan jalan nasional hingga pembangunan infrastruktur besar lain seperti jalan tol, jembatan, serta *flyover* telah dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Tidak hanya itu, percepatan pembangunan transportasi umum dan massal berlangsung beberapa tahun terakhir

secara bertahap di sejumlah kota besar di Indonesia. Moda transportasi lain seperti transportasi udara dan laut juga berkembang cepat yang ditandai dengan bertambahnya jumlah bandara dan pelabuhan, jumlah penerbangan dan maskapai, hingga layanan yang semakin mudah dengan adanya digitalisasi. Pesatnya perkembangan transportasi udara dan air juga ditandai harga yang terjangkau jika dibandingkan dengan dekade lalu sehingga masyarakat dari kalangan menengah bawah juga bisa menikmati layanan transportasi tersebut, khususnya transportasi udara. Perpaduan teknologi dan transportasi melahirkan variasi transportasi baru yakni transportasi *online* yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan transportasi. Seiring berjalannya waktu, transportasi konvensional juga bertransformasi menjadi online karena tidak bisa membendung kemajuan teknologi dan permintaan pasar. Bahkan, kendaraan listrik sudah mulai marak digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi.

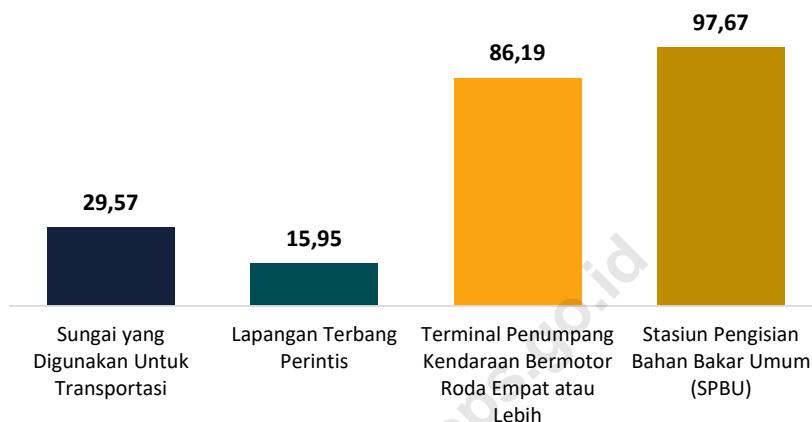
Kemajuan transportasi di Indonesia saat ini selain didukung dengan kemajuan teknologi, juga merujuk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Berbagai aspek dalam pembangunan pada bidang transportasi harus memperhatikan aspek yang paripurna sesuai peraturan yang berlaku. Adapun peraturan yang dimaksud meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan beberapa peraturan lainnya. Pada dasarnya, regulasi tersebut berupaya untuk mengatur jalannya transportasi di Indonesia baik darat, air, dan udara meliputi izin, keamanan, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Dengan adanya peraturan yang mengikat seluruh pihak, diharapkan seluruh elemen dapat menjalankan aktivitas dengan nyaman dan menyadari tanggung jawabnya. Dengan demikian, konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan dapat terwujud secara bertahap.

Bagian ini mengulas kondisi transportasi di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data hasil Pendataan Potensi Desa 2021. Cakupan transportasi dalam bagian ini meliputi transportasi darat, air, dan udara. Karena keterbatasan data yang tersedia, bagian ini hanya mencakup keberadaan terminal penumpang kendaraan bermotor, keberadaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), keberadaan sungai yang melintasi kabupaten/kota dan pelayaran kapal motor sepanjang tahun untuk mobilitas orang dan barang, dan keberadaan lapangan terbang perintis.

## 2.2. Potret Transportasi Indonesia

Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Ditinjau dari tujuan pembangunan berkelanjutan, transportasi memiliki sumbangan atau kontribusi langsung terhadap lima target pada keselamatan jalan (Target 3.6), efisiensi energi (Target 7.3), infrastruktur yang berkelanjutan (Target 9.1), akses perkotaan (Target 11.2), dan fosil subsidi BBM (Target 12.c). Transportasi juga memiliki tujuh sumbangan tidak langsung terhadap target tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi produktivitas pertanian (Target 2.3), polusi udara (Target 3.9), akses ke air minum yang aman (Target 6.1), kota berkelanjutan (Target 11.6),

pengurangan kehilangan makanan (Target 12.3), iklim adaptasi perubahan (Target 13.1), dan mitigasi perubahan iklim (Target 13). Lebih lanjut, kegiatan transportasi memiliki dampak pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di kemudian hari. Kondisi transportasi Indonesia berdasarkan data Podes Kecamatan dan Kabupaten tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Terdapat Fasilitas Transportasi di Indonesia

Berdasarkan Gambar 2.1, tercatat sebanyak 29,57 persen kabupaten/kota di Indonesia terdapat sungai yang digunakan untuk transportasi. Kabupaten/kota tersebut terlintasi sungai dan memiliki layanan kapal motor untuk mobilitas orang dan barang yang beroperasi sepanjang tahun. Pulau Kalimantan merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak sungai. Hal ini juga ditunjukkan dari data bahwa lebih dari 50 persen kabupaten/kota di pulau Kalimantan terdapat sungai yang digunakan untuk transportasi. Perahu motor sudah menjadi salah satu transportasi utama dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang besar. Apalagi sebagian wilayah sangat bergantung pada transportasi air untuk aktivitas sehari-hari.

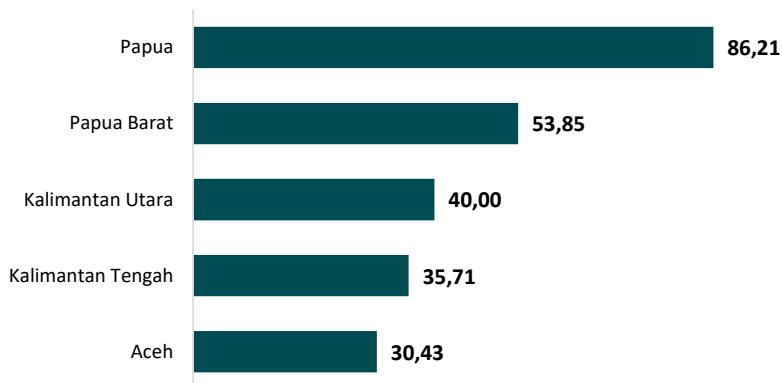
Jika melihat kondisi transportasi udara, tercatat sebanyak 15,95 persen kabupaten di Indonesia terdapat lapangan terbang perintis. Lapangan terbang perintis digunakan untuk angkutan udara perintis yang melayani rute penerbangan dari dan menuju daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani moda transportasi lain dan daerah dengan rute penerbangan yang secara komersial belum menguntungkan. Beberapa wilayah terpencil di Indonesia masih mengandalkan penerbangan perintis untuk dapat mengakses atau menuju wilayah tersebut. Data Podes juga menunjukkan bahwa Provinsi Papua menjadi Provinsi dengan kabupaten/kota yang memiliki lapangan terbang perintis terbanyak di Indonesia. Dengan adanya lapangan terbang perintis beserta layanan penerbangannya, sebagian besar wilayah di Papua dapat diakses dan tidak terisolasi dari kemajuan teknologi yang terus berkembang.

Sarana transportasi darat di Indonesia berkembang pesat selama beberapa dekade. Dari Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa sebanyak 86,19 persen kabupaten/kota di Indonesia terdapat terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih merupakan tempat pemberhentian (pemberangkatan dan kedatangan) bus atau mobil angkutan roda empat atau lebih yang masih beroperasi dan dikelola oleh pemerintah daerah. Keberadaan terminal memiliki peran yang penting dalam mobilitas penduduk dan barang. Adapun dukungan dari perkembangan transportasi di Indonesia yakni ketersediaan SPBU yang mencapai lebih dari 95 persen di kabupaten/kota Indonesia. Dengan kata lain, hanya sebagian kecil wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang belum terdapat SPBU. Keberadaan SPBU sangat mempengaruhi perkembangan transportasi di Indonesia utamanya transportasi darat.



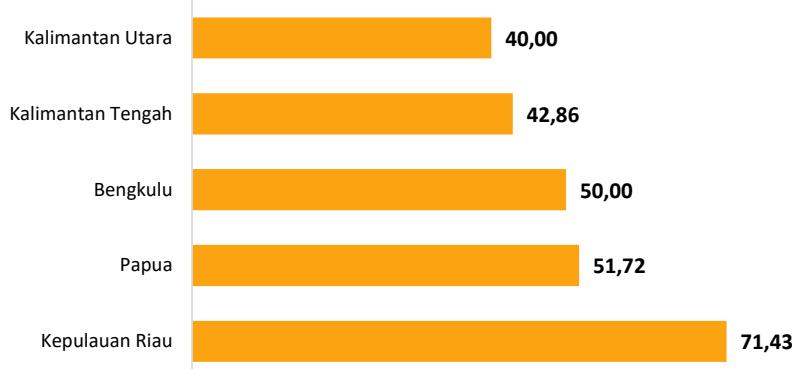
Gambar 2.2. Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Sungai yang Digunakan untuk Transportasi Menurut 5 Provinsi Tertinggi

Beberapa wilayah yang memiliki sungai besar maupun sebagian wilayahnya terdapat sungai sangat bergantung pada transportasi air. Dari Gambar 2.2 disajikan lima provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang terdapat sungai yang digunakan untuk transportasi, dimana sebagian besar tersebar di wilayah Kalimantan. Dari kondisi alam, wilayah Kalimantan terdapat beberapa sungai besar di hampir seluruh wilayahnya. Selain itu, sungai juga sudah menjadi bagian hidup masyarakat Kalimantan yang tidak dapat diabaikan. Berbagai keperluan didistribusikan melalui sungai-sungai termasuk adanya pasar terapung yang menjadi pusat perekonomian masyarakat. Dalam konteks aksesibilitas, sungai yang menjadi pembatas suatu wilayah dengan wilayah lainnya membuat beberapa wilayah sulit untuk dijangkau dan terisolasi. Dengan adanya transportasi air, baik dengan skala kecil maupun besar akan memberikan efek domino terhadap mobilisasi orang, barang, hingga pembangunan di wilayah tersebut secara bertahap.



**Gambar 2.3. Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Lapangan Terbang Perintis Menurut 5 Provinsi Tertinggi**

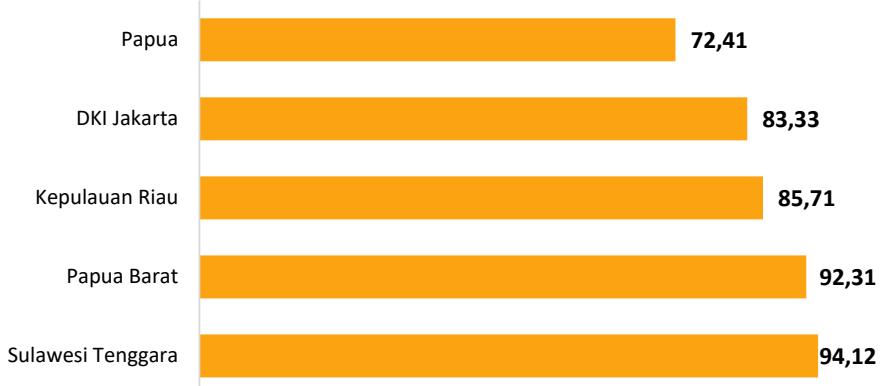
Bagi wilayah dengan kondisi topografi mayoritas pegunungan dan hutan akan memberikan tantangan yang besar dalam hal pembangunan infrastruktur. Itulah yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Dengan kondisi tersebut, tidak heran jika Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menjadi wilayah dengan persentase kabupaten/kota tertinggi yang terdapat lapangan terbang perintis di Indonesia. Secara histori, Papua menjadi wilayah yang paling sulit untuk melakukan pembangunan fisik mengingat wilayahnya yang sulit untuk di akses. Di sisi lain, biaya untuk melakukan pembangunan fisik di Papua juga akan menjadi lebih besar daripada wilayah lain, apalagi jika dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Namun demikian, selama satu dekade terakhir pembangunan di Papua sudah semakin masif. Dengan adanya lapangan terbang perintis, wilayah-wilayah yang terisolasi akibat kondisi geografi akan dapat di akses. Seperti dengan transportasi air maupun darat, kelancaran mobilitas orang dan barang tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah, tetapi juga efek ekonomi, pendidikan hingga kesehatan yang semakin membaik. Wilayah lain dengan persentase kabupaten/kota tertinggi berikutnya adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah berturut-turut sebesar 40 persen dan 35,71 persen.



**Gambar 2.4. Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Terminal Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Menurut 5 Provinsi Terendah**

Dalam konteks transportasi darat, infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek fundamental dalam pembangunan bidang transportasi darat. Infrastruktur jalan ibarat sebagai gerbang menuju pemerataan pembangunan dan kemajuan sebuah peradaban. Meski demikian, diperlukan pula sarana atau alat transportasi untuk melakukan perpindahan barang maupun orang. Sarana transportasi untuk perpindahan orang pilihan masyarakat umumnya adalah transportasi umum massal seperti bus yang kerap dijumpai di terminal.

Dari Gambar 2.4 di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan persentase kabupaten/kota terdapat terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih terendah di Indonesia yakni sebesar 40 persen. Dari sebaran data sebelumnya, Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah memiliki persentase kabupaten/kota yang terdapat lapangan terbang perintis ketiga dan keempat tertinggi di Indonesia. Jika dikaitkan, hal ini dapat mengindikasikan bahwa layanan transportasi yang efektif adalah menggunakan transportasi udara ataupun air. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa konektivitas transportasi umum darat belum merata secara menyeluruh. Di sisi lain, tanpa konektivitas transportasi umum yang diwakili oleh keberadaan terminal penumpang berdampak pada terhambatnya mobilisasi orang maupun barang sehingga pemerataan pembangunan dan ekonomi akan lebih sulit untuk mencapai titik optimal.



**Gambar 2.5. Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut 5 Provinsi Terendah**

Perkembangan pada bidang transportasi harus didukung oleh infrastruktur pendukung yang memadai. Meskipun infrastruktur pendukung dapat berfungsi sebagai penunjang dari infrastruktur transportasi, infrastruktur pendukung juga memiliki peran yang tidak kalah penting seperti ketersediaan SPBU. Dari Gambar 2.5 menunjukkan bahwa Provinsi Papua dan Papua barat masuk ke dalam lima provinsi terendah pada persentase kabupaten/kota yang terdapat SPBU. Dari beberapa indikator yang telah diulas, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi wilayah yang belum memadai pada bidang transportasi. Untuk wilayah DKI Jakarta, terdapat wilayah Kepulauan Seribu yang tidak memiliki SPBU. Secara umum, ketiadaan infrastruktur pendukung seperti SPBU akan menghambat perkembangan transportasi, utamanya transportasi darat yang pada akhirnya memperlambat pemerataan pembangunan dan perbaikan kondisi ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, faktor pendukung transportasi seperti SPBU harus diperhatikan ketersedianya dan sesuai dengan kebutuhan.





<https://www.bps.go.id>

## BAB III

# INDUSTRI DAN TENAGA KERJA



# INDUSTRI DAN TENAGA KERJA



23,54% kabupaten/kota  
di Indonesia yang terdapat  
kawasan industri

34,24% kabupaten/kota  
di Indonesia yang terdapat  
perusahaan PJTKI

33,46% kabupaten/kota  
di Indonesia yang terdapat  
kawasan pergudangan

GUDANG

PJTKI

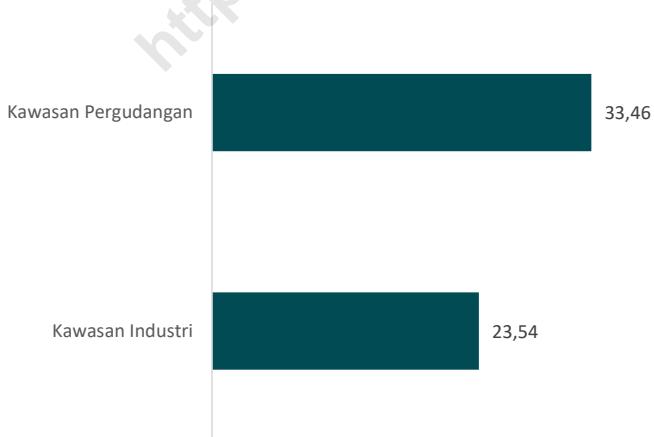


### **3.1. Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan**

Kawasan industri adalah kawasan pusat kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung operasional perusahaan manufaktur dan berbagai kegiatan industri lainnya. Kawasan industri biasanya terletak di daerah tepi atau luar kawasan permukiman dari sebuah kota. Kawasan ini umumnya didukung dengan sistem transportasi yang baik, seperti dilalui jalur kereta dan jalan besar, sehingga mudah diakses.

Di Indonesia, sudah banyak daerah dengan kawasan industri besar yang berada di bawah pengawasan pemerintah atau otoritas khusus. Ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan sektor industri serta menciptakan lapangan kerja. Kawasan industri memegang peran penting dalam perkembangan industri sekaligus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fungsi utama dari kawasan industri adalah sebagai pusat produksi berbagai jenis barang dan produk. Perusahaan-perusahaan manufaktur beroperasi di kawasan ini untuk menghasilkan berbagai produk, mulai dari barang konsumsi hingga barang industri.

Peningkatan produksi barang dan jasa menjadi faktor penting bagi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di satu wilayah. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan kawasan industri dapat menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil pendataan Podes kabupaten/kota memetakan bahwa dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, hanya 121 wilayah, atau hanya sekitar 23,54 persen kabupaten/kota yang terdapat kawasan industri di wilayahnya (Gambar 3.1).



**Gambar 3.1. Persentase Kabupaten/Kota dengan Keberadaan Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan**

Masih minimnya jumlah kawasan industri di Indonesia juga turut menjadi faktor dominan dari keberadaan kawasan pergudangan. Pada umumnya, kawasan pergudangan banyak digunakan sebagai lokasi transit bagi aktivitas ekspor dan impor. Kawasan pergudangan menjadi tempat persinggahan bagi beragam produk yang akan memasuki pasar ekspor, atau produk impor yang akan memasuki pasar lokal. Karena fungsinya tersebut, kawasan pergudangan pada umumnya berlokasi tidak jauh dari bandara atau pelabuhan laut. Terkait keberadaan kawasan pergudangan, pendataan Podes kabupaten/kota mencatat bahwa terdapat 172 kabupaten/kota (33,46 persen) yang memiliki kawasan pergudangan di wilayahnya.

Dalam magnum opus-nya, Adam Smith mengemukakan bahwa kesejahteraan sebuah negara (*welfare state*) mensyaratkan adanya 3 hal, produksi (*production*), distribusi (*distribution*), dan pertukaran (*exchange*). Ketiga komponen tersebut harus berjalan bersama, saling bersinergi agar kesejahteraan bersama dapat terwujud. Merujuk pada konteks magnum opus tersebut, keberadaan kawasan industri adalah representasi dari produksi (*production*), sedangkan keberadaan kawasan pergudangan dapat mewakili komponen distribusi (*distribution*). Sementara aktivitas impor dan ekspor adalah salah satu komponen pertukaran (*exchange*).

Sebagai negara dengan rentang kewilayahan yang luas serta tersusun dari gugusan kepulauan, tidak mudah bagi Indonesia untuk menjadi negara sejahtera (*welfare state*). Namun begitu, cita-cita menjadi negara sejahtera yang mampu melindungi bangsanya dan memelihara kaum miskin dan anak-anak telantar, secara tegas telah tercatat di pasal 33 konstitusi Indonesia. Salah satu upaya Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya menjadi negara kesejahteraan tersebut adalah dengan mengadopsi model pembangunan kewilayahan. Dalam ranah praksisnya, model pembangunan kewilayahan adalah dengan melakukan desentralisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sentra-sentra ekonomi tidak terpusat di satu wilayah, namun tersebar di banyak wilayah. Salah satu tujuan desentralisasi ekonomi ini adalah agar proses distribusi (*distribution*) menjadi lancar sehingga terjadi proses pertukaran (*exchange*) barang dan jasa antar wilayah.

**Tabel 3.1. Sebaran Keberadaan Kawasan Industri Menurut Wilayah**

Wilayah	Jumlah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kawasan Industri	Persentase Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	10	154	37	24,03
Jawa	6	119	35	29,41
Bali dan Nusa Tenggara	3	41	10	24,39
Kalimantan	5	56	19	33,93
Sulawesi	6	81	14	17,28
Maluku dan Papua	4	63	6	9,52

Gambaran desentralisasi dari proses produksi salah satunya dapat dilihat dari sebaran keberadaan kawasan industri sebagaimana tersaji pada Tabel 3.1, sedangkan gambaran terkait desentralisasi proses distribusi tersaji pada Tabel 3.2. Pada Tabel 3.1 terlihat bahwa dari sisi jumlah, Sumatera dan Jawa adalah wilayah dengan keberadaan kabupaten/kota terbanyak yang terdapat kawasan industri di daerahnya. Sementara dari sisi persentase wilayah, Kalimantan menjadi wilayah tertinggi, serta Maluku dan Papua menjadi wilayah yang terendah.

Sementara itu, gambaran desentralisasi dari proses distribusi dapat dilihat dari sebaran keberadaan kawasan pergudangan sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2. Dilihat dari sisi persentase, potret keberadaan kawasan pergudangan agaknya sebarannya cukup merata, dari yang terendah sebesar 28,57 persen di wilayah Maluku dan Papua, hingga yang tertinggi sebesar 39,50 di wilayah Jawa.

**Tabel 3.2. Sebaran Keberadaan Kawasan Pergudangan Menurut Wilayah**

Wilayah	Jumlah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kawasan Pergudangan	Persentase Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	10	154	48	31,17
Jawa	6	119	47	39,50
Bali dan Nusa Tenggara	3	41	16	39,02
Kalimantan	5	56	18	32,14
Sulawesi	6	81	25	30,86
Maluku dan Papua	4	63	18	28,57

### **3.2. Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja**

Dalam tataran teoretis, keberadaan kawasan industri secara alamiah akan menjadi magnet yang akan menarik tenaga kerja dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan. Hal ini tentu saja akan memudahkan para pelaku industri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya serta dapat mengurangi biaya untuk pencarian tenaga kerja. Sektor industri menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar daerah. Perusahaan yang beroperasi di kawasan industri banyak mempekerjakan tenaga kerja, sehingga memberi dampak positif pada tingkat pengangguran, khususnya bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Berdasarkan konsepsi teoritis di atas, data kabupaten/kota dengan keberadaan kawasan industri atau keberadaan kawasan pergudangan, disandingkan dan dilakukan korelasi sederhana dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hasil korelasi tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan kewilayahan sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Korelasi Antara Kawasan Industri dan Kawasan Pergudangan dengan TPT dan TPAK**

Wilayah	Jenis Kawasan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumatera	kawasan industri	-0,21	0,22
	kawasan pergudangan	-0,18	0,19
	Industri dan Pergudangan	-0,15	0,23
Jawa	kawasan industri	-0,34	0,25
	kawasan pergudangan	-0,22	0,30
	Industri dan Pergudangan	-0,28	0,32
Bali dan Nusa Tenggara	kawasan industri	-0,20	-0,02
	kawasan pergudangan	-0,42	0,02
	Industri dan Pergudangan	-0,43	-0,09
Kalimantan	kawasan industri	-0,10	0,23
	kawasan pergudangan	-0,24	0,33
	Industri dan Pergudangan	-0,38	0,48
Sulawesi	kawasan industri	-0,32	0,17
	kawasan pergudangan	-0,30	0,24
	Industri dan Pergudangan	-0,25	0,17
Maluku dan Papua	kawasan industri	-0,14	0,18
	kawasan pergudangan	-0,18	0,41
	Industri dan Pergudangan	-0,27	0,44

Berdasarkan hasil korelasi sebagaimana tersaji di atas, secara umum terlihat bahwa tidak terdapat hubungan keterkaitan yang kuat, baik antara keberadaan kawasan industri di satu wilayah dengan TPT dan TPAK, atau antara keberadaan kawasan pergudangan di satu wilayah dengan TPT dan TPAK. Meski memiliki skor korelasi yang rendah, tabel di atas juga menunjukkan adanya skor korelasi yang cukup menarik untuk dikaji lebih jauh, yaitu yang terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta di wilayah Maluku dan Papua.

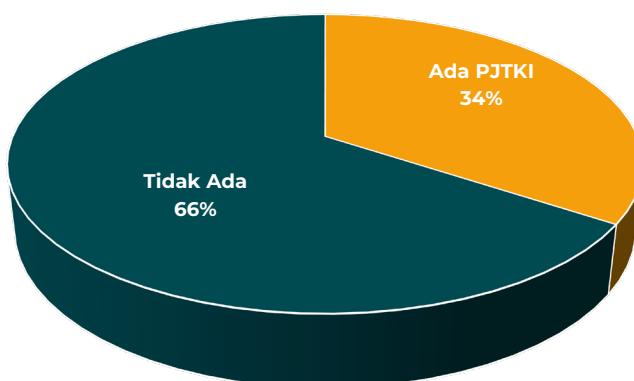
Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, keberadaan kawasan pergudangan di satu kabupaten/kota di wilayah mereka, atau keberadaan kawasan industri atau keberadaan kawasan pergudangan di satu kabupaten/kota di wilayah mereka, terdapat hubungan keterkaitan dengan TPT dengan skor korelasi sebesar -0,42 hingga -0,43.

Di wilayah Kalimantan, keberadaan kawasan industri atau keberadaan kawasan pergudangan di satu kabupaten/kota di wilayah mereka memiliki keterkaitan dengan TPAK dengan skor korelasi sebesar -0,48. Sementara di wilayah Maluku dan Papua, hubungan antara variabel yang sama skor korelasinya sebesar 0,44.

Berdasarkan kajian korelasi sebagaimana disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor industri menciptakan banyak peluang kerja bagi masyarakat sekitar yang dapat memberi dampak positif bagi penurunan tingkat pengangguran, dalam ranah praksisnya belum tentu seideal itu. Terdapat cukup banyak determinan yang menjelaskan fenomena tersebut, di antaranya adalah tidak terpenuhinya kriteria pekerja yang berasal dari lokasi sekitar, yang disyaratkan oleh sektor industri. Selain itu, sebagai sebuah magnet bagi para pencari kerja, keberadaan sentra industri mengundang begitu banyak pencari kerja dari berbagai daerah dengan beragam kriteria keterampilan tertentu. Dampaknya, terjadi persaingan yang cukup tinggi di antara para pencari kerja.

Fenomena sebagaimana diuraikan di atas adalah sedikit penjelasan terhadap terjadinya PDRB semu. Artinya, banyaknya produk dan jasa yang dihasilkan di satu wilayah, tidak selalu berkorelasi positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dalam konteks tersebut, wilayah hanya dijadikan semacam rahim bagi tumbuh kembang beragam produk dan jasa. Sementara nilai lebih dari beragam komoditas tersebut dipindahkan dan dinikmati oleh wilayah lain. Atas dasar itu pula, sejak diterapkannya otonomi daerah, cukup banyak wilayah yang menerapkan dan mensyaratkan *affirmative action* bagi perusahaan yang akan berinvestasi dan berproduksi di wilayah mereka. Caranya, dengan menerbitkan regulasi yang mensyaratkan perusahaan untuk mengafirmasi sekian persen tenaga kerja lokal.

Tidak terserapnya tenaga kerja lokal di beragam kawasan industri pada umumnya disebabkan oleh rendahnya kualifikasi dari tenaga kerja tersebut. Kriteria minimal yang ditetapkan oleh sektor industri tak dapat dipenuhi oleh para tenaga kerja lokal itu. Dengan kualifikasi yang rendah tersebut, akhirnya mendorong mereka untuk mengadu nasib menjadi TKI sebagai pekerja kasar di negara lain. Terkait hal tersebut, Podes kabupaten/kota memetakan wilayah kabupaten/kota yang terdapat Perusahaan Jawatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).



Gambar 3.2. Persentase Kabupaten/Kota Dengan Keberadaan PJTKI

Hasil pendataan Podes kabupaten/kota menunjukkan dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sebanyak 176 (34,24 persen) di antaranya terdapat perusahaan PJTKI. Meski pun tidak semua wilayah kabupaten/kota terdapat PJTKI, namun dari perspektif kewilayahan, keberadaan PJTKI ini keterwakilannya cukup merata. Artinya, meski dari sisi jumlah boleh jadi terbatas, namun memiliki daya jangkau yang cukup luas. Dalam realitanya, setiap perusahaan memiliki agen-agen representatif yang menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa.

Apabila dilihat dari sisi jumlah, Jawa adalah wilayah dengan kabupaten/kota terbanyak yang terdapat PJTKI di wilayahnya. Sebanyak 73 kabupaten/kota di Jawa terdapat perusahaan PJTKI. Sementara itu, jika dilihat dari pendekatan proporsi, Bali dan Nusa Tenggara menjadi wilayah tertinggi dengan keberadaan perusahaan PJTKI. Sebanyak 80,49 persen kabupaten/kota di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, terdapat perusahaan PJTKI (Tabel 3.4).

**Tabel 3.4. Sebaran Wilayah dengan Keberadaan Perusahaan PJTKI**

Wilayah	Jumlah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota dengan PJTKI	Persentase Kabupaten/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	10	154	43	27,92
Jawa	6	119	73	61,34
Bali dan Nusa Tenggara	3	41	33	80,49
Kalimantan	5	56	7	12,50
Sulawesi	6	81	16	19,75
Maluku dan Papua	4	63	4	6,35





<https://www.bps.go.id>

# **BAB IV**

# **LOKASI**

# **PERTAMBANGAN**



# PERTAMBANGAN MINYAK



9,92 %

kabupaten/kota di Indonesia terdapat **lokasi pertambangan minyak**

i

Lokasi pertambangan minyak dan gas (migas) adalah wilayah eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang usaha pertambangannya dilakukan oleh badan/perusahaan maupun perorangan

# PERTAMBANGAN GAS

kabupaten/kota di Indonesia terdapat **lokasi pertambangan gas**

9,14 %



Lokasi pertambangan minyak dan gas (migas)

adalah wilayah eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang usaha pertambangannya dilakukan oleh badan/perusahaan maupun perorangan

# PERTAMBANGAN NONMIGAS



51,36 %

kabupaten/kota di Indonesia terdapat **lokasi pertambangan nonmigas**

i

Lokasi pertambangan nonmigas adalah wilayah eksplorasi pertambangan nonmigas, seperti: batu bara, timah, nikel, tembaga, pasir besi, panas bumi, dll yang usaha pertambangannya dilakukan oleh badan/perusahaan maupun perorangan



#### **4.1. Pertambangan Berkelanjutan untuk Investasi Jangka Panjang**

Selain sektor pertanian, Indonesia juga memiliki potensi pada sektor pertambangan dan penggalian. BPS mendefinisikan pertambangan sebagai suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Hasil pertambangan meliputi minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, bijih perak, dan bijih mangan.

Sektor pertambangan Indonesia yang potensial ditandai dari laju pertumbuhan pada sektor ini, lebih tepatnya sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan data BPS, tercatat laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2022 mencapai 4,38 persen. Capaian tersebut melampaui capaian tahun 2021. Bahkan, tren laju pertumbuhan sektor ini terus meningkat sejak tahun 2020. Selain itu, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 12,22 persen. Meskipun bukan menjadi kontributor terbesar, tren kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami stabilitas peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Jika dibandingkan dengan sektor lain, sektor industri pengolahan menjadi sektor dengan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi tertinggi. Sektor pertambangan dan penggalian menempati urutan keempat tertinggi dalam hal kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di bawah sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan walaupun kontribusi ketiga sektor tersebut masih fluktuatif dibandingkan sektor pertambangan dan penggalian yang terus meningkat.

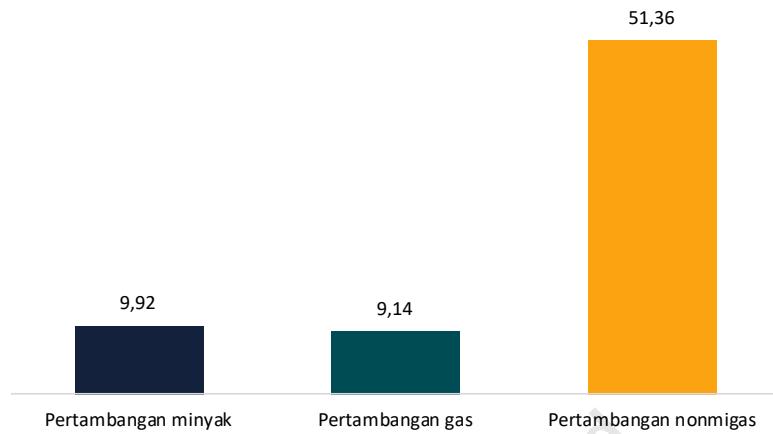
Meskipun sektor pertambangan dan penggalian memiliki potensi terhadap perekonomian negara, bahkan berkontribusi dalam menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sektor ini juga memiliki beberapa isu seperti isu keberlanjutan sektor pertambangan dan penggalian akibat kerusakan lingkungan yang kerap terjadi dari sektor ini. Terjadi eksloitasi alam secara masif dan minim pengendalian terhadap dampaknya pada keberlanjutan lingkungan hidup. Artinya, sektor pertambangan secara tidak langsung adalah sektor yang destruktif terhadap ekosistem lingkungan. Dalam penerapannya, aktivitas pertambangan di Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini juga berkaitan dengan penerapan ekonomi hijau (*green economy*) pada sektor pertambangan dan penggalian. Penerapan ekonomi hijau memiliki prinsip mengurangi risiko terhadap lingkungan secara signifikan serta beriringan dengan peningkatan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial (UNEP, 2011). Secara bertahap, prinsip

ekonomi hijau harus dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam sektor pertambangan dan penggalian. Sehingga sektor ini tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan kondisi alam hingga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertambangan tidak hanya menjadi sektor krusial terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi aset besar Republik Indonesia di masa depan.

Bagian ini mengulas kondisi pertambangan di Indonesia pada tahun 2021 menggunakan data hasil Pendataan Potensi Desa 2021. Cakupan pertambangan dalam bagian ini meliputi pertambangan minyak dan gas (migas) dan pertambangan nonmigas. Karena ketersediaan data yang terbatas, bagian ini hanya mencakup keberadaan lokasi pertambangan gas, keberadaan lokasi pertambangan minyak, dan keberadaan lokasi pertambangan nonmigas pada level kabupaten/kota di Indonesia.

## **4.2. Potret Pertambangan Migas dan Nonmigas Indonesia**

Di Indonesia, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang potensial dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian yang tinggi. Tidak hanya itu, sumbangan sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, menjadikan sektor pertambangan dan penggalian sebagai aset maupun sektor berkelanjutan merupakan sebuah tantangan besar. Perlu usaha dan kolaborasi seluruh pihak yang berkaitan dengan sektor ini agar memberikan sumbangsih kepada tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah penerapan prinsip ekonomi hijau dalam aktivitas pada sektor pertambangan dan penggalian agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga dan yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, selain meningkatnya perekonomian negara utamanya dari sektor pertambangan dan penggalian. Lalu, bagaimana kondisi maupun gambaran pertambangan migas dan nonmigas di Indonesia? Bagaimana potensi wilayah-wilayah yang menjadi konsentrasi pada sektor pertambangan? Kondisi pertambangan migas dan nonmigas Indonesia berdasarkan data Podes Kabupaten tahun 2021 disajikan pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Terdapat Lokasi Pertambangan di Indonesia

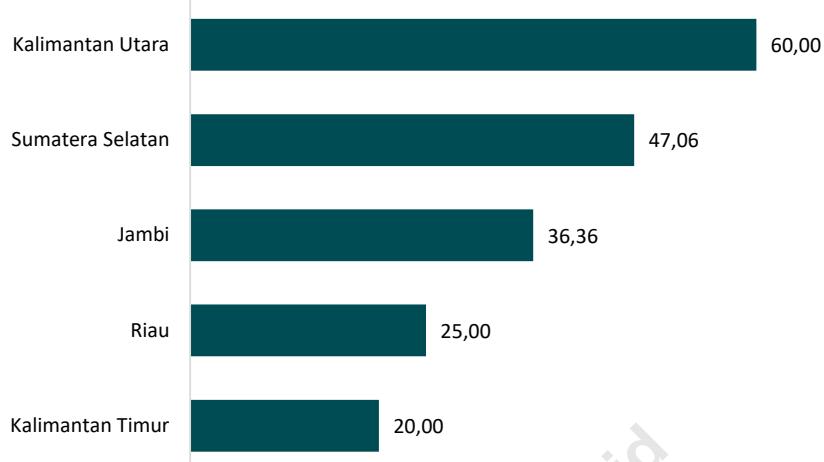
Pada pendataan Podes kabupaten/kota tahun 2021, pertanyaan mengenai pertambangan dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertambangan minyak, pertambangan gas, dan pertambangan nonmigas. Lokasi pertambangan minyak dan gas (migas) adalah wilayah eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas bumi, yang usaha pertambangannya dilakukan oleh badan/perusahaan maupun perorangan di kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 4.1, tercatat sebanyak 9,92 persen kabupaten/kota di Indonesia terdapat lokasi pertambangan minyak. Lokasi pertambangan minyak Indonesia cenderung tersebar di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Berbeda dengan pertambangan minyak, sebaran lokasi pertambangan gas bumi di Indonesia hampir menyebar di seluruh pulau di Indonesia. Dari data Podes juga tercatat bahwa sebanyak 9,14 persen kabupaten kota di Indonesia memiliki atau terdapat lokasi pertambangan gas bumi.

Pertambangan nonmigas adalah wilayah eksplorasi pertambangan nonmigas, seperti: batu bara, timah, nikel, tembaga, pasir besi, panas bumi, dan lain-lain yang usaha pertambangannya dilakukan oleh badan/perusahaan maupun perorangan di kabupaten/kota. Hasil Podes 2021 mencatat bahwa terdapat sekitar 51,36 persen kabupaten/kota di Indonesia terdapat lokasi pertambangan nonmigas. Indonesia memiliki potensi besar dan juga merupakan salah satu penghasil emas dan nikel terbesar di dunia. Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, lokasi pertambangan nonmigas di Indonesia tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan jumlah lokasi yang variatif, bahkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lokasi pertambangan nonmigas.



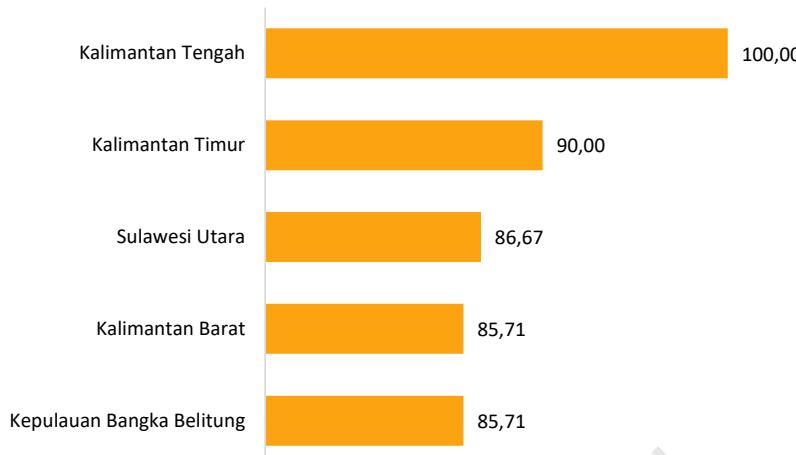
Gambar 4.2. Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Minyak Menurut Provinsi

Peta lokasi pertambangan minyak Indonesia cenderung tersebar di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat lima provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang terdapat lokasi pertambangan minyak. Seluruh provinsi tersebut tersebar di dua pulau, yakni pulau Sumatera dan pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Utara, empat dari lima kabupaten/kota memiliki lokasi pertambangan minyak. Ini juga menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah dengan kabupaten/kota terbanyak yang memiliki lokasi pertambangan minyak di Indonesia. Dua provinsi di pulau Kalimantan yakni, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan wilayah pertambangan minyak terbesar yang dimiliki Indonesia. Jika dijumlahkan, terdapat paling tidak sembilan titik lokasi pertambangan minyak. Berikutnya, Provinsi Jambi menduduki peringkat kedua dengan lebih dari setengah kabupaten/kotanya memiliki lokasi pertambangan minyak. Jika diteliti dari jumlah absolut, kabupaten/kota yang memiliki lokasi pertambangan minyak, Provinsi Sumatera Selatan memiliki kabupaten/kota terbanyak yang memiliki pertambangan minyak di Indonesia.



**Gambar 4.3. Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Gas Menurut Provinsi**

Data hasil Podes kabupaten/kota menunjukkan bahwa lokasi pertambangan gas di Indonesia jika ditinjau dari persentase kabupaten/kota tertinggi yang terdapat pertambangan gas cenderung tersebar di wilayah pulau Sumatera dan Kalimantan. Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa sebanyak 60 persen kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan utara terdapat lokasi pertambangan gas, merupakan tertinggi di Indonesia. Pada wilayah pulau Sumatera, sebanyak 47 persen kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki atau terdapat pertambangan gas. Jika dilihat dari jumlah absolut, Provinsi Sumatera Selatan memiliki kabupaten/kota terbanyak yang terdapat pertambangan gas, paling tidak sebanyak 8 lokasi tambang gas. Selain itu, hanya Provinsi Kalimantan Barat yang tidak memiliki lokasi pertambangan gas dibandingkan provinsi lainnya di pulau Kalimantan. Pulau Jawa juga memiliki sebagian besar wilayahnya yang terdapat pertambangan gas. Hasil ini menunjukkan bahwa persebaran lokasi pertambangan gas di Indonesia tidak hanya mengelompok di suatu wilayah, tapi sudah menyebar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang merata dan menjanjikan.



**Gambar 4.4. Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Nonmigas Menurut Provinsi**

Pada tahun 2021, pertambangan nonmigas Indonesia sudah tersebar di seluruh provinsi. Bahkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki atau terdapat lokasi pertambangan nonmigas. Jika dianalisis menurut pulau, pulau Kalimantan memiliki kabupaten/kota dengan persentase tertinggi daripada wilayah lainnya. Di pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Utara memiliki persentase kabupaten/kota dengan lokasi pertambangan nonmigas tertinggi daripada provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Dalam konteks hasil pertambangan nonmigas, pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk melakukan hilirisasi bahan tambang. Hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan hilirisasi, komoditas yang dieksport tidak lagi berwujud bahan baku mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Selain hilirisasi, pemerintah dan juga pelaku usaha harus memerhatikan aspek lingkungan agar tidak terjadi degradasi kualitas lingkungan akibat eksplorasi hasil bumi. Dengan demikian, pertambangan berkelanjutan dapat diwujudkan secara bertahap.



<http://www.bps.go.id>

## BAB V

# POTENSI PESISIR



# POTENSI PESISIR

41,63% kabupaten/kota di Indonesia terdapat permukiman di atas permukaan sungai/danau

55,84% kabupaten/kota di Indonesia terdapat pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan

53,89% kabupaten/kota di Indonesia terdapat wilayah yang ditetapkan sebagai kecamatan pesisir

36,96% kabupaten/kota di Indonesia terdapat permukiman di atas permukaan laut

50,97% kabupaten/kota di Indonesia terdapat tempat pelelangan ikan



## 5.1. Negeri Maritim

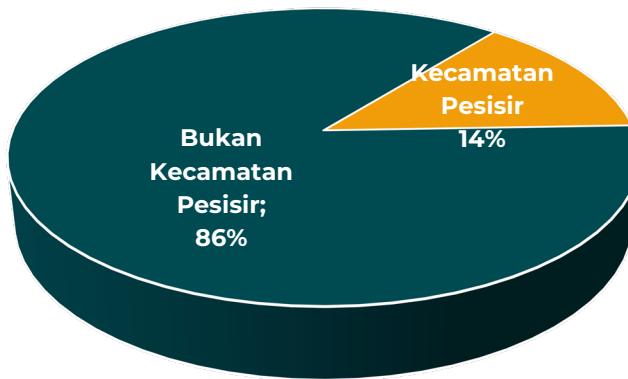
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan Keputusan Kemendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau Tahun 2021, jumlah pulau di Indonesia adalah 17.001. Luas perairan Indonesia adalah 6.400.000 km<sup>2</sup>, sedangkan luas NKRI (darat+perairan) seluas 8.300.000 km<sup>2</sup>. Sebanyak 77,11 persen wilayah Indonesia merupakan perairan (PUSHODROSAL, 2018).

Gagasan untuk menyatukan Indonesia yang berkepulauan inilah yang melatari IPTN pada saat itu mengembangkan jenis pesawat komersial dengan kapasitas sedang seperti N250. Pada saat itu, pabrikan besar pesawat terbang seperti Boeing dan Airbus belum memproduksi jenis pesawat semacam itu. Gagasan itu pula yang melatari wacana Tol Laut, menjadikan laut sebagai tulang punggung transportasi. Jika mau menengok lebih jauh lagi, cita-cita menyatukan negeri berkepulaun ini juga yang melatari Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa.

Dengan wilayah perairan laut seluas itu diperkirakan sebanyak 44 persen dari lalu lintas laut global, dan 95 persen dari kapal di wilayah Asia Pasifik, memasuki perairan Indonesia melalui beberapa titik. Vegetasi laut dan pesisir Indonesia adalah kontributor signifikan terhadap pasokan oksigen global dan penyerapan karbon dioksida. Di sepanjang garis pantai Indonesia, adalah hutan bakau (*mangrove*) terbesar di dunia, dengan luas sekitar 3,2 juta hektar. Menurut laporan UNEP, garis pantai Indonesia juga merupakan rumah bagi padang lamun terbesar di dunia, yang membentang seluas 30.000 km<sup>2</sup>. Berada di tengah segitiga karang dunia (*coral triangle*), Indonesia menyimpan kekayaan terumbu karang dengan luasan hampir 50.000 km<sup>2</sup>, atau 18 persen terumbu karang dunia.

Potensi kelautan yang sangat melimpah itu tentu saja membutuhkan pengelolaan yang tepat. Sebab, alih-alih membawa dampak kesejahteraan, penanganan yang keliru atas anugrah yang melimpah itu bisa saja akan membawa bencana. Salah satu upaya pemerintah untuk mengelola potensi laut yang melimpah itu adalah dengan menetapkan wilayah-wilayah kecamatan yang berbatasan dengan laut sebagai kecamatan pesisir. Dengan penetapan tersebut pemerintah memantau, membuat berbagai macam proyek pemberdayaan, serta memberikan *affirmative action* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

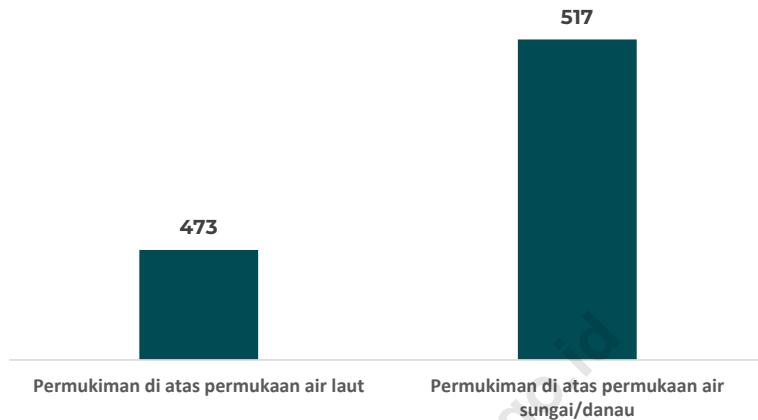
Berdasarkan hasil pendataan Podes 2021, diketahui sebanyak 994 kecamatan ditetapkan sebagai kecamatan pesisir. Kecamatan-kecamatan tersebut tersebar di 277 kabupaten/kota. Artinya, terdapat 53,89 persen kabupaten/kota di Indonesia yang minimal satu kecamatannya ditetapkan oleh pemerintah sebagai kecamatan pesisir. Dengan mengacu pada fakta geografis Indonesia yang 77,11 persen wilayahnya berupa perairan, serta fakta bahwa jumlah kecamatan di Indonesia sebanyak 7.274 kecamatan, penetapan jumlah kecamatan pesisir tersebut agaknya masih sangat rendah. Sebab, jumlah kecamatan yang ditetapkan tersebut hanya sekitar 13,67 persen (Gambar 5.1).



Gambar 5.1. Persentase Kecamatan yang Ditetapkan sebagai Kecamatan Pesisir

## 5.2. Permukiman di Wilayah Pesisir

Salah satu ciri wilayah pesisir adalah terdapat permukiman penduduk yang berlokasi di atas permukaan air laut. Secara umum, penduduk yang menetap di lokasi di atas permukaan laut dikenal masyarakat dengan sebutan suku laut atau orang laut. Kelompok masyarakat yang kerap digelari dengan sebutan orang laut itu keberadaannya cukup banyak di Indonesia, antara lain, suku Bajo, Bugis, Buton, dan Suku Laut yang mendiami Selat Malaka dan wilayah perairan di Kepulauan Riau. Berdasarkan pendataan Podes 2021, diketahui bahwa sebanyak 473 kecamatan di Indonesia menyatakan bahwa di wilayahnya terdapat kelompok penduduk yang bermukim di atas permukaan laut (Gambar 5.2). Selain di atas permukaan laut, di Indonesia terdapat pula permukiman penduduk yang berada di atas permukaan air sungai, atau danau. Pendataan Podes mencatat bahwa sebanyak 517 kecamatan menyatakan bahwa di wilayah mereka terdapat permukiman di atas permukaan sungai/danau.

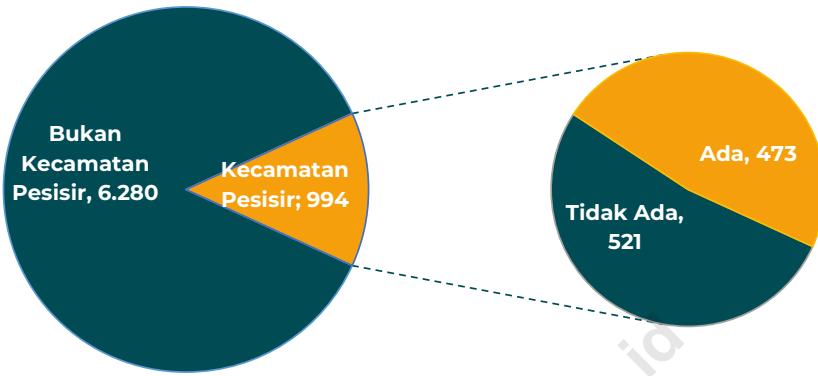


**Gambar 5.2. Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Permukiman di Atas Permukaan Air**

Penetapan kecamatan pesisir sebanyak 994 itu tidak dapat dibaca sebagai jumlah total kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir. Sebab, jumlah 994 itu adalah wilayah yang ditetapkan sebagai kecamatan pesisir yang secara terstruktur akan diberikan perlakuan khusus guna mendorong percepatan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 994 wilayah tersebut adalah wilayah ujicoba yang akan dijadikan sebagai proyek percontohan.

Meski jumlah 994 tersebut tidak dapat dibaca sebagai jumlah keseluruhan wilayah kecamatan yang berlokasi di wilayah pesisir, namun jumlah tersebut tetap dapat digunakan sebagai determinan dari kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan pesisir. Salah satu contohnya adalah dengan mengaitkan antara jumlah kecamatan pesisir tersebut dengan keberadaan permukiman penduduk yang berada di atas permukaan air laut. Sebagaimana tersaji pada Gambar 5.3, jika dibandingkan dengan jumlah wilayah yang ditetapkan sebagai kecamatan pesisir, keberadaan permukiman di atas permukaan laut jumlahnya hanya sekitar 47,59 persen.

Fakta ini agaknya dapat dimaknai dengan dua hal. Pertama, sebagaimana yang terjadi pada keluarga petani, estafet cara hidup dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh generasi tua tidak lagi diminati oleh generasi penerusnya. Generasi baru yang hidup di era yang sangat jauh berbeda dengan era orangtuanya memilih cara hidup berbeda yang mereka anggap lebih baik. Kedua, munculnya kesadaran untuk berubah, entah karena faktor eksternal atau pun faktor internal. Faktor eksternal antara lain disebabkan adanya pembentahan tata ruang wilayah, sementara faktor internal pada umumnya berasal dari pergulatan batin yang terjadi dalam jangka waktu tertentu

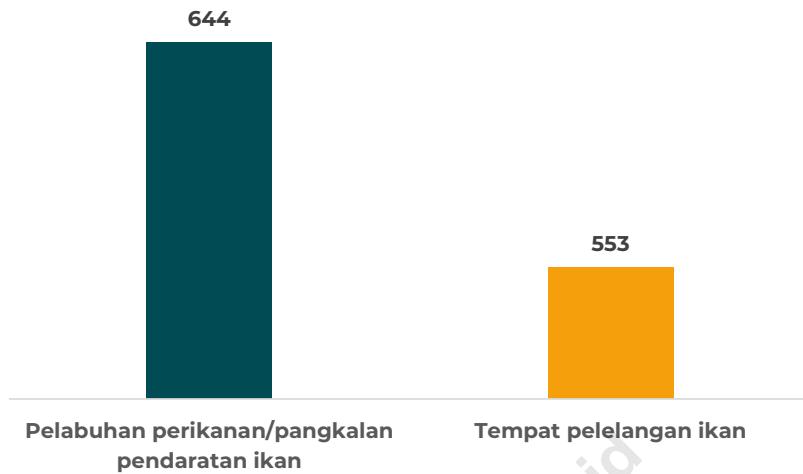


Gambar 5.3. Banyaknya Kecamatan Pesisir dan Keberadaan Permukiman di Atas Permukaan Air Laut

### 5.3. Potensi Perikanan Laut

Keberadaan wilayah pesisir, khususnya wilayah yang ditetapkan sebagai kecamatan pesisir, berperan sangat penting bagi sebuah negara yang lebih dari 70 persen wilayahnya berupa perairan. Kecamatan pesisir menjadi ujung tombak untuk mengoptimalkan seluruh potensi kelautan yang tidak terbatas itu, khususnya potensi perikanan laut. Potensi perikanan laut yang besar tersebut tentunya membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendorong kelancaran aktivitas ekonomi kelautan.

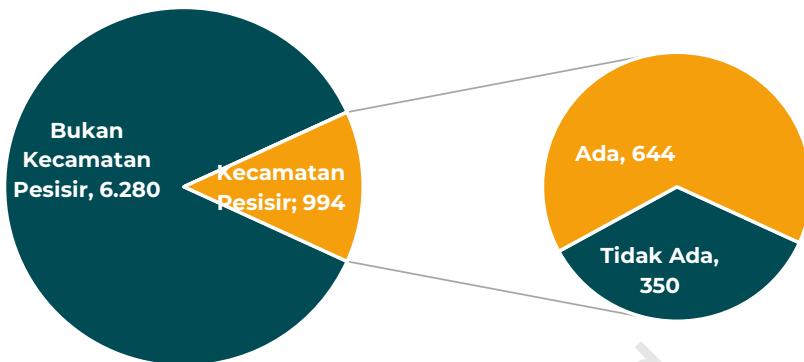
Terdapat setidaknya dua jenis infrastruktur penting yang keberadaannya dapat menopang kelancaran aktivitas ekonomi kelautan, khususnya perikanan. Kedua jenis infrastruktur tersebut adalah pelabuhan perikanan, dan tempat pelelangan ikan (TPI). Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.08/MEN/2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.



**Gambar 5.4. Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan**

Berdasarkan hasil pendataan Podes tahun 2021, keberadaan pelabuhan perikanan diketahui terdapat di 644 kecamatan di 287 kabupaten/kota. Dengan kata lain, pelabuhan perikanan baru terdapat di 8,85 persen kecamatan, atau di 55,84 persen kabupaten/kota (Gambar 5.4). Sementara itu, keberadaan TPI diketahui hanya terdapat di 553 kecamatan di 262 kabupaten/kota.

Sebagai negara maritim yang lebih dari 70 persen wilayahnya berupa perairan, jumlah pelabuhan perikanan dan TPI yang ada agaknya masih belum merepresentasikan Indonesia sebagai negara maritim yang kekuatan ekonominya seharusnya bertumpu pada laut. Fakta tersebut agaknya membuktikan kebenaran bahwa kita selama ini justru memilih memunggungi laut, alih-alih menungganginya demi mengoptimalkan potensi ekonomi yang luar biasa besar tersebut. Tidak mengherankan bila selama ini wilayah pesisir identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, gagasan penetapan kecamatan pesisir kiranya perlu dikembangkan dan dikerjakan dengan lebih serius. Harapannya, gerakan tersebut dapat menghapus stigma pesisir sebagai wilayah miskin dan terbelakang.



Gambar 5.5. Banyaknya Kecamatan Pesisir dan Keberadaan Pelabuhan Pendaratan Ikan

Program kecamatan pesisir agaknya dapat menjadi batu pijakan guna memaksimalkan potensi kelautan yang kita miliki. Salah satu caranya adalah dengan memperlebar infrastruktur utama dari ekonomi kelautan, yaitu pelabuhan perikanan dan TPI. Indonesia perlu memperkecil gap antara permintaan pasar akan komoditas perikanan laut dengan prasarana jalur distribusi yang cepat, misalnya, dengan memperbanyak keberadaan pelabuhan perikanan dan TPI. Harapannya, stigma wilayah pesisir sebagai kantong kemiskinan dan keterbelakangan perlahan memudar dan berganti wajah menjadi wilayah yang sejahtera.

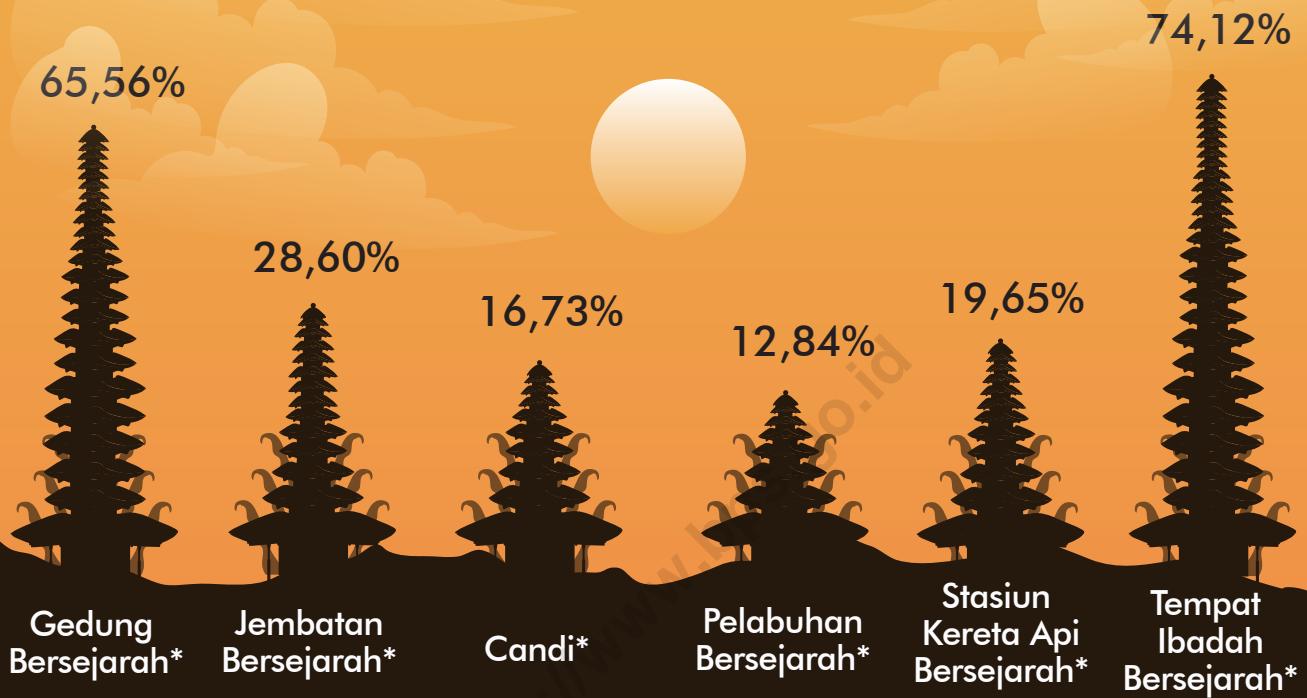


## **BAB VI**

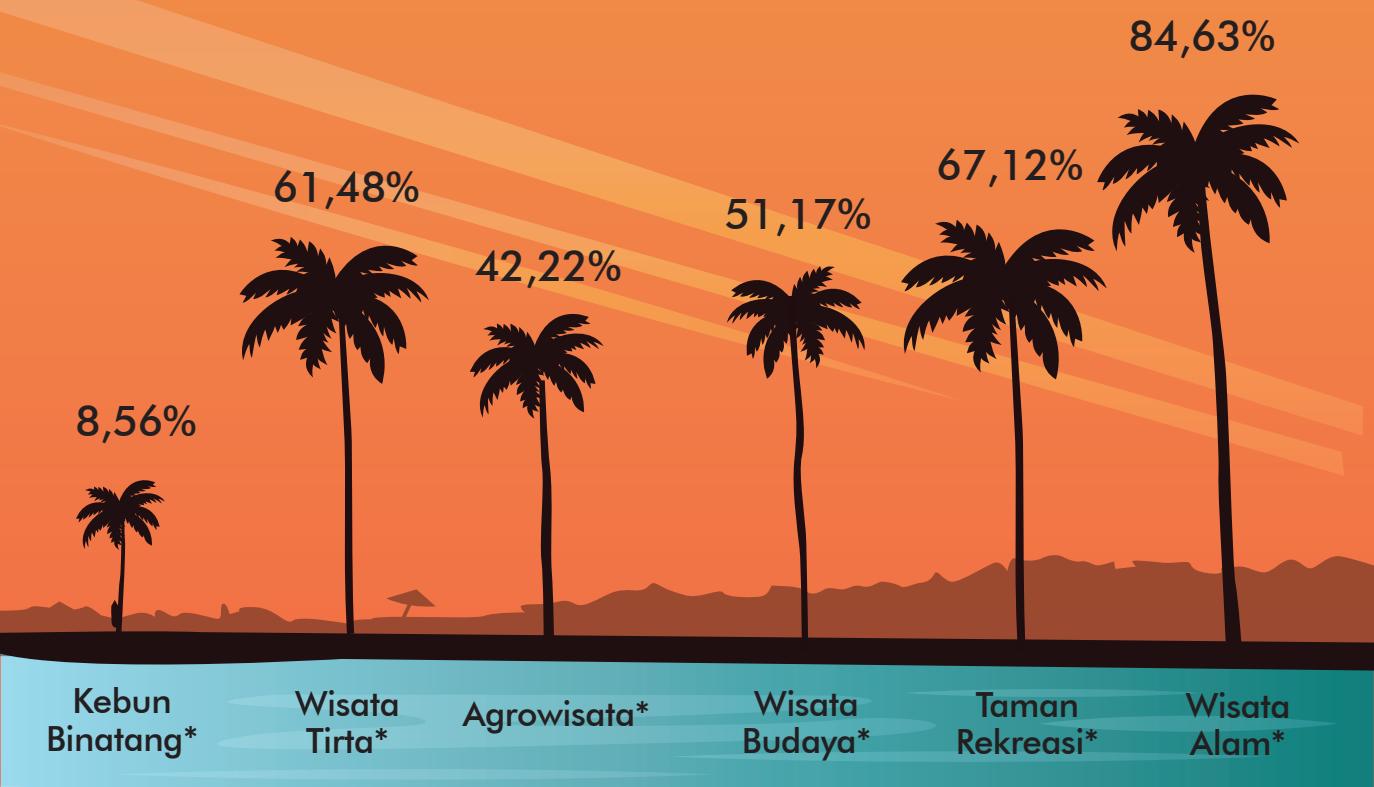
# **PARIWISATA**



# PARIWISATA



\* Persentase kabupaten/kota  
di Indonesia terdapat objek wisata





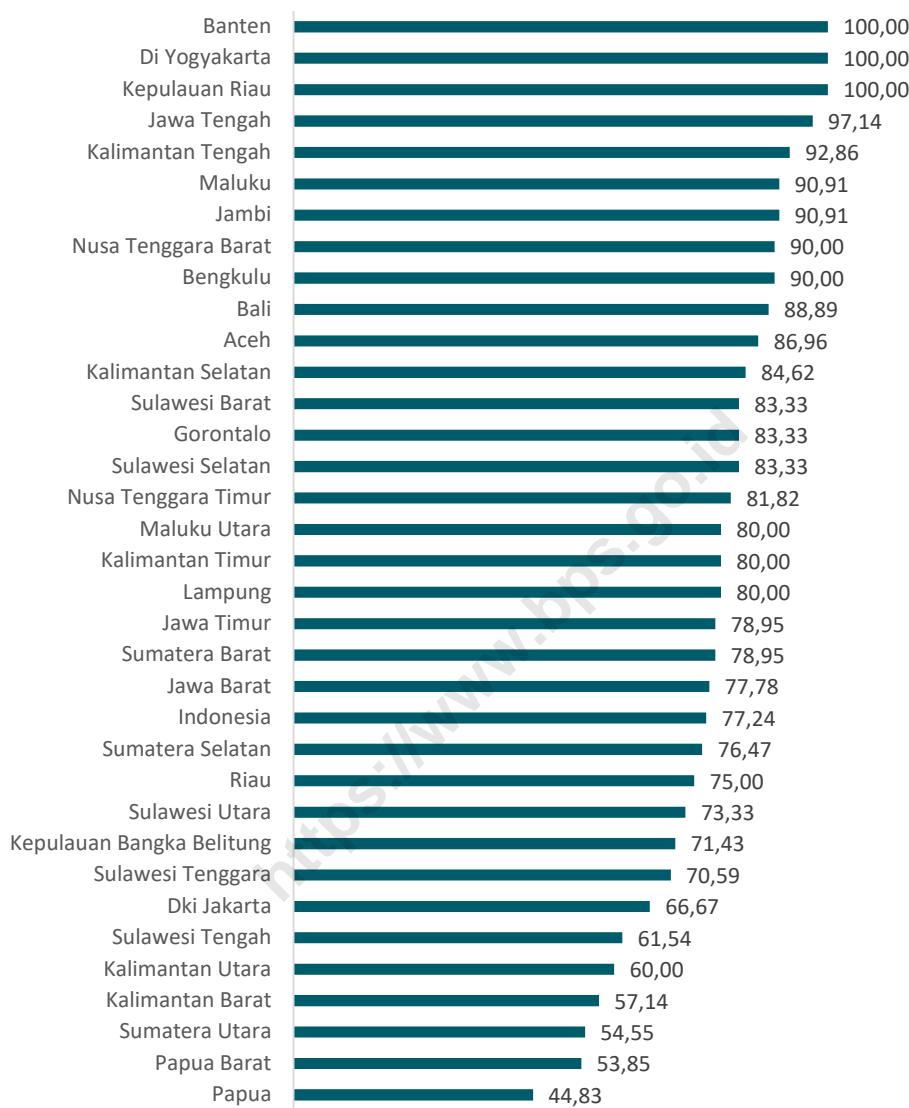
## 6.1. Pariwisata dan Desa Wisata

Pariwisata memiliki peran penting bagi pertumbuhan suatu negara, baik dalam sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia yang memiliki keanekaragaman alam, budaya, dan keindahan alam, pariwisata merupakan potensi besar yang dapat terus dimanfaatkan. Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia dan menjadi penyumbang devisa utama. *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) dalam laporan *Tourism Trends and Policies* 2022 menyebutkan pada 2019, sektor pariwisata menyumbang 5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Dari sisi sosial, pariwisata berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Dari sisi budaya, pariwisata membantu promosi dan pelestarian warisan budaya dan sejarah bagi negara Indonesia.

Menurut *World Tourism Organization*, pariwisata adalah fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat di luar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi atau bisnis atau profesional. Orang-orang ini disebut sebagai pengunjung dan pariwisata berkaitan dengan kegiatan mereka, beberapa diantaranya melibatkan pengeluaran pariwisata. Pariwisata menjadi sektor yang perlu diperhatikan karena tidak hanya menarik minat lokal, tetapi juga internasional.

Pemerintah Indonesia terus mengembangkan pembangunan pada bidang pariwisata, salah satunya melalui desa wisata. Desa wisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa (Limanseto, 2021). Selain itu, pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan desa wisata dengan konsep pariwisata berkelanjutan. Dengan desa wisata berkelanjutan, pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan dari kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memerhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.

Pendataan Podes 2021 berupaya melihat keberadaan desa wisata yang ada di Indonesia. Desa Wisata adalah sebuah kawasan perdesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduk desa biasanya memiliki tradisi dan budaya yang khas, alam dan lingkungan yang masih terjaga. Keberadaan desa wisata diatur dengan peraturan daerah (Perda) setempat. Adapun cakupan pariwisata pada bagian ini meliputi keberadaan desa wisata, kebun binatang, wisata tirta, agrowisata, wisata budaya, taman rekreasi, dan wisata alam. Tidak hanya itu, bagian ini juga mengulas keberadaan situs atau bangunan bersejarah meliputi gedung bersejarah, jembatan bersejarah, candi, pelabuhan bersejarah, stasiun kereta api bersejarah, dan tempat ibadah bersejarah.



**Gambar 6.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Desa Wisata Menurut Provinsi Tahun 2021**

Hasil Pendataan Podes 2021 mencatat sebanyak 77,24 persen kabupaten/kota di Indonesia setidaknya memiliki satu desa wisata. Jika dilihat dari wilayahnya, hampir seluruhnya memiliki persentase lebih dari 50 persen. Bahkan, Provinsi Banten, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau memiliki desa wisata pada seluruh kabupaten/kotanya. Tercatat bahwa hanya Provinsi Papua yang memiliki kabupaten/kota yang memiliki desa wisata di bawah 50 persen. Dari hasil ini sangat terlihat bahwa potensi desa wisata

di Indonesia besar dan harus dikembangkan. Pemerintah Indonesia sejauh ini sudah berupaya untuk pengembangan desa wisata dengan konsep pariwisata berkelanjutan atau *sustainable tourism*. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memerhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan (Kemenparekraf, 2021). Hingga 2021, beberapa desa di Indonesia sudah menjadi percontohan dalam pariwisata berkelanjutan. Desa-desa tersebut tersebar di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan. Dalam pengembangannya, pemerintah memberlakukan pedoman pariwisata berkelanjutan yakni pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, serta pelestarian lingkungan.

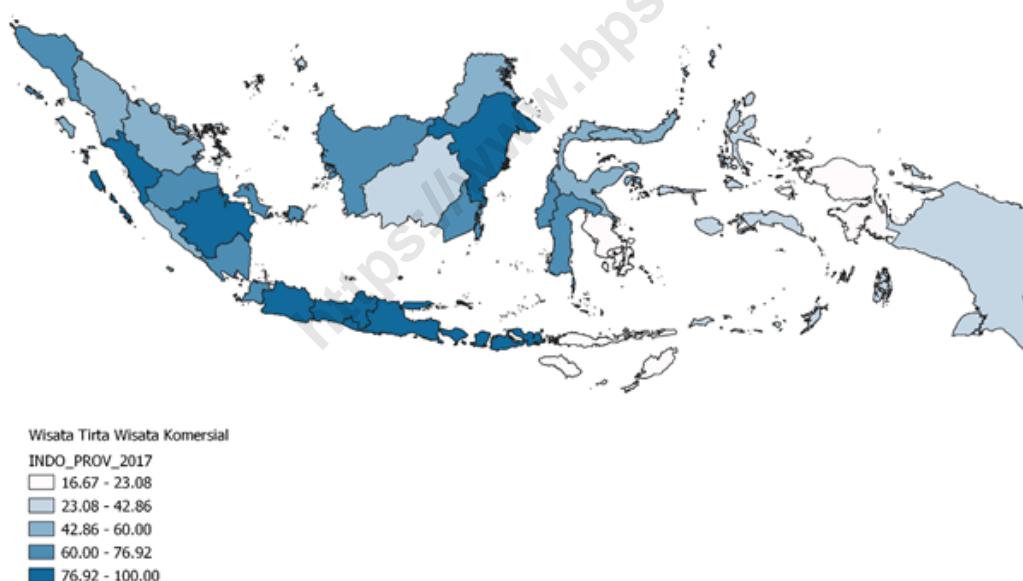
## 6.2. Wisata Komersial

Daya tarik wisata komersial adalah salah satu aspek penting dalam pariwisata. Daya tarik wisata komersial adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, di mana pengunjung harus membayar dalam rangka menikmati daya tarik wisata tersebut. Daya tarik wisata komersial seringkali menarik wisatawan karena menawarkan pengalaman yang terorganisir, hiburan, dan layanan yang lebih khusus. Wisata komersial yang dicakup pada Pendataan Podes 2021 meliputi kebun binatang, wisata tirta, agrowisata, wisata budaya, taman rekreasi, dan wisata alam.



Gambar 6.2. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Kebun Binatang Menurut Provinsi Tahun 2021

Berdasarkan hasil Pendataan Podes 2021, keberadaan kebun binatang lebih banyak tersebar di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa sendiri, hampir seluruh provinsi terdapat kabupaten/kota memiliki kebun binatang. Secara keseluruhan, Provinsi DI Yogyakarta menduduki peringkat pertama untuk provinsi dengan kabupaten/kota yang memiliki kebun binatang terbanyak, yaitu 2 dari 5 kabupaten/kota (40 persen). Di sisi lain, terdapat sepuluh provinsi yang kabupaten/kotanya tidak memiliki kebun Binatang. Provinsi tersebut yaitu Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Untuk peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata khususnya kebun binatang, perlu dilakukan improvisasi dalam menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Apalagi, kebun binatang menjadi salah satu media untuk mempelajari keanekaragaman satwa. Dalam improvisasi dan pengembangan wisata kebun binatang, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti pengembangan atraksi wisata, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana, hingga peningkatan mutu layanan (Irsyad, et al., 2017).



Gambar 6.3. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Wisata Tirta Menurut Provinsi Tahun 2021

Gambar 6.3 menunjukkan wisata tirta ada di seluruh provinsi di Indonesia. Wisata tirta adalah kegiatan atau suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, selancar, para layar, dan motor air sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas pelengkap termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Termasuk juga usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung

jeram sebagai usaha pokok di kawasan tertentu. Hasil Pendataan Podes 2021 mencatat bahwa DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya memiliki wisata tirta, sedangkan Provinsi lainnya di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta hanya terdapat satu kabupaten/kota yang memiliki wisata tirta. Dengan potensi wisata tirta di seluruh wilayah Indonesia, diperlukan usaha besar dan konsisten agar wisata tirta dapat berkembang pesat. Pengembangan wisata tirta juga harus berorientasi pada pariwisata berkelanjutan. Apalagi banyak wisata tirta di Indonesia memanfaatkan kondisi natural dari alam sehingga diperlukan aksi serius untuk mempertahankan kelestarian alam. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana juga perlu dilakukan agar wisata tirta lebih nyaman dan mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung.



Gambar 6.4. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Agrowisata Menurut Provinsi Tahun 2021

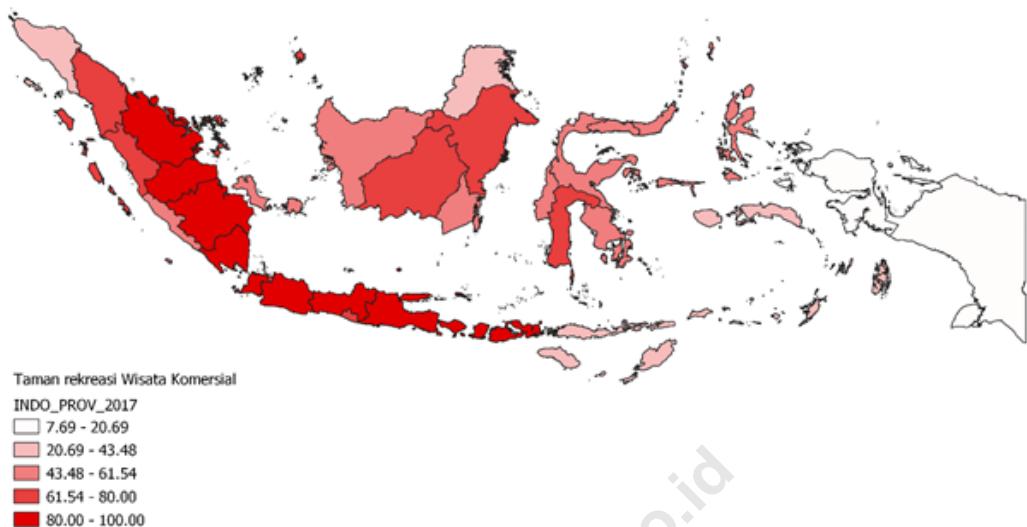
Ditinjau dari sebaran wilayahnya, hasil Pendataan Podes 2021 menunjukkan keberadaan agrowisata lebih banyak tersebar di Pulau Jawa. Dengan kata lain, Jawa masih mendominasi agrowisata di Indonesia. Agrowisata adalah usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Secara umum, Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur secara berturut-turut merupakan provinsi dengan persentase kabupaten/kota terbanyak yang memiliki agrowisata. Pengembangan agrowisata yang baik harus mampu menjaga esensi dari sektor pertanian agar tidak terjadi degradasi kodisi pertanian. Dengan kata lain, pengembangan agrowisata tidak hanya berfokus kepada peningkatan pendapatan,

tetapi juga upaya peningkatan kualitas lingkungan utamanya pertanian. Dari seluruh wilayah, Provinsi Sulawesi Tenggara hanya terdapat 1 dari 17 kabupaten/kota yang memiliki agrowisata atau sekitar 5,88 persen.



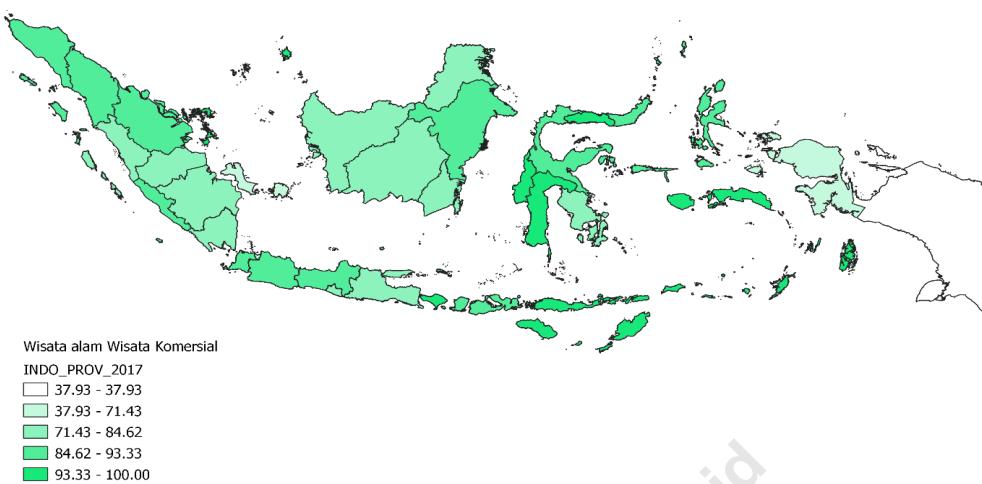
Gambar 6.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Wisata Budaya Menurut Provinsi Tahun 2021

Pendataan Podes 2021 mencatat wisata budaya ada di setiap provinsi di Indonesia, kecuali Maluku Utara. Bahkan Provinsi DI Yogyakarta memiliki wisata budaya di seluruh kabupaten/kotanya. Wisata budaya adalah kegiatan operasional museum seni, museum perhiasan, furnitur, pakaian, barang tembikar (keramik), barang perak, museum teknologi, ilmu pengetahuan dan sejarah alam, museum bersejarah, mencakup museum militer, kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pergelaran budaya. Provinsi di Pulau Jawa juga mendominasi wisata budaya di Indonesia yang terlihat dari gradasi warna yang lebih gelap dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jika dilihat dari sejarahnya, berbagai peninggalan sejarah ada di Pulau Jawa baik peninggalan kerajaan, maupun berbagai peninggalan sejarah lainnya. Berkebalikan dengan kondisi Pulau Jawa, Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah hanya terdapat 2 dari 13 kabupaten/kota yang memiliki wisata budaya.



Gambar 6.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Taman Rekreasi Menurut Provinsi Tahun 2021

Pendataan Podes 2021 menunjukkan bahwa taman rekreasi ada di setiap provinsi di Indonesia. Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mendominasi untuk keberadaan taman rekreasi. Menurut definisinya, taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Potensi taman rekreasi sangat besar ditandai dengan keberadaan taman rekreasi di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam konteks peningkatan kualitas masyarakat, taman rekreasi dapat menjadi sarana untuk meredakan penat atau stres, apalagi jika dilakukan bersama keluarga dapat meningkatkan hubungan dalam keluarga yang pada akhirnya meningkatkan kualitas keluarga. Di wilayah Indonesia timur, Provinsi Papua Barat hanya memiliki satu kabupaten/kota yang terdapat taman rekreasi. Sementara itu, Provinsi Banten memiliki taman rekreasi di setiap kabupaten/kotanya.



**Gambar 6.7. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Taman Rekreasi Menurut Provinsi Tahun 2021**

Wisata alam merupakan salah satu wisata unggulan yang dimiliki Indonesia. Berdasarkan Hasil Pendataan Podes 2021 atau Gambar 7, wisata alam terdapat di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan, Provinsi Kepulauan Riau, Bali, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku memiliki wisata alam di seluruh kabupaten/kotanya. Wisata alam adalah kegiatan daya tarik wisata alam, seperti wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, dan lainnya. Hanya Provinsi Papua yang memiliki persentase di bawah 50 persen untuk kabupaten/kota yang memiliki wisata alam. Dewasa ini, arah pengembangan wisata alam harus ditujukan pada pariwisata berkelanjutan. Artinya, daya tarik alam yang menjadi andalan dalam sektor ini kualitasnya harus dipertahankan. Selain itu, kemudahan dalam akses terhadap beberapa wisata alam dan berbagai sarana prasarana juga harus ditingkatkan sehingga wisatawan tertarik untuk mengunjungi wisata alam di seluruh wilayah Indonesia.

### **6.3. Situs/Bangunan Bersejarah**

Indonesia memiliki sejumlah situs/bangunan bersejarah yang dapat menjadi daya tarik dalam pariwisata. Situs/bangunan bersejarah ini mencerminkan warisan budaya dan sejarah yang menceritakan masa lalu Indonesia dari berbagai periode zaman di Indonesia. Situs/bangunan bersejarah yang dimaksud mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu benda, bangunan, atau struktur yang berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Situs/bangunan bersejarah ditetapkan oleh pemerintah. Cakupan situs/bangunan sejarah yang dicatat pada Pendataan Podes 2021

adalah gedung bersejarah, jembatan bersejarah, candi, pelabuhan bersejarah, stasiun kereta apa bersejarah, dan tempat ibadah bersejarah.



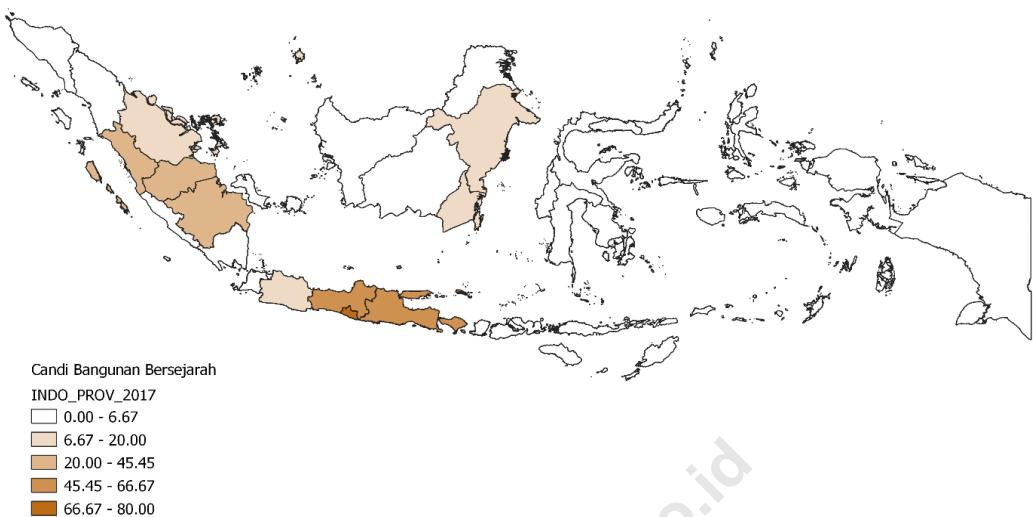
Gambar 6.8. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Gedung Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021

Gambar 6.8 menunjukkan gedung bersejarah ada di setiap provinsi di Indonesia. Bahkan, semua provinsi di Pulau Jawa memiliki persentase lebih dari 80 persen, kecuali DKI Jakarta. Kondisi ini menunjukkan gedung-gedung bersejarah Indonesia cenderung berkumpul di Pulau Jawa. Namun hal ini dapat dibuktikan dari sejarah bahwa peristiwa masa lalu seperti kerajaan dan juga gedung bersejarah pada masa penjajahan banyak tersebar di Pulau Jawa. Sebagai peninggalan sejarah, gedung-gedung sejarah dapat menjadi daya tarik wisata bahkan media edukasi bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara mengenai sejarah Indonesia. Kondisi gedung bersejarah juga perlu diperhatikan agar keberlanjutan dari wisata gedung bersejarah ini dapat terjaga dan dapat dinikmati seluruh generasi. Merujuk pada wilayah lain di Indonesia, hanya Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara yang memiliki persentase kabupaten/kota yang memiliki gedung sejarah kurang dari 25 persen.



Gambar 6.9. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Jembatan Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021

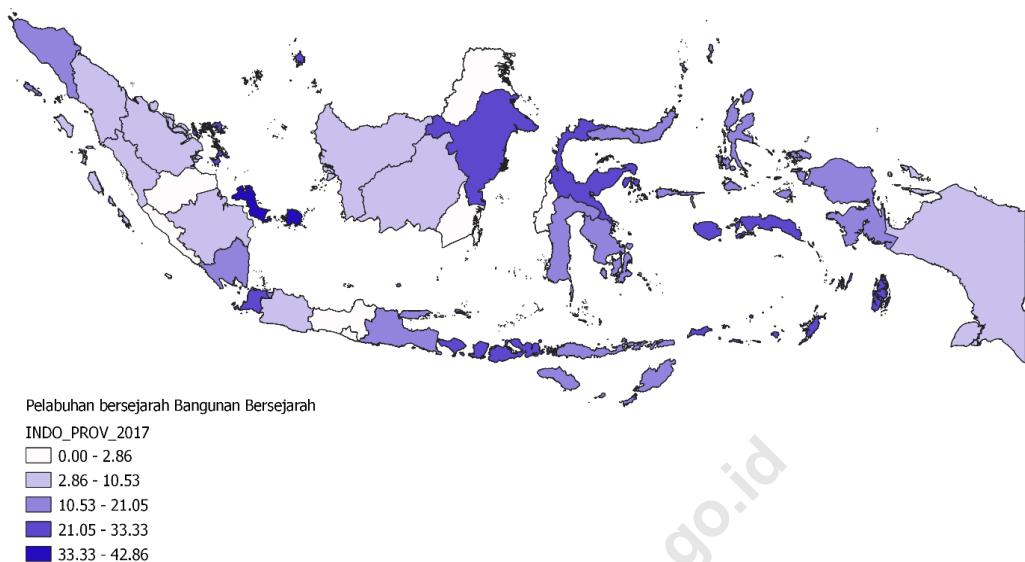
Berdasarkan hasil Pendataan Podes 2021 terlihat bahwa situs jembatan bersejarah sebarannya cenderung berada di wilayah barat Indonesia. di Pulau Jawa, misalnya, keberadaan jembatan bersejarah di Provinsi DI Yogyakarta merata di seluruh kabupaten/kotanya. Selain itu, Pulau Jawa juga menjadi wilayah dengan persentase kabupaten/kota tertinggi yang memiliki jembatan bersejarah. Di Jawa Barat, 19 dari 27 kabupaten/kotanya terdapat situs jembatan sejarah. Terkait keberadaan jembatan bersejarah, terdapat empat provinsi yang tidak memiliki jembatan bersejarah, yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua. Bangunan bersejarah seperti jembatan yang ada di Indonesia menjadi salah satu peninggalan dari pembangunan pada beberapa dekade maupun abad lalu. Keberadaan bangunan ini dapat menjadi sebuah media untuk mengenang dan mempelajari sejarah dari jembatan ini, terutama untuk generasi muda. Selain itu, berbagai perawatan juga perlu dilakukan agar kondisi jembatan tetap dalam kondisi baik dan layak untuk digunakan. Apalagi jembatan-jembatan tersebut digunakan sebagai salah satu sarana transportasi darat untuk masyarakat.



Gambar 6.10. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Candi Menurut Provinsi Tahun 2021

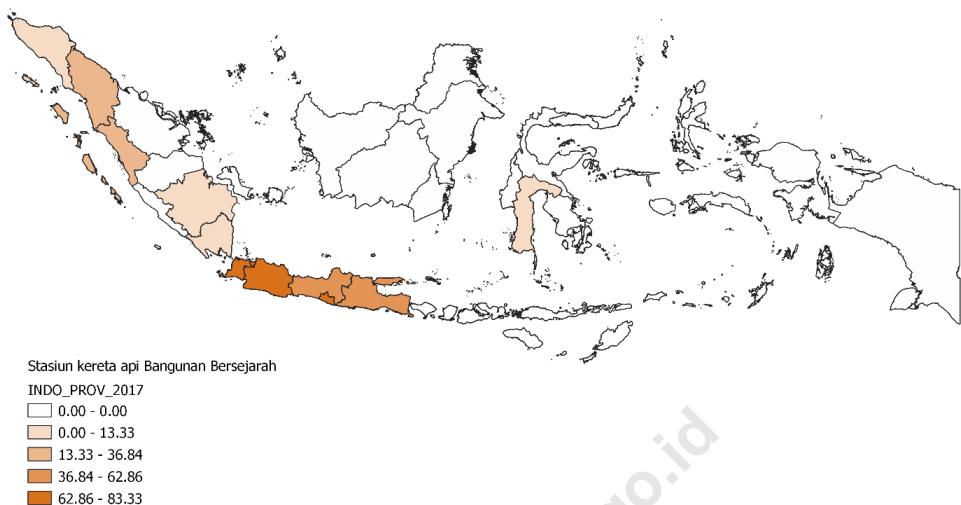
Pendataan Podes 2021 menunjukkan ada 19 provinsi yang tidak memiliki candi. Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Pada sisi sebaliknya, D.I.Yogyakarta dan Bali menjadi provinsi dengan keberadaan candi yang sebarannya paling luas. Sebanyak 80 persen wilayah kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta, dan 66,67 persen di Bali terdapat ritus candi. Selain itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan sebaran candi yang cukup banyak. Lebih dari 60 persen kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut terdapat ritus candi.

Pada masa kerajaan di Indonesia, banyak candi dibangun dan menjadi peninggalan dari beberapa kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia. Candi-candi ini menjadi salah satu peninggalan sejarah yang sangat berharga bahkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Peninggalan sejarah, dalam hal ini adalah candi juga sudah menjadi salah satu yang masuk dalam mata pelajaran siswa di Indonesia. Dengan demikian, pengetahuan mengenai sejarah beserta peninggalannya dapat dimiliki oleh seluruh generasi.



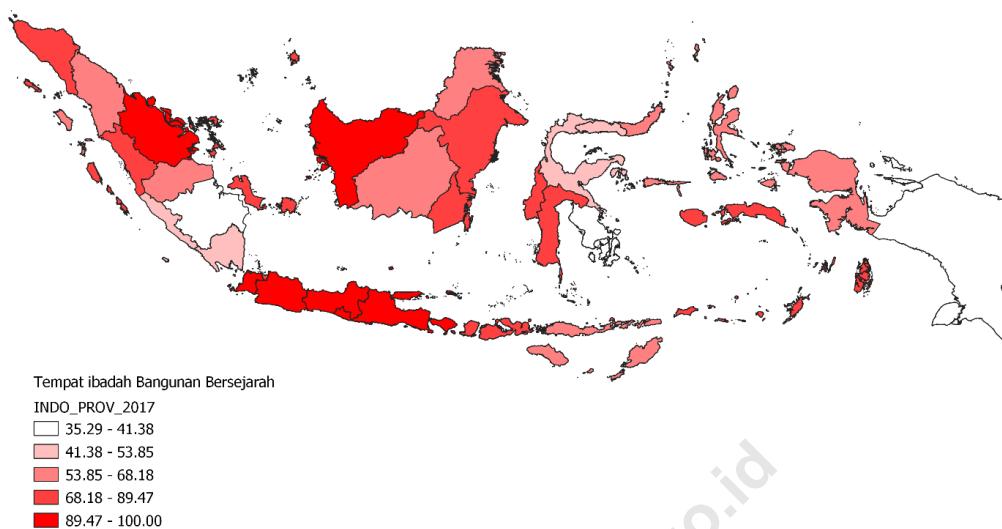
Gambar 6.11. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Pelabuhan Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021

Situs bersejarah lainnya adalah pelabuhan bersejarah. Sebagaimana tersaji pada Gambar 6.11, terdapat enam provinsi yang tidak memiliki pelabuhan bersejarah. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Jambi, Bengkulu, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat. Di sisi lain, persentase terbesar provinsi yang kabupaten/kotanya terdapat pelabuhan bersejarah dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung, di mana 3 dari 7 kabupaten/kotanya memiliki pelabuhan bersejarah. Lebih lanjut, dari peta tematik di atas (Gambar 6.11) dapat dilihat bahwa lokasi pelabuhan bersejarah Indonesia tersebar hampir di seluruh penjuru Indonesia. Hal ini mendukung julukan Indonesia sebagai negara maritim karena terdapat pelabuhan bersejarah di berbagai wilayah di Indonesia yang sejak dahulu digunakan sebagai tempat bersandar bagi para pelaut yang mengarungi perairan Indonesia.



**Gambar 6.12. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Stasiun Kereta Api Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021**

Salah satu peninggalan sejarah Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia adalah stasiun kereta api. Hasil Pendataan Podes 2021 menunjukkan ada 12 provinsi yang memiliki stasiun kereta api bersejarah. Provinsi-provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, Aceh, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa persebaran kereta api bersejarah Indonesia cenderung berada di Pulau Sumatera dan Jawa. Apalagi seluruh provinsi di Pulau Jawa memiliki statisun kereta api bersejarah. Persentase terbesar dimiliki oleh DKI Jakarta, di mana 5 dari 6 kabupaten/kotanya memiliki stasiun kereta api bersejarah. Di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta masih memanfaatkan stasiun kereta api bersejarah sebagai salah satu sarana transportasi massal utama bagi masyarakat sekitar wilayah Jabodetabek.



Gambar 6.13. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Tempat Ibadah Bersejarah Menurut Provinsi Tahun 2021

Tempat bersejarah lainnya adalah tempat ibadah. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2021, tempat ibadah bersejarah terdapat di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Barat memiliki tempat ibadah bersejarah pada seluruh kabupaten/kotanya. Fakta lain terkait tempat ibadah bersejarah adalah lebih dari 95 persen kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali terdapat tempat ibadah bersejarah. Sementara itu provinsi dengan sebaran keberadaan tempat ibadah bersejarah paling sedikit adalah Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Papua. Keberadaan tempat ibadah bersejarah di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan bahwa seluruh wilayah Indonesia memiliki tempat ibadah yang sudah berusia 50 tahun atau lebih dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama hingga kebudayaan. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, tempat ini juga harus dapat menjadi media ataupun sumber ilmu baik bagi masyarakat setempat maupun wisatawan, sehingga sejarah dari setiap tempat ibadah dapat terpatri dalam memori setiap orang yang mempelajarinya.



BAB VII

# TRANSAKSI EKONOMI



# TRANSAKSI EKONOMI



**99,81 %**

Kabupaten di Indonesia terdapat keberadaan Pasar Tradisional

**84,24 %**

Kabupaten di Indonesia terdapat keberadaan Supermarket/Swalyan/Mall



Sebanyak **965 dari 7.274** Kecamatan di Indonesia terdapat Supermarket/Swalyan/ Mall dan sebanyak **5.425 dari 7.274** Kecamatan di Indonesia terdapat Pasar Tradisional.





## 7.1. Interaksi Ekonomi

Salah satu jenis interaksi paling purba yang terjadi antar manusia, yang masih berlangsung hingga hari ini adalah interaksi yang terkait dengan pertukaran barang dan jasa. Masyarakat purba menyebut interaksi tersebut dengan sebutan barter, sedangkan masyarakat modern menyebutnya sebagai jual-beli. Sejak zaman purba kebutuhan manusia sudah beragam, dan semakin beragam di era modern ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam itu, umumnya manusia tidak mampu memproduksinya sendiri. Di zaman purba, misalnya, kelompok pemburu akan bertukar produk dengan kelompok peladang. Komoditas hasil bumi dibarter dengan komoditas hewani.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban, cara manusia berinteraksi pun terus berubah dan terus berevolusi menjadi semakin dinamis. Bahkan, kini, interaksi ekonomi tidak lagi terhalang sekat, baik sekat ruang atau pun sekat waktu. Di era digital seperti saat ini, pertukaran barang dan jasa nyaris berlangsung setiap detik selama 24 jam. Tidak heran bila kemudian bermunculan pasar virtual (*marketplace*) yang menawarkan kelebihannya masing-masing. Jargon "pembeli adalah raja" menemukan konteksnya di pasar digital. Pasar digital benar-benar memanjakan pembeli dengan beragam potongan harga (diskon) dan bebas ongkos kirim. Pertukaran barang dan jasa dengan tata cara baru telah dimulai.

Serbuhan dunia digital dengan pasar virtualnya telah benar-benar memanjakan para konsumennya. Perkembangannya pun sangat cepat. Konsep pasar digital hanya membutuhkan dua hal untuk melebarkan sayapnya, yaitu, penetrasi jaringan internet yang kuat, dan jangkauan layanan pos dan ekspedisi yang merata. Jika kedua hal tersebut sudah tersedia, maka transaksi ekonomi digital secara perlahan dapat menggantikan model transaksi ekonomi konvensional yang masih mengandalkan keberadaan pasar sebagai wahana untuk proses interaksi pertukaran barang dan jasa.

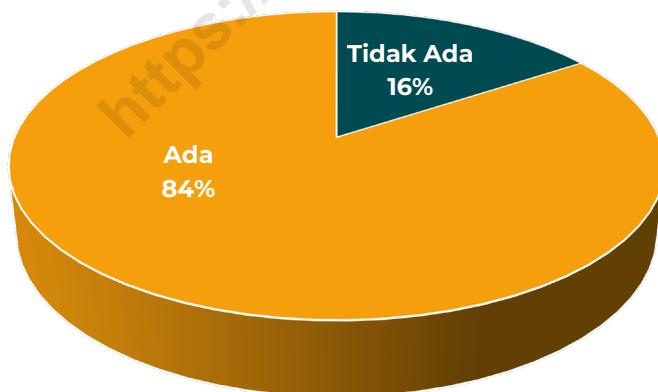
Dalam pengertian paling umum, pasar adalah tempat bertemuanya penjual dan pembeli. Di mana antara keduanya terjadi proses pertukaran barang dan jasa. Berdasarkan konsep interaksi dan model pelayanannya, pasar terpisah menjadi dua jenis, pasar modern dan pasar tradisional. Pada pasar modern, konsumen diarahkan untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Konsumen memilih dan mengambil sendiri berbagai kebutuhannya, lalu secara mandiri pula membawanya ke lokasi pembayaran. Pasar modern pada umumnya mengadopsi konsep melayani sendiri (*swalayan*). Berkebalikan dengan konsep pasar modern, pasar tradisional pada umumnya membuat batasan yang tegas antara penjual dan pembeli. Ada semacam tembok pemisah antar keduanya. Namun demikian, adanya tembok pemisah tersebut secara alamiah justru membentuk interaksi antara penjual dan pembeli. Di mana, hal yang sama sulit terbentuk di pasar modern. Interaksi antara penjual dan pembeli yang berlangsung dengan intensitas tinggi serta dalam periode waktu yang lama secara alamiah akan membentuk keakraban tertentu. Keakraban inilah yang pada akhirnya mampu menghilangkan atau setidaknya mampu mengurangi tebalnya tembok pemisah antara penjual dan pembeli. Sementara, di pasar modern tidak dibutuhkan keakraban

antara penjual dan pembeli, sebab dalam kaitannya dengan aktivitas jual-beli, tidak ada tembok pemisah antara keduanya.

## 7.2. Pasar Modern

Disrupsi terbesar di era digital terjadi pada proses pertukaran barang dan jasa. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya mensyaratkan bertemuannya antara penjual dan pembeli, kini dapat berlangsung tanpa ada aktivitas tatap muka antar keduanya. Digitalisasi yang sudah merambah di banyak bidang kehidupan tidak hanya menghilangkan banyak sekat, namun juga membuat semacam jalan pintas yang lebih cepat (*shortcut*). Digitalisasi dalam aktivitas transaksi ekonomi juga membuat proses transaksi jual beli menjadi jauh lebih transparan. Konsumen telah mengetahui harga dan spesifikasi produk tanpa perlu bertanya kepada penjual. Digitalisasi dalam transaksi ekonomi agaknya menjadi pengembangan proses ekonomi yang berlangsung di pasar modern. Utamanya terkait transparansi harga dan spesifikasi produk.

Terkait dengan pasar modern, pendataan Podes 2021 memetakan sebanyak 84,24 persen kabupaten/kota terdapat pasar modern, atau dari 514 kabupaten/kota, sebanyak 433 di antaranya terdapat pasar modern. Dalam hal ini, yang didefinisikan sebagai pasar modern adalah *supermarket*, atau swalayan, atau toserba, atau *mall*. Dalam lokus selevel kabupaten/kota, hanya 81 wilayah yang tidak terdapat pasar modern.



Gambar 7.1. Persentase Kabupaten/Kota dengan Keberadaan *Supermarket/Swalyan/Mall*

Apabila dipotret dari lokus yang lebih kecil, misalnya kecamatan, maka sebanyak 5.309 kecamatan tidak terdapat pasar modern. Di level kecamatan, pasar modern hanya terdapat di 1.965 kecamatan, atau sekitar 27,01 persen dari seluruh kecamatan yang ada. Dari perspektif kewilayahan, sebanyak 27,01 persen tersebut menyebar di seluruh wilayah dengan jumlah dan luas cakupan yang berbeda-beda (Tabel 7.1).

Sebagaimana tersaji pada Tabel 7.1, Jawa adalah wilayah dengan penetrasi pasar modern terbanyak di Indonesia. Sebanyak 895 kecamatan atau 41,71 persen kecamatan di wilayah Jawa, terdapat keberadaan pasar modern. Wilayah terbanyak kedua dengan keberadaan pasar modern di level kecamatan adalah Sumatera. Di Sumatera, dari 1.961 kecamatan yang ada, sebanyak 27,28 persen di antaranya terdapat keberadaan pasar modern.

**Tabel 7.1. Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pasar Modern**

Wilayah	Jumlah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kecamatan ada Pasar Modern	Persentase Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sumatera	10	154	1.961	535	27,28
Jawa	6	119	2.146	895	41,71
Bali dan Nusa Tenggara	3	41	489	119	24,34
Kalimantan	5	56	623	122	19,58
Sulawesi	6	81	1.026	211	20,57
Maluku dan Papua	4	63	1.029	83	8,07

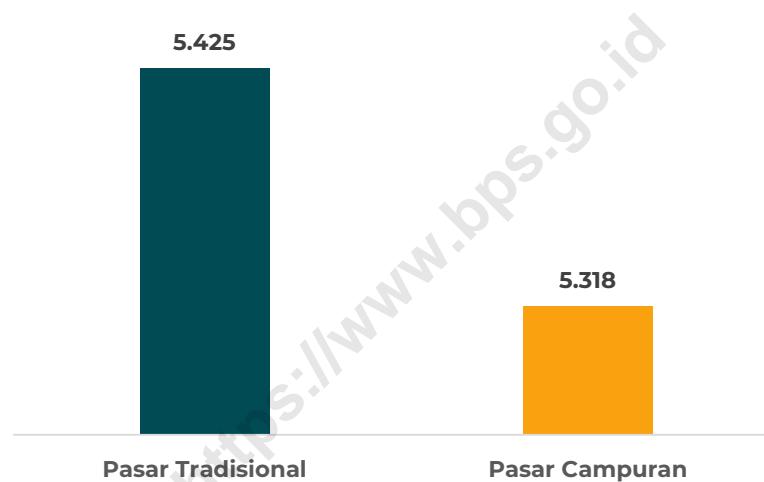
### 7.3. Pasar Tradisional

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, definisi pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, beberapa ciri pasar tradisional antara lain, pertama, pasar tradisional dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta. Kedua, ada sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Ketiga, terdapat berbagai macam jenis usaha yang menyatu pada lokasi yang sama. Keempat, sebagian besar barang dan jasa yang dijual bersifat lokal.

Merujuk pada hasil pendataan Podes 2021, keberadaan pasar tradisional telah merambah di 5.425 kecamatan di Indonesia. Artinya, dari 7.274 kecamatan, 74,58 persen di antaranya sudah terdapat pasar tradisional. Sebaran keberadaan pasar tradisional yang cukup merata itu secara makro dapat mengindikasikan bahwa proses

pertukaran barang dan jasa di level akar rumput berlangsung cukup lancar. Pasar tradisional adalah etalase geliat ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem perekonomian yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.

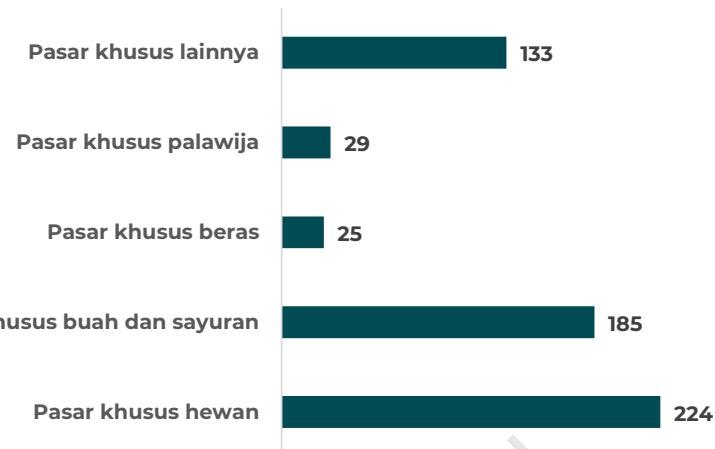
Ekonomi kerakyatan pada umumnya dilakukan oleh rakyat yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi yang diusahakan dan dikuasainya. Mereka mengharapkan bisa terpenuhi kebutuhan dasar keluarga serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekelilingnya. Konsep ini dikembangkan sebagai usaha untuk lebih mengedepankan masyarakat dalam membangun kesejahteraan dengan pemberdayaan masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan dibandingkan dengan kemakmuran perseorangan. Oleh karena itu perekonomiannya disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan



Gambar 7.2. Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pasar

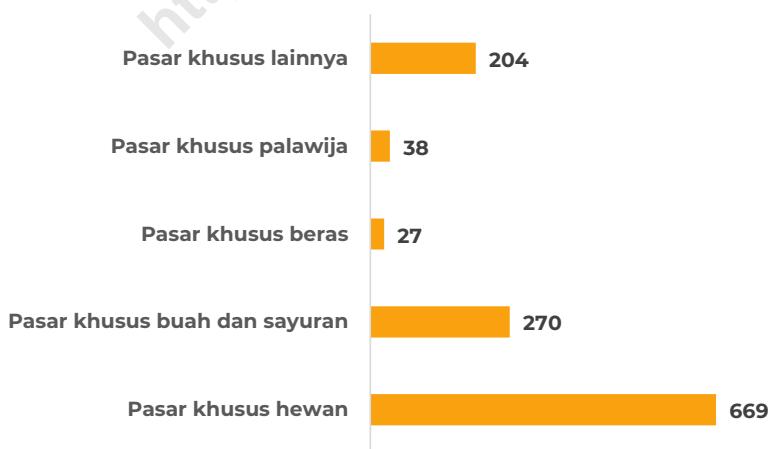
#### 7.4. Pasar Khusus

Pasar khusus adalah pasar yang memperdagangkan hanya satu jenis barang komoditas. Pasar hewan adalah jenis pasar khusus yang paling umum diketahui masyarakat. Tidak heran bila di lokus kabupaten/kota atau pun di lokus kecamatan, pasar hewan adalah jenis pasar khusus yang paling banyak terdapat di kabupaten/kota dan di kecamatan (lihat Gambar 7.3 dan Gambar 7.4).



Gambar 7.3. Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Keberadaan Pasar Khusus

Sebagaimana tersaji pada Gambar 7.3 dan Gambar 7.4 terlihat bahwa selain pasar hewan, pasar khusus lainnya yang cukup popular di kalangan masyarakat adalah pasar khusus buah dan sayuran. Pada lokus kabupaten/kota, pasar jenis ini terdapat di 185 wilayah kabupaten/kota. Sementara di lokus kecamatan pasar jenis ini terdapat di 270 kecamatan. Dari kedua gambar itu pula diketahui terdapat jenis pasar khusus yang relatif jarang terdengar, yaitu pasar khusus palawija. Pendataan Podes 2021 mencatat bahwa pasar khusus palawija terdapat di 38 kecamatan di Indonesia.



Gambar 7.4. Banyaknya Kecamatan Menurut Keberadaan Pasar Khusus





<https://www.bps.go.id>

# BAB VIII

# MITIGASI

# BENCANA



# MITIGASI BENCANA

## Bencana Alam Paling Sering Terjadi di Indonesia



**88,3%**

Banjir



**61,7%**

Tanah Longsor



**51,4%**

angin puyuh/  
puting beliung/  
topan

### Jawa Timur

wilayah Indonesia dengan total Kabupaten terbanyak mengalami kejadian bencana

**87,55%**



"**87,55%** Kabupaten/Kota di Indonesia sudah terdapat mobil pemadam kebakaran."

**22,31%**



"sebanyak **85,02%** Kabupaten/Kota di Indonesia sudah ada kegiatan Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai"



"sebanyak **85,4%** Kabupaten/Kota di Indonesia sudah terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam"



## **8.1. Kejadian Bencana**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari tujuh belas ribu pulau dan berada di garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografis, Indonesia berada di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia juga merupakan negara dengan iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, yang dicirikan dengan adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Perpaduan antara kondisi iklim demikian dan perbedaan topografi dengan ragam variasi yang cukup tinggi membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terjadi bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendefinisikan bencana sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Soeparno (2020), sebanyak 50 persen wilayah Indonesia adalah daerah yang rawan bencana, dan lebih dari 80 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah rawan bencana.

Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 berupaya memetakan kejadian bencana dan mengklasifikasikannya menjadi 11 jenis bencana yaitu, tanah longsor, banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang pasang laut, angin puyuh/puting beliung/ topan, gunung meletus, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan (lahan), dan abrasi. Selanjutnya, di level desa ditanyakan apakah dalam kurun setahun terakhir pernah terjadi bencana sebagaimana terinci pada 11 jenis bencana tersebut.

Tabel 8.1. Banyaknya Desa yang Terjadi Bencana

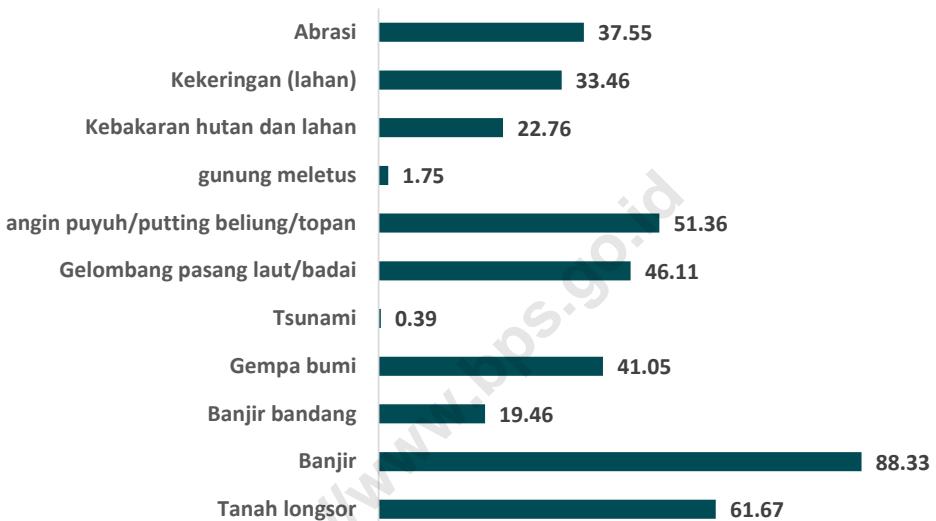
Kode Provinsi (1)	Total Desa Terkena Bencana (2)
Banjir	15.366
Gempa Bumi	8.726
Tanah Longsor	6.664
Angin Puyuh/Angin Puting Beliung/Angin Topan	5.286
Kekeringan	2.570
Gelombang Pasang Laut	1.913
Kebakaran Hutan	1.338
Abrasi	1.139
Banjir Bandang	1.093
Gunung Meletus	241
Tsunami	11

Berdasarkan pemetaan bencana tersebut, pendataan Podes mencatat bahwa sebanyak 37,37 persen atau sekitar 31.427 desa terjadi bencana. Jika lokus wilayah bencana tersebut diperluas atau diaggresasi ke level kabupaten/kota, maka bencana tersebut secara merata terjadi di seluruh kabupaten/kota, kecuali 5 kabupaten di Provinsi Papua (Mappi, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Puncak). Sementara itu, berdasarkan jenis bencananya maka banjir adalah bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia. Sebanyak 15.366 desa mengaku wilayahnya terjadi banjir pada periode 2020-2021. Bencana lain yang paling sering terjadi secara berturut-turut adalah gempa bumi (8.726 desa), tanah longsor (6.664 desa), angin puyuh/puting beliung (5.286 desa), dan bencana kekeringan (2.570 desa). Pemetaan kejadian bencana berdasarkan wilayah kabupaten/kota secara lengkap disajikan pada Lampiran 41, Lampiran 42 dan Lampiran 43.

Berdasarkan pemetaan jenis bencana pada Lampiran 41, terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten terbanyak yang mengalami kejadian bencana tanah longsor, yaitu sebanyak 29 Kabupaten/Kota. Temuan menarik lainnya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, merupakan Provinsi yang tidak ada kejadian bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten/kota nya.

Temuan lain dari pendataan Podes terkait kejadian bencana adalah adanya wilayah yang mengalami kejadian bencana yang sama secara berulang. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2021 diketahui bahwa banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dan dialami secara berulang oleh beberapa wilayah desa. Sebanyak 88,33

persen kabupaten/kota menjadi lokus dari bencana banjir berulang. Jenis bencana lain yang cenderung terjadi dan dialami secara berulang oleh desa adalah bencana tanah longsor (61,67 persen kabupaten/kota menjadi lokus bencana berulang) dan angin puyuh/puting beliung/topan (51,36 persen kabupaten/kota menjadi lokus bencana berulang). Gambaran mengenai sejauhmana lokus dari bencana berulang dapat dilihat pada Gambar 8.1.



Gambar 8.1. Persentase Total Kabupaten yang Desanya Terkena Bencana Berulang Selama Dua Tahun Terakhir di Indonesia Tahun 2020 dan 2021

## 8.2. Mitigasi Bencana

Faktor penyebab ataupun yang menjadi determinan terjadinya bencana tidak pernah bersifat tunggal. Ada beragam variabel yang saling mengait dan membentuk simpul-simpul tertentu yang kemudian memantik dan memicu terjadinya fenomena alam yang merusak, yang kemudian disebut sebagai bencana. Terjadinya bencana pun tidak serta-merta dapat dengan mudah dituding sebagai fenomena alam. Sebab, ada beberapa jenis bencana yang terjadi, yang sebetulnya cenderung lebih tepat dimaknai sebagai konsekuensi dari akumulasi perilaku buruk masyarakat dalam memperlakukan alam. Dari paradigma ini bencana dapat dimaknai sebagai implikasi dari tindakan kolektif masyarakat yang merusak keseimbangan semesta. Sehingga, bencana sebetulnya adalah mekanisme alamiah untuk menyeimbangkan semesta.

Dengan mengacu pada pengertian sebagaimana dijelaskan di atas, suatu bencana tidak serta-merta harus dimaknai sebagai sesuatu yang hanya bisa diterima tanpa bisa dihindari atau ditolak. Bila suatu bencana adalah sebuah dampak dari akumulasi perilaku buruk masyarakat, maka bila perilaku buruk tersebut diubah, secara

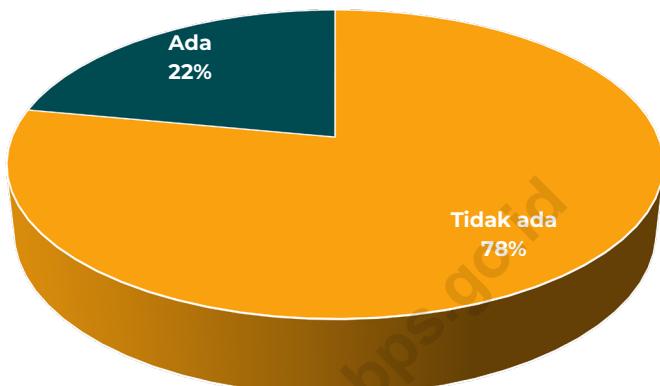
linier potensi bencana pun dapat diminimalkan. Artinya, sebagai subjek kehidupan, manusia memiliki kemampuan untuk merumuskan berbagai antisipasi. Sehingga, suatu fenomena alam yang telah diketahui berpotensi merugikan, dapat dilakukan berbagai antisipasi agar daya rusak yang kemungkinan terjadi dapat diminimalkan. Bahkan, jika mungkin, dapat ditiadakan. Dalam perspektif kebencanaan, berbagai tindakan yang dimaksudkan sebagai antisipasi guna meminimalkan dampak buruk suatu bencana, kerap disebut sebagai mitigasi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Menurut Suharno dan Darmawan (2018), mitigasi dapat dimaksudkan sebagai tindakan untuk mengurangi risiko atau pengaruh-pengaruh yang muncul akibat suatu bahaya (*hazard*) sebelum bahaya tersebut terjadi. Bagian terpenting dari mitigasi bukan hanya fokus terhadap bencana tersebut saja, melainkan juga fokus kepada pemahaman manusia terhadap sifat bencana tersebut. Kirmanto (2002:2) dalam Darsan (2019) menyatakan bahwa dalam setiap upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, perlu adanya persepsi yang sama bagi semua pihak, baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.

Sebagai upaya untuk mengurangi dampak dan meminimalkan risiko kebencanaan, pendataan Podes 2021 mencatat tiga jenis upaya mitigasi yang dilakukan di lingkup wilayah kecamatan dan wilayah kabupaten/kota. Ketiga upaya tersebut adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam, kegiatan pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai, kanal, waduk, pantai, dan kegiatan simulasi bencana alam. Kegiatan mitigasi yang dicatat adalah kegiatan yang dilakukan pada rentang waktu 3 tahun terakhir. Selain ketiga upaya tersebut, pendataan Podes juga memetakan keberadaan armada kendaraan pemadam kebakaran di level wilayah kecamatan.

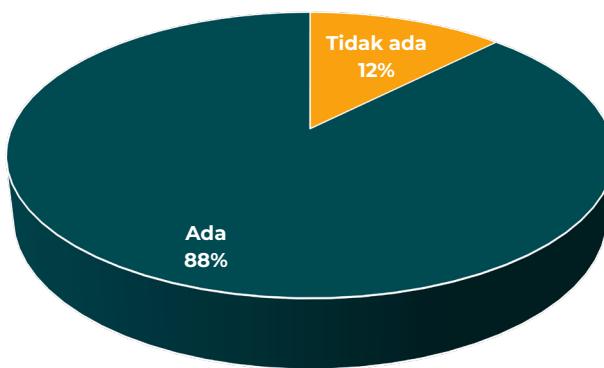
Dalam hal bencana kebakaran, pendataan Podes secara spesifik hanya memotret kejadian kebakaran hutan/lahan. Sementara kebakaran yang menimpa perumahan atau yang lainnya tidak dicatat dalam Podes. Hasil pendataan Podes 2021 mencatat sebanyak 1.338 wilayah setingkat desa/kelurahan di 117 kabupaten/kota terdampak kebakaran hutan/lahan. Cukup luasnya sebaran wilayah yang menjadi lokus bencana kebakaran tersebut tentunya membutuhkan antisipasi dan penanganan serius dari pihak berwenang. Salah satu upaya pemerintah agar penanganan bencana kebakaran terstandarisasi adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Daerah. Pada Paragraf 2, pasal 16, 17, dan 18 diatur mengenai standardisasi prasarana pemadam kebakaran, salah satunya tentang keberadaan kendaraan pemadam kebakaran di wilayah kecamatan (pasal 18, poin b) dan di wilayah desa/kelurahan (pasal 18, poin c).

Terkait keberadaan kendaraan pemadam kebakaran, pendataan Podes mencatat sebanyak 1.623 (22,31 persen) kecamatan yang tersebar di 450 (87,55 persen) kabupaten/kota memiliki fasilitas kendaraan pemadam kebakaran. Bila mengacu pada Permendagri 122 tahun 2018, upaya mitigasi terkait bencana kebakaran dengan menyediakan fasilitas kendaraan pemadam kebakaran masih sangat rendah. Dari 7.274 kecamatan di Indonesia, baru sekitar 22,31 persen wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas kendaraan pemadam kebakaran (lihat Gambar 8.2 dan Gambar 8.3).

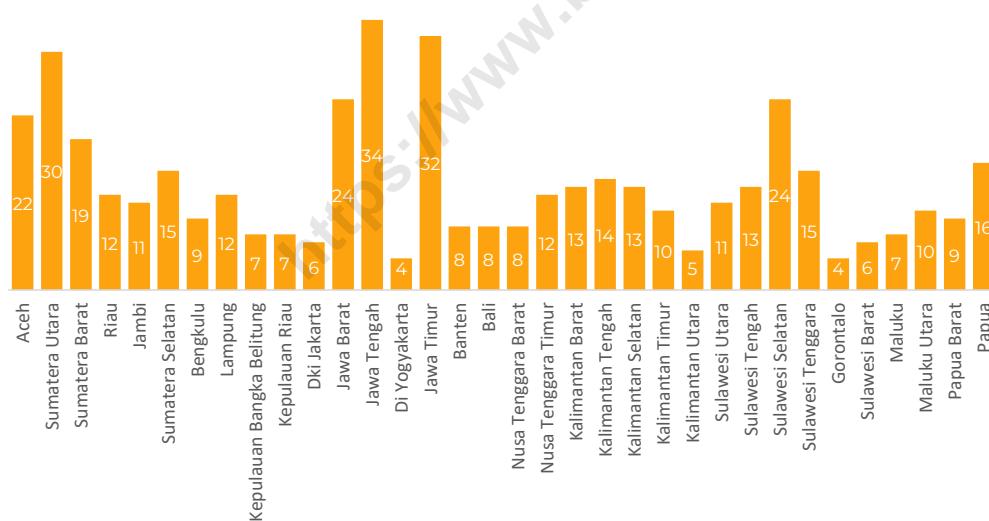


Gambar 8.2. Persentase Kecamatan di Indonesia yang Memiliki Kendaraan Pemadam Kebakaran

Sementara itu, jika dipotret dari perspektif kewilayahan yang lebih luas, terdapat 15 provinsi yang semua kabupaten/kota di bawahnya secara kumulatif (aggregat) memiliki fasilitas kendaraan pemadam kebakaran. Kelimabelas provinsi tersebut yaitu, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Di sisi sebaliknya, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan ketersediaan kendaraan pemadam kebakaran yang terendah untuk lokus wilayah kabupaten/kota. Dari 22 kabupaten/kota yang ada di Papua, hanya 12 kabupaten/kota yang tersedia fasilitas kendaraan pemadam kebakaran, atau sekitar 54,55 persen (lihat Gambar 8.4).



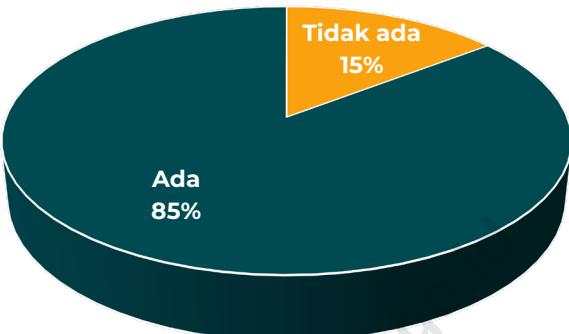
Gambar 8.3. Persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Memiliki Kendaraan Pemadam Kebakaran



Gambar 8.4. Jumlah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dengan Keberadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran

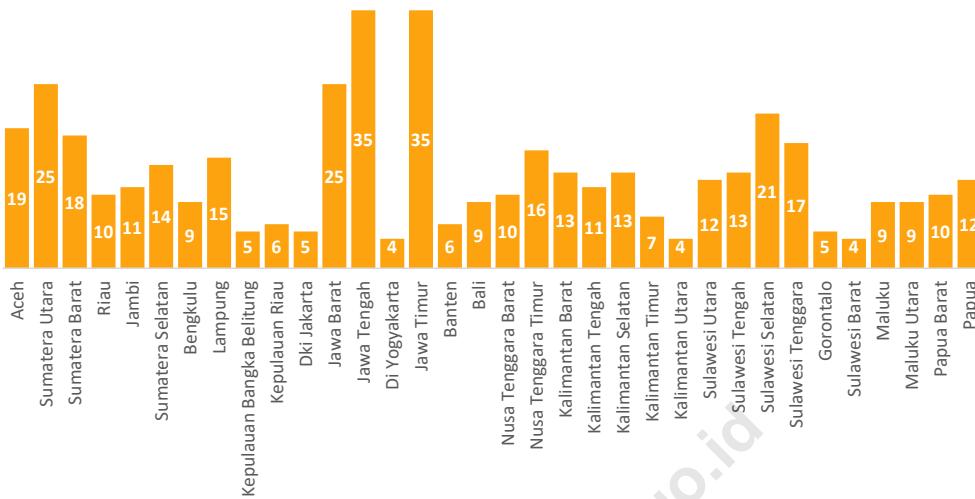
Sebagaimana telah diuraikan di atas, banjir menjadi bencana yang paling banyak terjadi di Indonesia. Pendataan Podes 2021 mencatat, sebanyak 15.366 desa terdampak banjir, dan sebanyak 1.093 desa terdampak banjir bandang. Lokasi permukiman yang secara topografi berada di dataran rendah pada umumnya menjadi faktor dominan yang kerap dianggap sebagai penyebab terjadinya bencana banjir.

Hal lain yang juga kerap dianggap sebagai penyebab banjir adalah rusaknya hutan dan terjadinya pendangkalan sungai sebagai konsekuensi dari aktivitas manusia yang kerap meletakkan faktor harmonisasi alam di urutan terbawah. Atas nama pembangunan, faktor keuntungan ekonomi cenderung dinomorsatukan ketimbang faktor keberlangsungan keanekaragaman hayati (*green economy*).



Gambar 8.5. Persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Melakukan Kegiatan Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai dalam 3 Tahun Terakhir

Dengan mengacu pada faktor utama penyebab banjir sebagaimana diuraikan di atas, maka salah satu upaya pengendalian banjir adalah dengan melakukan kegiatan pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai/kanal/waduk, dan pantai. Pada lokus wilayah setingkat kabupaten/kota, pendataan Podes 2021 mencatat sebanyak 437 (85,02 persen) kabupaten/kota mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan aktivitas rehabilitasi sungai/kanal/waduk, dan pantai. Terdapat delapan provinsi yang seluruh kabupaten/kota di bawahnya melakukan kegiatan pembuatan, perawatan, atau normalisasi sungai/kanal/waduk, dan pantai. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jambi, Lampung, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.



**Gambar 8.6. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melakukan Kegiatan Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai dalam 3 Tahun Terakhir**

Dalam bukunya yang berjudul Mitigasi Bencana Sebagai Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal, Darsan mengungkapkan temuan terkait implementasi kebijakan manajemen bencana banjir. Menurut Darsan, salah satu kelemahan penanganan banjir adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Di mana terjadi kurangnya *belief system* di antara masing-masing lembaga. Pemerintah daerah hanya bertindak reaktif ketika bencana terjadi dan pasca bencana. Sedangkan masyarakat kurang patuh terhadap pemerintah. Selain itu, kepedulian masyarakat terhadap kondisi kampung juga sangat rendah. Misalnya, mereka membuang sampah di saluran got dan sungai yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bencana banjir (Warsilah, Novianti, Syahid, Wardiat, & Nadila, 2018).

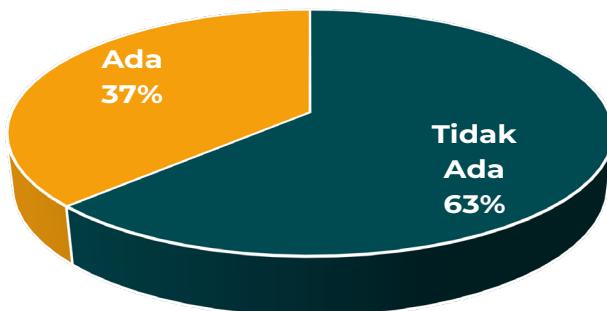
### 8.3. Simulasi dan Pendidikan Kebencanaan

Sebagai negara kepulauan dengan endapan vulkanik yang membentang sepanjang wilayahnya, membuat Indonesia diberkahi tanah yang subur serta potensi material tambang yang sangat besar. Selain membawa implikasi positif, struktur geografis yang dimiliki Indonesia ini juga memendam hamparan cincin api yang membawa kerentanan terjadinya potensi bencana. Mulai dari gempa bumi, pergeseran tanah (liquifikasi, tanah longsor), gunung meletus, hingga tsunami. Sebagaimana telah diuraikan di atas, selain 5 kabupaten (Mappi, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Puncak) di Provinsi Papua, seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia pernah mengalami bencana alam.

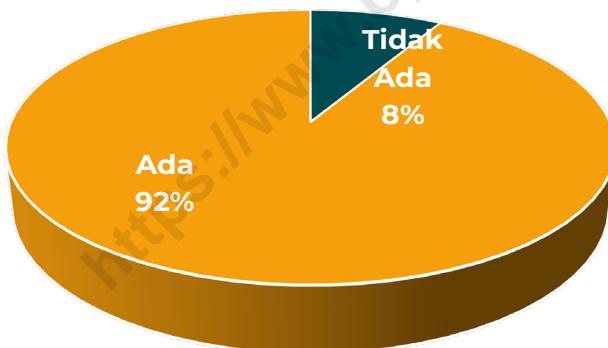
Dengan potensi kerentanan bencana yang cukup tinggi tersebut, sudah sepantasnya Indonesia memiliki kurikulum kebencanaan yang harus sudah diajarkan sejak usia pra-sekolah. Sayangnya, di kalangan warga negara, kesadaran akan pentingnya kurikulum kebencanaan masih sangat rendah. Pengenalan warga negara terhadap karakter dari bumi yang dipijaknya serta lingkungan yang menjadi ruang hidupnya tidak pernah dipandang sebagai sesuatu yang penting. Sehingga tidak perlu dipelajari, bahkan sekadar untuk sedikit mencari tahu. Padahal, bumi di mana kita berpijak selama ini sangat mungkin menyimpan bukan hanya potensi yang merugikan, bahkan juga potensi yang mengancam kehidupan manusia.

Salah satu upaya pengenalan terhadap risiko bila terjadi bencana adalah dengan melakukan kegiatan simulasi bencana alam. Bukan hanya sekadar pengenalan risiko, kegiatan simulasi bencana alam juga akan memberikan nilai belajar (pengalaman) yang tertanam dalam alam bawah sadar tentang apa yang harus dilakukan bila bencana yang sesungguhnya suatu saat benar-benar terjadi. Manfaat lain dari kegiatan simulasi bencana yang diselenggarakan dengan rutin adalah terstimulasinya pikiran dan terlatihnya reflek untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Sehingga, ketika bencana benar-benar terjadi, bukan kepanikan yang ditonjolkan, namun ketertiban dalam upaya mencari keselamatan bersama.

Jika dipotret dari lokus di level kabupaten/kota, hanya 43 wilayah (8,37 persen) kabupaten/kota yang tercatat tidak ada kegiatan simulasi bencana selama periode 2020-2021. Dari sudut pandang ini, potret tentang kesadaran terhadap kebencanaan agaknya sudah cukup tinggi. Namun, jika lokus pengamatan dipersempit hingga ke level kecamatan, maka terlihat bahwa baru sekitar 37 persen wilayah kecamatan yang melakukan kegiatan simulasi bencana. Artinya, terdapat 4.566 kecamatan yang selama periode 2020-2021 tidak pernah melakukan kegiatan simulasi bencana (Gambar 8.7 dan Gambar 8.8)



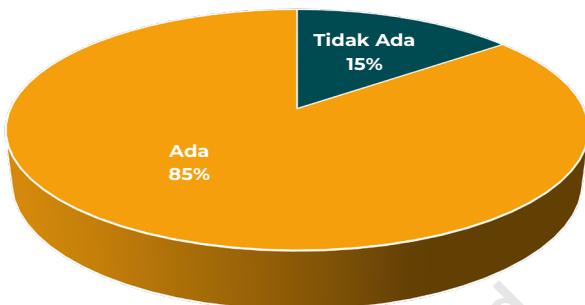
Gambar 8.7. Persentase Kecamatan yang Melakukan Kegiatan Simulasi Bencana



Gambar 8.8. Persentase Kabupaten/Kota yang Melakukan Kegiatan Simulasi Bencana

Kegiatan simulasi bencana pada umumnya menyasar kelompok atau komunitas masyarakat, baik itu kelompok masyarakat umum, atau kelompok pelajar, mulai dari PAUD hingga kelompok mahasiswa. Tujuan dari kegiatan simulasi bencana adalah meminimalkan korban dari kelompok masyarakat. Sementara itu, kegiatan mitigasi kebencanaan di level petugas adalah dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam. Pelatihan kebencanaan merupakan hal yang sangat penting karena dari kegiatan ini didapatkan kemampuan yang tinggi dari semua personel di berbagai bidang yang akan terlibat dalam penanggulangan bencana (Pusponegoro & Sujudi, 2016). Pelatihan dapat difokuskan pada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana, yang pada akhirnya diharapkan akan terbentuk kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana. Terkait hal tersebut, sepanjang

2019-2021 sebanyak 439 kabupaten/kota (85 persen) tercatat pernah melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana alam.



Gambar 8.9. Persentase Kabupaten/Kota di Indonesia yang Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam dalam 3 Tahun Terakhir





# **BAB IX**

# **PENUTUP**



Wabah covid-19 yang menerpa dunia pada periode 2019-2022 agaknya menjadi semacam kotak pandora yang membuat dunia tiba-tiba menggeliat. Disrupsi nyaris menghampiri seluruh lini kehidupan. Ia mengubah banyak hal, mulai dari tata kelola, cara pandang, cara bekerja, cara berinteraksi, hingga cara kita dalam merumuskan konsepsi atas sebuah realitas. Bahkan, hingga hari ini, geliat disrupsi itu belum berhenti. Dunia masih terus memberi berbagai kejutan. Dunia masih mengayunkan *equilibrium*, mencari titik keseimbangan barunya.

Desakan perubahan juga tak luput melanda tata kelola dan kebutuhan data statistik. Era digital telah membelaikan mata banyak pihak mengenai kekuatan data. Profesi data *scientist* mendadak menjadi primadona dan diprediksi sebagai profesi penting di masa depan. Algoritma dan data tiba-tiba menjadi kata yang diperbincangkan di banyak *platform* media sosial. Banyak orang mendadak peduli terhadap isu perlindungan data pribadi. Perbincangan tentang data tidak lagi terdengar samar di bilik-bilik penelitian. Kini, narasi tentang data mulai melengking nyaring di berbagai ruang publik. Panca indera masyarakat mulai familiar dengan data dan menjadikannya sebagai menu sehari-hari.

Seluruh fenomena tersebut baru sebagian kecil dari disrupsi yang melanda dunia. Sebagai instansi penyedia data, fenomena disrupsi ini tentu saja menjadi tantangan bagi Badan Pusat Statistik (BPS). Tantangan tersebut bukan lagi bicara tentang kualitas, tetapi telah merambah pada kebutuhan terhadap data yang lebih variatif, serta data yang dapat menjadi representasi dari suatu fenomena di lokus kecil. Berbagai data aggregat pada level provinsi atau pun kabupaten/kota tidak lagi mampu menghapus dahaga para pengguna data dalam melihat potret sosial ekonomi masyarakat. Berbagai pengukuran indikator pun tidak lagi mampu memuaskan keingintahuan pengguna data atas berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pengguna data mengharapkan ada sudut pandang baru yang dapat membantu mereka dalam menerjemahkan suatu fenomena.

Publikasi ini adalah bagian kecil dari upaya tersebut. Publikasi ini adalah upaya rintisan untuk memperkaya khazanah data kewilayahan yang selama ini hanya tersedia pada level desa/kelurahan. Sebagian besar konten data pada publikasi ini merujuk pada hasil pendataan Podes 2021. Tepatnya, dari kuesioner PODES2021-KEC dan kuesioner PODES2021-KAB/KOTA. Pemanfaatan data yang berasal dari kedua kuesioner tersebut adalah kali pertama yang didiseminasi secara resmi dalam bentuk publikasi. Data-data tersebut dinarasikan secara tematik dengan harapan hal tersebut dapat memantik keingintahuan pengguna data untuk mengelaborasi lebih jauh, menyandingkannya dengan fenomena empirik tertentu, atau memosisikannya menjadi determinan dari data lainnya untuk memperkaya sebuah analisis.

Tema transportasi, misalnya, data keberadaan SPBU mungkin dapat menjadi informasi yang menarik jika diproporsikan dengan sebaran kendaraan bermotor, atau keberadaan dealer resmi kendaraan bermotor. Data sungai yang masih dilayari, boleh jadi dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun destinasi perahu wisata sungai. Contoh lainnya adalah data sebaran kawasan industri atau data pemetaan pasar. Kedua

data tersebut boleh jadi akan membuat penjelasan mengenai PDRB menjadi jauh lebih menarik dan realistik.

Selain data-data yang telah disajikan pada publikasi ini, tentu saja masih banyak data lain yang mungkin bisa dielaborasi dan dimanfaatkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan. Misalnya, data mengenai keberadaan ruang penanganan khusus (RPK) kepolisian, data rumah singgah, data rumah aman, data keberadaan bintara pembina desa (Babinsa), data Babinkamtibmas, dan data keberadaan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan.

Era digital yang telah menyapa kita saat ini makin menegaskan bahwa data adalah tambang emas yang sesungguhnya. Siapa pun yang menguasai dan memanfaatkan data akan menjadi "penguasa" yang sesungguhnya. Aktivitas kecil pembelian produk tertentu yang dilakukan seseorang dari ujung kulon, misalnya, jika telah membentuk *array* yang berisi jutaan transaksi yang sama, maka aggregasi dari data tersebut dapat menjelaskan perilaku konsumen dengan banyak karakteristik yang menyertainya. Data semacam ini tentu saja sangat berharga bagi para pelaku usaha. Contoh lainnya adalah data mobilitas penduduk Jabodetabek yang dapat digunakan sebagai dasar dari kebijakan di bidang transportasi.

Kesadaran akan pentingnya data serta kemampuan teknis dalam membaca data agaknya perlu menjadi kompetensi dasar yang dimiliki setiap individu. Disrupsi yang masih akan terus terjadi tentu saja tak mungkin bisa dihentikan. Perubahan adalah realitas yang selalu akan terjadi, dan setiap zaman akan memiliki realitasnya masing-masing. Disrupsi tidak akan menunggu semua orang siap. Ia akan terus melaju, bahkan tanpa perlu menyapa. Tetapi sebetulnya setiap gelagat perubahan dapat dikenali gejalanya dari data runtut waktu (series) atau dari karakteristik hasil aggregasi. Oleh karena itu, sensitisme dan kapabilitas terhadap pemaknaan data adalah senjata yang sempurna untuk menyongsong disrupsi.



<https://www.bps.go.id>

# DAFTAR PUSTAKA



## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Nurul Subhani (2012). *Penataan Permukiman Di Atas Air Kelurahan Tanjung Laut Indah Kota Bontang*. Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/141655/>
- BNPB. (2023, November 7). Retrieved from <https://www.bnppb.go.id/definisi-bencana>
- Darsan. (2019). *Mitigasi Bencana sebagai Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Bildung.
- Irsyad, M., Hamid, D., & Mawardi, M. K. (2017). *Implementasi Strategi Pengembangan Wisata Kebun Binatang Surabaya sebagai Destinasi Wisata di Kota Surabaya*. Brawijaya University.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Ditjen Bina Adwil Dukung Implementasi Perwujudan Sinkronisasi Data Satu Pulau Indonesia*. Diambil dari [https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/ditjen-bina-adwil-dukung-implementasi-perwujudan-sinkronisasi-data-satu-pulau-indonesia#:~:text=Wardani%20melaporkan%20%20%20%20%20%20%9C Berdasarkan%20hasil%20pemutakhiran,Administrasi%20dan%20Pulau%20tahun%202021%E2%80%9D](https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/ditjen-bina-adwil-dukung-implementasi-perwujudan-sinkronisasi-data-satu-pulau-indonesia#:~:text=Wardani%20melaporkan%20%20%20%20%20%9C Berdasarkan%20hasil%20pemutakhiran,Administrasi%20dan%20Pulau%20tahun%202021%E2%80%9D).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2012). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Jakarta.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021). *7 Desa Wisata yang Mengusung Konsep Sustainable Tourism*. Diakses dari <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7-Desa-Wisata-yang-Mengusung-Konsep-Sustainable-Tourism>.
- Lasabuda, Ridwan. (2013). *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/platax/article/view/1251/1019>
- Limanseto, Haryo. (2021, Desember 8). *Pembangunan Kepariwisataan Melalui Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi*. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3520/pembangunan-kepariwisataan-melalui-pengembangan-desa-wisata-untuk-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi>.
- Purwowidhu, CS. (2023, Mei 16). *Kian Melesat di 2023, Pariwisata Indonesia Bersiap Menuju Level Prapandemi*. Diakses dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>

- PUSHIDROSAL. (2018). *Data Kelautan yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan*. Diambil dari <https://www.pushidrosal.id/berita/5256/DATA-KELAUTAN-YANG-MENJADI-RUJUKAN-NASIONAL--DILUNCURKAN/#:~:text=Luas%20perairan%20Indonesia%206.400.000,Indonesia%2C%20sesuai%20dengan%20UU%20no>.
- Pusponegoro, A. D., & Sujudi, A. (2016). *Kegawatdaruratan dan Bencana*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Puturuju, F. (2015). *Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soeparno, K. d. (2020). *Ragam Ulas Kebencanaan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Suharno, & Darmawan, I. B. (2018). *Mitigasi Bencana Alam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- United Nations Environment Programme. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers*. [www.unep.org/greenconomy](http://www.unep.org/greenconomy)
- Warsilah, H., Novianti, K., Syahid, C. N., Wardiat, D., & Nadila, S. M. (2018). *Ketahanan Sosial dalam Kota Tangguh Bencana: Kajian Adaptasi Masyarakat terhadap Bencana Perubahan Iklim dan Banjir Rob di Kota Pesisir Semarang, Jawa Tengah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



# LAMPIRAN

http://www.bps.go.id



**Lampiran 1. Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Sungai yang Digunakan untuk Transportasi Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Keberadaan Sungai yang Digunakan untuk Transportasi	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	3	13,04
12	Sumatera Utara	33	10	30,30
13	Sumatera Barat	19	1	5,26
14	Riau	12	8	66,67
15	Jambi	11	8	72,73
16	Sumatera Selatan	17	8	47,06
17	Bengkulu	10	0	0,00
18	Lampung	15	5	33,33
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,43
21	Kepulauan Riau	7	1	14,29
31	DKI Jakarta	6	1	16,67
32	Jawa Barat	27	3	11,11
33	Jawa Tengah	35	5	14,29
34	DI Yogyakarta	5	0	0,00
35	Jawa Timur	38	6	15,79
36	Banten	8	1	12,50
51	Bali	9	0	0,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,55
61	Kalimantan Barat	14	13	92,86
62	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
63	Kalimantan Selatan	13	7	53,85
64	Kalimantan Timur	10	9	90,00
65	Kalimantan Utara	5	4	80,00
71	Sulawesi Utara	15	1	6,67
72	Sulawesi Tengah	13	2	15,38
73	Sulawesi Selatan	24	11	45,83
74	Sulawesi Tenggara	17	2	11,76
75	Gorontalo	6	1	16,67
76	Sulawesi Barat	6	1	16,67
81	Maluku	11	0	0,00
82	Maluku Utara	10	0	0,00
91	Papua Barat	13	5	38,46
94	Papua	29	16	55,17

**Lampiran 2. Jumlah dan Persentase Kabupaten/kota Terdapat Lapangan Terbang Perintis Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Keberadaan Lapangan Terbang Perintis	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	7	30,43
12	Sumatera Utara	33	2	6,06
13	Sumatera Barat	19	2	10,53
14	Riau	12	2	16,67
15	Jambi	11	1	9,09
16	Sumatera Selatan	17	2	11,76
17	Bengkulu	10	2	20,00
18	Lampung	15	0	0,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	0,00
21	Kepulauan Riau	7	2	28,57
31	DKI Jakarta	6	0	0,00
32	Jawa Barat	27	2	7,41
33	Jawa Tengah	35	2	5,71
34	DI Yogyakarta	5	0	0,00
35	Jawa Timur	38	3	7,89
36	Banten	8	0	0,00
51	Bali	9	0	0,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	4	18,00
61	Kalimantan Barat	14	1	7,14
62	Kalimantan Tengah	14	5	36,00
63	Kalimantan Selatan	13	2	15,38
64	Kalimantan Timur	10	2	20,00
65	Kalimantan Utara	5	2	40,00
71	Sulawesi Utara	15	0	0,00
72	Sulawesi Tengah	13	0	0,00
73	Sulawesi Selatan	24	2	8,33
74	Sulawesi Tenggara	17	0	0,00
75	Gorontalo	6	0	0,00
76	Sulawesi Barat	6	0	0,00
81	Maluku	11	3	27,27
82	Maluku Utara	10	2	20,00
91	Papua Barat	13	7	53,85
94	Papua	29	25	86,21

**Lampiran 3. Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Terminal Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Keberadaan terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	22	95,65
12	Sumatera Utara	33	26	78,79
13	Sumatera Barat	19	15	78,95
14	Riau	12	12	100,00
15	Jambi	11	9	81,82
16	Sumatera Selatan	17	16	94,12
17	Bengkulu	10	5	50,00
18	Lampung	15	12	80,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,71
21	Kepulauan Riau	7	5	71,43
31	DKI Jakarta	6	6	100,00
32	Jawa Barat	27	27	100,00
33	Jawa Tengah	35	35	100,00
34	DI Yogyakarta	5	5	100,00
35	Jawa Timur	38	38	100,00
36	Banten	8	8	100,00
51	Bali	9	8	88,89
52	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	20	90,91
61	Kalimantan Barat	14	14	100,00
62	Kalimantan Tengah	14	6	42,86
63	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
64	Kalimantan Timur	10	8	80,00
65	Kalimantan Utara	5	2	40,00
71	Sulawesi Utara	15	12	80,00
72	Sulawesi Tengah	13	12	92,31
73	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
74	Sulawesi Tenggara	17	14	82,35
75	Gorontalo	6	5	83,33
76	Sulawesi Barat	6	5	83,33
81	Maluku	11	9	81,82
82	Maluku Utara	10	8	80,00
91	Papua Barat	13	11	84,62
94	Papua	29	15	51,72

**Lampiran 4. Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	23	100,00
12	Sumatera Utara	33	33	100,00
13	Sumatera Barat	19	19	100,00
14	Riau	12	12	100,00
15	Jambi	11	11	100,00
16	Sumatera Selatan	17	17	100,00
17	Bengkulu	10	10	100,00
18	Lampung	15	15	100,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
21	Kepulauan Riau	7	6	85,71
31	DKI Jakarta	6	5	83,33
32	Jawa Barat	27	27	100,00
33	Jawa Tengah	35	35	100,00
34	DI Yogyakarta	5	5	100,00
35	Jawa Timur	38	38	100,00
36	Banten	8	8	100,00
51	Bali	9	9	100,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00
61	Kalimantan Barat	14	14	100,00
62	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
63	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
64	Kalimantan Timur	10	10	100,00
65	Kalimantan Utara	5	5	100,00
71	Sulawesi Utara	15	15	100,00
72	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
73	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
74	Sulawesi Tenggara	17	16	94,12
75	Gorontalo	6	6	100,00
76	Sulawesi Barat	6	6	100,00
81	Maluku	11	11	100,00
82	Maluku Utara	10	10	100,00
91	Papua Barat	13	12	92,31
94	Papua	29	21	72,41

**Lampiran 5. Jumlah dan Persentase Kecamatan Terdapat Terminal Penumpang Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Keberadaan terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	78	26,99
12	Sumatera Utara	455	63	13,85
13	Sumatera Barat	179	34	18,99
14	Riau	172	26	15,12
15	Jambi	144	21	14,58
16	Sumatera Selatan	241	51	21,16
17	Bengkulu	129	10	7,75
18	Lampung	229	32	13,97
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	12	25,53
21	Kepulauan Riau	76	10	13,16
31	DKI Jakarta	44	25	56,82
32	Jawa Barat	627	213	33,97
33	Jawa Tengah	576	210	36,46
34	DI Yogyakarta	78	23	29,49
35	Jawa Timur	666	173	25,98
36	Banten	155	49	31,61
51	Bali	57	21	36,84
52	Nusa Tenggara Barat	117	31	26,50
53	Nusa Tenggara Timur	315	52	16,51
61	Kalimantan Barat	174	38	21,84
62	Kalimantan Tengah	136	10	7,35
63	Kalimantan Selatan	155	45	29,03
64	Kalimantan Timur	103	20	19,42
65	Kalimantan Utara	55	2	3,64
71	Sulawesi Utara	171	50	29,24
72	Sulawesi Tengah	176	35	19,89
73	Sulawesi Selatan	311	57	18,33
74	Sulawesi Tenggara	222	21	9,46
75	Gorontalo	77	13	16,88
76	Sulawesi Barat	69	15	21,74
81	Maluku	118	33	27,97
82	Maluku Utara	117	21	17,95
91	Papua Barat	218	24	11,01
94	Papua	576	81	14,06

**Lampiran 6. Jumlah dan Persentase Kecamatan Terdapat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	110	38,06
12	Sumatera Utara	455	198	43,52
13	Sumatera Barat	179	121	67,60
14	Riau	172	98	56,98
15	Jambi	144	71	49,31
16	Sumatera Selatan	241	112	46,47
17	Bengkulu	129	58	44,96
18	Lampung	229	144	62,88
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	35	74,47
21	Kepulauan Riau	76	26	34,21
31	DKI Jakarta	44	42	95,45
32	Jawa Barat	627	439	70,02
33	Jawa Tengah	576	462	80,21
34	DI Yogyakarta	78	51	65,38
35	Jawa Timur	666	497	74,62
36	Banten	155	121	78,06
51	Bali	57	52	91,23
52	Nusa Tenggara Barat	117	75	64,10
53	Nusa Tenggara Timur	315	67	21,27
61	Kalimantan Barat	174	105	60,34
62	Kalimantan Tengah	136	64	47,06
63	Kalimantan Selatan	155	96	61,94
64	Kalimantan Timur	103	74	71,84
65	Kalimantan Utara	55	25	45,45
71	Sulawesi Utara	171	66	38,60
72	Sulawesi Tengah	176	80	45,45
73	Sulawesi Selatan	311	159	51,13
74	Sulawesi Tenggara	222	79	35,59
75	Gorontalo	77	25	32,47
76	Sulawesi Barat	69	25	36,23
81	Maluku	118	38	32,20
82	Maluku Utara	117	41	35,04
91	Papua Barat	218	39	17,89
94	Papua	576	64	11,11

**Lampiran 7. Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Minyak Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Keberadaan Pertambangan Minyak	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	1	4,35
12	Sumatera Utara	33	0	0,00
13	Sumatera Barat	19	0	0,00
14	Riau	12	6	50,00
15	Jambi	11	7	63,64
16	Sumatera Selatan	17	8	47,06
17	Bengkulu	10	0	0,00
18	Lampung	15	1	6,67
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	0,00
21	Kepulauan Riau	7	1	14,29
31	DKI Jakarta	6	1	16,67
32	Jawa Barat	27	3	11,11
33	Jawa Tengah	35	1	2,86
34	DI Yogyakarta	5	0	0,00
35	Jawa Timur	38	6	15,79
36	Banten	8	0	0,00
51	Bali	9	0	0,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,55
61	Kalimantan Barat	14	0	0,00
62	Kalimantan Tengah	14	1	7,14
63	Kalimantan Selatan	13	1	7,69
64	Kalimantan Timur	10	5	50,00
65	Kalimantan Utara	5	4	80,00
71	Sulawesi Utara	15	0	0,00
72	Sulawesi Tengah	13	0	0,00
73	Sulawesi Selatan	24	0	0,00
74	Sulawesi Tenggara	17	0	0,00
75	Gorontalo	6	0	0,00
76	Sulawesi Barat	6	0	0,00
81	Maluku	11	1	9,09
82	Maluku Utara	10	0	0,00
91	Papua Barat	13	3	23,08
94	Papua	29	0	0,00

**Lampiran 8. Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Gas Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Keberadaan Pertambangan Gas	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	3	13,04
12	Sumatera Utara	33	0	0,00
13	Sumatera Barat	19	0	0,00
14	Riau	12	3	25,00
15	Jambi	11	4	36,36
16	Sumatera Selatan	17	8	47,06
17	Bengkulu	10	0	0,00
18	Lampung	15	1	6,67
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	0,00
21	Kepulauan Riau	7	1	14,29
31	DKI Jakarta	6	1	16,67
32	Jawa Barat	27	4	14,81
33	Jawa Tengah	35	2	5,71
34	DI Yogyakarta	5	0	0,00
35	Jawa Timur	38	7	18,42
36	Banten	8	0	0,00
51	Bali	9	0	0,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	0	0,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,55
61	Kalimantan Barat	14	0	0,00
62	Kalimantan Tengah	14	1	7,14
63	Kalimantan Selatan	13	1	7,69
64	Kalimantan Timur	10	2	20,00
65	Kalimantan Utara	5	3	60,00
71	Sulawesi Utara	15	1	6,67
72	Sulawesi Tengah	13	1	7,69
73	Sulawesi Selatan	24	1	4,17
74	Sulawesi Tenggara	17	0	0,00
75	Gorontalo	6	0	0,00
76	Sulawesi Barat	6	0	0,00
81	Maluku	11	0	0,00
82	Maluku Utara	10	0	0,00
91	Papua Barat	13	2	15,38
94	Papua	29	0	0,00

**Lampiran 9. Jumlah dan Persentase Kabupaten/Kota Terdapat Pertambangan Nonmigas Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Keberadaan Pertambangan Nonmigas	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	10	43,48
12	Sumatera Utara	33	9	27,28
13	Sumatera Barat	19	8	42,11
14	Riau	12	5	41,67
15	Jambi	11	6	54,55
16	Sumatera Selatan	17	10	58,82
17	Bengkulu	10	7	70,00
18	Lampung	15	10	66,67
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,71
21	Kepulauan Riau	7	3	42,86
31	DKI Jakarta	6	2	33,33
32	Jawa Barat	27	12	44,44
33	Jawa Tengah	35	11	31,43
34	DI Yogyakarta	5	2	40,00
35	Jawa Timur	38	16	42,11
36	Banten	8	3	37,50
51	Bali	9	2	22,22
52	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,27
61	Kalimantan Barat	14	12	85,71
62	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
63	Kalimantan Selatan	13	10	76,92
64	Kalimantan Timur	10	9	90,00
65	Kalimantan Utara	5	4	80,00
71	Sulawesi Utara	15	13	86,67
72	Sulawesi Tengah	13	10	76,92
73	Sulawesi Selatan	24	13	54,17
74	Sulawesi Tenggara	17	8	47,06
75	Gorontalo	6	5	83,33
76	Sulawesi Barat	6	4	66,67
81	Maluku	11	5	45,45
82	Maluku Utara	10	6	60,00
91	Papua Barat	13	4	30,77
94	Papua	29	12	41,38

**Lampiran 10. Jumlah Kabupaten/Kota Terdapat Kawasan Industri, Pergudangan Dan PJTKI Menurut Provinsi Tahun 2021**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/ Kota	Keberadaan Pertambangan Gas		
			Kawasan Industri	Pergudangan	PJTKI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	23	4	8	1
12	Sumatera Utara	33	3	7	8
13	Sumatera Barat	19	4	6	3
14	Riau	12	3	4	1
15	Jambi	11	2	3	5
16	Sumatera Selatan	17	5	7	9
17	Bengkulu	10	5	2	4
18	Lampung	15	4	1	10
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	5	0
21	Kepulauan Riau	7	3	5	2
31	DKI Jakarta	6	2	2	2
32	Jawa Barat	27	11	14	18
33	Jawa Tengah	35	7	14	23
34	DI Yogyakarta	5	1	1	3
35	Jawa Timur	38	9	11	21
36	Banten	8	5	5	6
51	Bali	9	2	4	7
52	Nusa Tenggara Barat	10	3	3	10
53	Nusa Tenggara Timur	22	5	9	16
61	Kalimantan Barat	14	4	5	4
62	Kalimantan Tengah	14	5	4	0
63	Kalimantan Selatan	13	4	6	2
64	Kalimantan Timur	10	5	2	0
65	Kalimantan Utara	5	1	1	1
71	Sulawesi Utara	15	2	3	5
72	Sulawesi Tengah	13	3	5	2
73	Sulawesi Selatan	24	7	11	6
74	Sulawesi Tenggara	17	2	3	2
75	Gorontalo	6	0	2	0
76	Sulawesi Barat	6	0	1	1
81	Maluku	11	1	4	3
82	Maluku Utara	10	1	8	0
91	Papua Barat	13	2	1	1
94	Papua	29	2	5	0

## Lampiran 11. Banyaknya Kecamatan yang Ditetapkan Sebagai Kecamatan Pesisir

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Ditetapkan Sebagai Kecamatan Pesisir	
			Jumlah	Per센 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	35	12,11
12	Sumatera Utara	455	29	6,37
13	Sumatera Barat	179	7	3,91
14	Riau	172	21	12,21
15	Jambi	144	5	3,47
16	Sumatera Selatan	241	3	1,24
17	Bengkulu	129	12	9,30
18	Lampung	229	22	9,61
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	10	21,28
21	Kepulauan Riau	76	35	46,05
31	DKI Jakarta	44	1	2,27
32	Jawa Barat	627	33	5,26
33	Jawa Tengah	576	41	7,12
34	DI Yogyakarta	78	3	3,85
35	Jawa Timur	666	61	9,16
36	Banten	155	18	11,61
51	Bali	57	17	29,82
52	Nusa Tenggara Barat	117	17	14,53
53	Nusa Tenggara Timur	315	81	25,71
61	Kalimantan Barat	174	23	13,22
62	Kalimantan Tengah	136	6	4,41
63	Kalimantan Selatan	155	11	7,10
64	Kalimantan Timur	103	22	21,36
65	Kalimantan Utara	55	9	16,36
71	Sulawesi Utara	171	43	25,15
72	Sulawesi Tengah	176	53	30,11
73	Sulawesi Selatan	311	53	17,04
74	Sulawesi Tenggara	222	53	23,87
75	Gorontalo	77	15	19,48
76	Sulawesi Barat	69	23	33,33
81	Maluku	118	62	52,54
82	Maluku Utara	117	52	44,44
91	Papua Barat	218	60	27,52
94	Papua	576	58	10,07

## Lampiran 12. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Wilayah Pesisir

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dengan Keberadaan Wilayah Pesisir	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	11	47,83
12	Sumatera Utara	33	14	42,42
13	Sumatera Barat	19	4	21,05
14	Riau	12	5	41,67
15	Jambi	11	2	18,18
16	Sumatera Selatan	17	2	11,76
17	Bengkulu	10	6	60,00
18	Lampung	15	6	40,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,14
21	Kepulauan Riau	7	6	85,71
31	DKI Jakarta	6	1	16,67
32	Jawa Barat	27	10	37,04
33	Jawa Tengah	35	13	37,14
34	DI Yogyakarta	5	1	20,00
35	Jawa Timur	38	18	47,37
36	Banten	8	5	62,50
51	Bali	9	6	66,67
52	Nusa Tenggara Barat	10	6	60,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	21	95,45
61	Kalimantan Barat	14	8	57,14
62	Kalimantan Tengah	14	6	42,86
63	Kalimantan Selatan	13	3	23,08
64	Kalimantan Timur	10	8	80,00
65	Kalimantan Utara	5	3	60,00
71	Sulawesi Utara	15	13	86,67
72	Sulawesi Tengah	13	11	84,62
73	Sulawesi Selatan	24	17	70,83
74	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
75	Gorontalo	6	5	83,33
76	Sulawesi Barat	6	5	83,33
81	Maluku	11	10	90,91
82	Maluku Utara	10	9	90,00
91	Papua Barat	13	11	84,62
94	Papua	29	12	41,38

**Lampiran 13. Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan	
			Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	61	51
12	Sumatera Utara	455	22	24
13	Sumatera Barat	179	13	10
14	Riau	172	11	5
15	Jambi	144	3	3
16	Sumatera Selatan	241	7	3
17	Bengkulu	129	18	12
18	Lampung	229	13	13
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	14	9
21	Kepulauan Riau	76	22	8
31	DKI Jakarta	44	4	4
32	Jawa Barat	627	33	40
33	Jawa Tengah	576	32	53
34	DI Yogyakarta	78	5	13
35	Jawa Timur	666	52	56
36	Banten	155	14	21
51	Bali	57	6	4
52	Nusa Tenggara Barat	117	30	17
53	Nusa Tenggara Timur	315	21	17
61	Kalimantan Barat	174	22	13
62	Kalimantan Tengah	136	13	7
63	Kalimantan Selatan	155	7	4
64	Kalimantan Timur	103	20	10
65	Kalimantan Utara	55	4	2
71	Sulawesi Utara	171	16	15
72	Sulawesi Tengah	176	32	33
73	Sulawesi Selatan	311	33	36
74	Sulawesi Tenggara	222	38	19
75	Gorontalo	77	13	13
76	Sulawesi Barat	69	8	8
81	Maluku	118	14	7
82	Maluku Utara	117	23	13
91	Papua Barat	218	9	4
94	Papua	576	11	6

**Lampiran 14. Banyaknya Kabupaten/Kota dengan Keberadaan Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan	
			Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	19	15
12	Sumatera Utara	33	13	13
13	Sumatera Barat	19	6	6
14	Riau	12	6	4
15	Jambi	11	3	3
16	Sumatera Selatan	17	3	2
17	Bengkulu	10	7	7
18	Lampung	15	7	6
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	6
21	Kepulauan Riau	7	7	4
31	DKI Jakarta	6	2	2
32	Jawa Barat	27	13	13
33	Jawa Tengah	35	18	18
34	DI Yogyakarta	5	3	4
35	Jawa Timur	38	20	19
36	Banten	8	6	5
51	Bali	9	4	4
52	Nusa Tenggara Barat	10	8	9
53	Nusa Tenggara Timur	22	12	13
61	Kalimantan Barat	14	7	6
62	Kalimantan Tengah	14	8	5
63	Kalimantan Selatan	13	5	2
64	Kalimantan Timur	10	8	8
65	Kalimantan Utara	5	3	2
71	Sulawesi Utara	15	10	12
72	Sulawesi Tengah	13	10	12
73	Sulawesi Selatan	24	20	18
74	Sulawesi Tenggara	17	12	11
75	Gorontalo	6	6	5
76	Sulawesi Barat	6	4	5
81	Maluku	11	7	4
82	Maluku Utara	10	10	9
91	Papua Barat	13	7	4
94	Papua	29	7	6

**Lampiran 15. Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan Permukiman diatas Permukaan Air Laut dan Permukiman diatas Sungai/Danau**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Banyaknya Kecamatan dengan Keberadaan	
			Pemukiman diatas Permukaan Air Laut	Permukiman diatas Sungai/Danau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	7	11
12	Sumatera Utara	455	19	32
13	Sumatera Barat	179	2	8
14	Riau	172	6	15
15	Jambi	144	1	19
16	Sumatera Selatan	241	3	34
17	Bengkulu	129	4	3
18	Lampung	229	12	13
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	6	1
21	Kepulauan Riau	76	54	9
31	DKI Jakarta	44	3	1
32	Jawa Barat	627	10	18
33	Jawa Tengah	576	11	9
34	DI Yogyakarta	78	1	1
35	Jawa Timur	666	12	5
36	Banten	155	1	6
51	Bali	57	1	3
52	Nusa Tenggara Barat	117	7	5
53	Nusa Tenggara Timur	315	13	5
61	Kalimantan Barat	174	8	48
62	Kalimantan Tengah	136	1	59
63	Kalimantan Selatan	155	10	46
64	Kalimantan Timur	103	22	35
65	Kalimantan Utara	55	10	5
71	Sulawesi Utara	171	12	10
72	Sulawesi Tengah	176	36	8
73	Sulawesi Selatan	311	16	21
74	Sulawesi Tenggara	222	54	5
75	Gorontalo	77	4	3
76	Sulawesi Barat	69	4	3
81	Maluku	118	37	6
82	Maluku Utara	117	31	5
91	Papua Barat	218	28	18
94	Papua	576	27	47

**Lampiran 16. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Permukiman di Atas Permukaan Laut**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Banyaknya Kabupaten/Kota dengan Keberadaan	
			Pemukiman diatas Permukaan Air Laut	Permukiman diatas Sungai/Danau
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	6	9
12	Sumatera Utara	33	10	16
13	Sumatera Barat	19	2	6
14	Riau	12	4	6
15	Jambi	11	1	8
16	Sumatera Selatan	17	2	10
17	Bengkulu	10	4	3
18	Lampung	15	5	8
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	1
21	Kepulauan Riau	7	7	3
31	DKI Jakarta	6	3	1
32	Jawa Barat	27	7	12
33	Jawa Tengah	35	10	8
34	DI Yogyakarta	5	1	1
35	Jawa Timur	38	9	4
36	Banten	8	1	4
51	Bali	9	1	3
52	Nusa Tenggara Barat	10	5	4
53	Nusa Tenggara Timur	22	9	5
61	Kalimantan Barat	14	4	12
62	Kalimantan Tengah	14	1	13
63	Kalimantan Selatan	13	2	9
64	Kalimantan Timur	10	8	9
65	Kalimantan Utara	5	3	3
71	Sulawesi Utara	15	8	5
72	Sulawesi Tengah	13	11	5
73	Sulawesi Selatan	24	7	11
74	Sulawesi Tenggara	17	14	4
75	Gorontalo	6	3	2
76	Sulawesi Barat	6	2	3
81	Maluku	11	10	5
82	Maluku Utara	10	9	2
91	Papua Barat	13	7	6
94	Papua	29	10	13

**Lampiran 17. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Desa Wisata yang Ditetapkan Pesisir**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Desa Wisata yang Ditetapkan Pesisir	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	63	21,80
12	Sumatera Utara	455	74	16,26
13	Sumatera Barat	179	38	21,23
14	Riau	172	29	16,86
15	Jambi	144	23	15,97
16	Sumatera Selatan	241	42	17,43
17	Bengkulu	129	51	39,53
18	Lampung	229	41	17,90
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	18	38,30
21	Kepulauan Riau	76	26	34,21
31	DKI Jakarta	44	5	11,36
32	Jawa Barat	627	151	24,08
33	Jawa Tengah	576	270	46,88
34	DI Yogyakarta	78	47	60,26
35	Jawa Timur	666	221	33,18
36	Banten	155	30	19,35
51	Bali	57	45	78,95
52	Nusa Tenggara Barat	117	66	56,41
53	Nusa Tenggara Timur	315	82	26,03
61	Kalimantan Barat	174	32	18,39
62	Kalimantan Tengah	136	23	16,91
63	Kalimantan Selatan	155	22	14,19
64	Kalimantan Timur	103	30	29,13
65	Kalimantan Utara	55	12	21,82
71	Sulawesi Utara	171	37	21,64
72	Sulawesi Tengah	176	34	19,32
73	Sulawesi Selatan	311	58	18,65
74	Sulawesi Tenggara	222	38	17,12
75	Gorontalo	77	12	15,58
76	Sulawesi Barat	69	8	11,59
81	Maluku	118	23	19,49
82	Maluku Utara	117	30	25,64
91	Papua Barat	218	24	11,01
94	Papua	576	26	4,51

**Lampiran 18. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Desa Wisata yang Ditetapkan Pesisir**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Desa Wisata yang Ditetapkan pesisir	
			Jumlah	Per센 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	20	86,96
12	Sumatera Utara	33	18	54,55
13	Sumatera Barat	19	15	78,95
14	Riau	12	9	75,00
15	Jambi	11	10	90,91
16	Sumatera Selatan	17	13	76,47
17	Bengkulu	10	9	90,00
18	Lampung	15	12	80,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,43
21	Kepulauan Riau	7	7	100,00
31	DKI Jakarta	6	4	66,67
32	Jawa Barat	27	21	77,78
33	Jawa Tengah	35	34	97,14
34	DI Yogyakarta	5	5	100,00
35	Jawa Timur	38	30	78,95
36	Banten	8	8	100,00
51	Bali	9	8	88,89
52	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	18	81,82
61	Kalimantan Barat	14	8	57,14
62	Kalimantan Tengah	14	13	92,86
63	Kalimantan Selatan	13	11	84,62
64	Kalimantan Timur	10	8	80,00
65	Kalimantan Utara	5	3	60,00
71	Sulawesi Utara	15	11	73,33
72	Sulawesi Tengah	13	8	61,54
73	Sulawesi Selatan	24	20	83,33
74	Sulawesi Tenggara	17	12	70,59
75	Gorontalo	6	5	83,33
76	Sulawesi Barat	6	5	83,33
81	Maluku	11	10	90,91
82	Maluku Utara	10	8	80,00
91	Papua Barat	13	7	53,85
94	Papua	29	13	44,83

**Lampiran 19. Banyaknya Kecamatan yang terdapat Objek Wisata**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang terdapat Objek Wisata			
			Kebun Binatang	Wisata Tirta	Agrowisata	Wisata Budaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Aceh	289	2	29	5	9
12	Sumatera Utara	455	5	45	11	13
13	Sumatera Barat	179	3	38	15	22
14	Riau	172	1	16	17	9
15	Jambi	144	2	12	9	7
16	Sumatera Selatan	241	2	23	14	9
17	Bengkulu	129	0	9	3	3
18	Lampung	229	2	25	16	8
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	0	7	7	6
21	Kepulauan Riau	76	1	7	8	11
31	DKI Jakarta	44	1	4	3	5
32	Jawa Barat	627	4	176	75	80
33	Jawa Tengah	576	5	188	65	81
34	DI Yogyakarta	78	2	21	11	20
35	Jawa Timur	666	5	166	80	68
36	Banten	155	0	36	8	7
51	Bali	57	3	23	12	20
52	Nusa Tenggara Barat	117	1	26	9	13
53	Nusa Tenggara Timur	315	1	10	9	37
61	Kalimantan Barat	174	1	18	11	14
62	Kalimantan Tengah	136	1	7	9	6
63	Kalimantan Selatan	155	1	22	9	7
64	Kalimantan Timur	103	1	25	9	15
65	Kalimantan Utara	55	1	6	3	4
71	Sulawesi Utara	171	1	14	3	11
72	Sulawesi Tengah	176	0	16	4	3
73	Sulawesi Selatan	311	0	27	13	26
74	Sulawesi Tenggara	222	0	4	1	4
75	Gorontalo	77	0	5	1	3
76	Sulawesi Barat	69	0	5	1	1
81	Maluku	118	0	8	2	6
82	Maluku Utara	117	0	3	2	0
91	Papua Barat	218	1	6	2	2
94	Papua	576	1	12	3	7

## Lampiran 20. Banyaknya Kecamatan yang terdapat Objek Wisata (Lanjutan)

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata		
			Taman Rekreasi	Wisata Alam	Wisata Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	289	17	63	11
12	Sumatera Utara	455	47	100	27
13	Sumatera Barat	179	31	66	16
14	Riau	172	30	38	16
15	Jambi	144	38	25	7
16	Sumatera Selatan	241	42	52	12
17	Bengkulu	129	10	25	3
18	Lampung	229	51	50	8
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	9	20	5
21	Kepulauan Riau	76	13	27	8
31	DKI Jakarta	44	7	4	3
32	Jawa Barat	627	144	220	51
33	Jawa Tengah	576	141	213	63
34	DI Yogyakarta	78	18	34	22
35	Jawa Timur	666	162	217	68
36	Banten	155	44	32	10
51	Bali	57	23	41	15
52	Nusa Tenggara Barat	117	29	40	7
53	Nusa Tenggara Timur	315	11	95	16
61	Kalimantan Barat	174	15	55	11
62	Kalimantan Tengah	136	16	27	8
63	Kalimantan Selatan	155	16	30	12
64	Kalimantan Timur	103	15	35	14
65	Kalimantan Utara	55	2	15	1
71	Sulawesi Utara	171	21	50	11
72	Sulawesi Tengah	176	8	46	8
73	Sulawesi Selatan	311	36	87	20
74	Sulawesi Tenggara	222	14	52	4
75	Gorontalo	77	4	16	6
76	Sulawesi Barat	69	4	17	1
81	Maluku	118	6	42	5
82	Maluku Utara	117	7	32	2
91	Papua Barat	218	1	32	2
94	Papua	576	8	42	9

**Lampiran 21. Banyaknya Kabupaten/Kota yang terdapat Objek Wisata**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata			
			Kebun Binatang	Wisata Tirta	Agrowisata	Wisata Budaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Aceh	23	1	15	3	8
12	Sumatera Utara	33	5	17	6	9
13	Sumatera Barat	19	3	16	9	13
14	Riau	12	1	7	7	7
15	Jambi	11	2	7	5	4
16	Sumatera Selatan	17	2	14	9	7
17	Bengkulu	10	0	6	2	2
18	Lampung	15	1	10	8	8
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	5	3	4
21	Kepulauan Riau	7	1	3	5	5
31	DKI Jakarta	6	1	1	2	3
32	Jawa Barat	27	4	24	21	25
33	Jawa Tengah	35	4	32	26	31
34	DI Yogyakarta	5	2	5	4	5
35	Jawa Timur	38	5	31	28	30
36	Banten	8	0	6	6	4
51	Bali	9	2	8	4	8
52	Nusa Tenggara Barat	10	1	9	7	7
53	Nusa Tenggara Timur	22	1	5	8	14
61	Kalimantan Barat	14	1	10	5	8
62	Kalimantan Tengah	14	1	5	7	6
63	Kalimantan Selatan	13	1	10	8	6
64	Kalimantan Timur	10	1	9	5	7
65	Kalimantan Utara	5	1	3	1	2
71	Sulawesi Utara	15	1	8	2	6
72	Sulawesi Tengah	13	0	7	4	2
73	Sulawesi Selatan	24	0	15	10	14
74	Sulawesi Tenggara	17	0	3	1	4
75	Gorontalo	6	0	3	1	2
76	Sulawesi Barat	6	0	4	1	1
81	Maluku	11	0	4	2	4
82	Maluku Utara	10	0	3	2	0
91	Papua Barat	13	1	3	2	2
94	Papua	29	1	8	3	5

## Lampiran 22. Banyaknya Kabupaten/Kota Yang terdapat Objek Wisata (Lanjutan)

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata		
			Taman Rekreasi	Wisata Alam	Wisata Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	23	10	20	7
12	Sumatera Utara	33	22	29	19
13	Sumatera Barat	19	13	16	11
14	Riau	12	11	11	9
15	Jambi	11	10	9	2
16	Sumatera Selatan	17	15	14	9
17	Bengkulu	10	5	9	3
18	Lampung	15	14	12	7
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	5	4
21	Kepulauan Riau	7	5	7	5
31	DKI Jakarta	6	4	4	3
32	Jawa Barat	27	24	24	19
33	Jawa Tengah	35	34	32	30
34	DI Yogyakarta	5	4	4	4
35	Jawa Timur	38	37	32	28
36	Banten	8	8	7	5
51	Bali	9	8	9	7
52	Nusa Tenggara Barat	10	9	9	3
53	Nusa Tenggara Timur	22	7	21	10
61	Kalimantan Barat	14	8	11	5
62	Kalimantan Tengah	14	9	11	7
63	Kalimantan Selatan	13	8	11	8
64	Kalimantan Timur	10	7	9	6
65	Kalimantan Utara	5	2	4	1
71	Sulawesi Utara	15	9	14	9
72	Sulawesi Tengah	13	7	12	5
73	Sulawesi Selatan	24	18	23	12
74	Sulawesi Tenggara	17	10	14	3
75	Gorontalo	6	3	6	3
76	Sulawesi Barat	6	3	6	1
81	Maluku	11	4	11	3
82	Maluku Utara	10	6	9	2
91	Papua Barat	13	1	9	2
94	Papua	29	6	11	7

**Lampiran 23. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah			
			Gedung	Jembatan	Candi	Pelabuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Aceh	289	26	6	0	4
12	Sumatera Utara	455	52	11	5	2
13	Sumatera Barat	179	48	11	6	3
14	Riau	172	24	0	1	1
15	Jambi	144	11	4	7	0
16	Sumatera Selatan	241	23	9	6	1
17	Bengkulu	129	10	1	0	0
18	Lampung	229	18	4	0	2
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	12	4	0	4
21	Kepulauan Riau	76	5	1	1	2
31	DKI Jakarta	44	12	4	0	2
32	Jawa Barat	627	83	26	6	2
33	Jawa Tengah	576	124	48	56	1
34	DI Yogyakarta	78	42	9	14	0
35	Jawa Timur	666	80	29	65	10
36	Banten	155	18	8	0	2
51	Bali	57	12	3	11	4
52	Nusa Tenggara Barat	117	13	5	0	3
53	Nusa Tenggara Timur	315	19	1	0	4
61	Kalimantan Barat	174	21	4	0	1
62	Kalimantan Tengah	136	18	2	0	2
63	Kalimantan Selatan	155	12	2	2	0
64	Kalimantan Timur	103	17	2	2	4
65	Kalimantan Utara	55	4	0	0	0
71	Sulawesi Utara	171	13	5	1	2
72	Sulawesi Tengah	176	13	2	0	4
73	Sulawesi Selatan	311	35	4	1	3
74	Sulawesi Tenggara	222	7	1	0	2
75	Gorontalo	77	8	3	0	1
76	Sulawesi Barat	69	4	0	0	0
81	Maluku	118	15	1	0	3
82	Maluku Utara	117	14	2	0	2
91	Papua Barat	218	6	1	0	2
94	Papua	576	10	0	0	3

## Lampiran 24. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah (Lanjutan)

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah		
			Stasiun Kereta Api	Tempat Ibadah	Lokasi Bersejarah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	289	2	55	68
12	Sumatera Utara	455	11	43	53
13	Sumatera Barat	179	14	59	64
14	Riau	172	0	27	36
15	Jambi	144	0	13	17
16	Sumatera Selatan	241	1	13	38
17	Bengkulu	129	0	11	19
18	Lampung	229	3	16	14
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	0	15	19
21	Kepulauan Riau	76	0	8	12
31	DKI Jakarta	44	7	12	3
32	Jawa Barat	627	36	128	96
33	Jawa Tengah	576	48	230	143
34	DI Yogyakarta	78	8	49	40
35	Jawa Timur	666	37	196	124
36	Banten	155	13	30	23
51	Bali	57	0	41	17
52	Nusa Tenggara Barat	117	0	21	32
53	Nusa Tenggara Timur	315	0	29	41
61	Kalimantan Barat	174	0	30	46
62	Kalimantan Tengah	136	0	13	37
63	Kalimantan Selatan	155	0	21	27
64	Kalimantan Timur	103	0	11	23
65	Kalimantan Utara	55	0	3	12
71	Sulawesi Utara	171	0	16	39
72	Sulawesi Tengah	176	0	11	20
73	Sulawesi Selatan	311	1	41	75
74	Sulawesi Tenggara	222	0	8	32
75	Gorontalo	77	0	6	11
76	Sulawesi Barat	69	0	6	16
81	Maluku	118	0	25	21
82	Maluku Utara	117	0	10	17
91	Papua Barat	218	0	15	15
94	Papua	576	0	18	15

**Lampiran 25. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/ Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah			
			Gedung	Jembatan	Candi	Pelabuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Aceh	23	12	5	0	3
12	Sumatera Utara	33	24	9	2	2
13	Sumatera Barat	19	16	9	5	2
14	Riau	12	9	0	1	1
15	Jambi	11	6	3	5	0
16	Sumatera Selatan	17	12	8	5	1
17	Bengkulu	10	5	1	0	0
18	Lampung	15	8	3	0	2
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	4	0	3
21	Kepulauan Riau	7	3	1	1	2
31	DKI Jakarta	6	4	3	0	1
32	Jawa Barat	27	24	19	5	2
33	Jawa Tengah	35	33	22	23	1
34	DI Yogyakarta	5	5	5	4	0
35	Jawa Timur	38	35	18	23	8
36	Banten	8	7	5	0	2
51	Bali	9	8	2	6	3
52	Nusa Tenggara Barat	10	5	3	0	3
53	Nusa Tenggara Timur	22	10	1	0	4
61	Kalimantan Barat	14	11	4	0	1
62	Kalimantan Tengah	14	11	2	0	1
63	Kalimantan Selatan	13	6	2	2	0
64	Kalimantan Timur	10	8	2	2	3
65	Kalimantan Utara	5	3	0	0	0
71	Sulawesi Utara	15	9	3	1	2
72	Sulawesi Tengah	13	7	2	0	3
73	Sulawesi Selatan	24	17	4	1	3
74	Sulawesi Tenggara	17	4	1	0	2
75	Gorontalo	6	4	3	0	1
76	Sulawesi Barat	6	3	0	0	0
81	Maluku	11	4	1	0	3
82	Maluku Utara	10	7	1	0	2
91	Papua Barat	13	5	1	0	2
94	Papua	29	6	0	0	3

## Lampiran 26. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah (Lanjutan)

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/ Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Objek Wisata Bersejarah		
			Stasiun Kereta Api	Tempat Ibadah	Lokasi Bersejarah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	23	2	19	21
12	Sumatera Utara	33	8	19	24
13	Sumatera Barat	19	7	17	16
14	Riau	12	0	11	11
15	Jambi	11	0	7	8
16	Sumatera Selatan	17	1	7	11
17	Bengkulu	10	0	5	8
18	Lampung	15	2	8	9
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	6	6
21	Kepulauan Riau	7	0	6	6
31	DKI Jakarta	6	5	5	3
32	Jawa Barat	27	20	27	24
33	Jawa Tengah	35	22	35	34
34	DI Yogyakarta	5	4	5	5
35	Jawa Timur	38	23	37	34
36	Banten	8	6	8	7
51	Bali	9	0	9	8
52	Nusa Tenggara Barat	10	0	8	10
53	Nusa Tenggara Timur	22	0	15	14
61	Kalimantan Barat	14	0	14	14
62	Kalimantan Tengah	14	0	8	12
63	Kalimantan Selatan	13	0	10	9
64	Kalimantan Timur	10	0	8	7
65	Kalimantan Utara	5	0	3	5
71	Sulawesi Utara	15	0	9	12
72	Sulawesi Tengah	13	0	7	10
73	Sulawesi Selatan	24	1	19	23
74	Sulawesi Tenggara	17	0	6	13
75	Gorontalo	6	0	3	5
76	Sulawesi Barat	6	0	5	5
81	Maluku	11	0	9	8
82	Maluku Utara	10	0	6	7
91	Papua Barat	13	0	8	6
94	Papua	29	0	12	8

**Lampiran 27. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Supermarket/Swalyan/Mall**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Supermarket/Swalyan/Mall	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	77	26,64
12	Sumatera Utara	455	107	23,52
13	Sumatera Barat	179	51	28,49
14	Riau	172	80	46,51
15	Jambi	144	44	30,56
16	Sumatera Selatan	241	52	21,58
17	Bengkulu	129	15	11,63
18	Lampung	229	58	25,33
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	24	51,06
21	Kepulauan Riau	76	27	35,53
31	DKI Jakarta	44	42	95,45
32	Jawa Barat	627	233	37,16
33	Jawa Tengah	576	239	41,49
34	DI Yogyakarta	78	50	64,10
35	Jawa Timur	666	271	40,69
36	Banten	155	60	38,71
51	Bali	57	33	57,89
52	Nusa Tenggara Barat	117	54	46,15
53	Nusa Tenggara Timur	315	32	10,16
61	Kalimantan Barat	174	29	16,67
62	Kalimantan Tengah	136	24	17,65
63	Kalimantan Selatan	155	24	15,48
64	Kalimantan Timur	103	37	35,92
65	Kalimantan Utara	55	8	14,55
71	Sulawesi Utara	171	38	22,22
72	Sulawesi Tengah	176	34	19,32
73	Sulawesi Selatan	311	85	27,33
74	Sulawesi Tenggara	222	26	11,71
75	Gorontalo	77	16	20,78
76	Sulawesi Barat	69	12	17,39
81	Maluku	118	13	11,02
82	Maluku Utara	117	22	18,80
91	Papua Barat	218	17	7,80
94	Papua	576	31	5,38

**Lampiran 28. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Supermarket/Swalyan/Mall**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Supermarket/Swalyan/Mall	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	21	91,30
12	Sumatera Utara	33	29	87,88
13	Sumatera Barat	19	14	73,68
14	Riau	12	12	100,00
15	Jambi	11	10	90,91
16	Sumatera Selatan	17	16	94,12
17	Bengkulu	10	7	70,00
18	Lampung	15	12	80,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,71
21	Kepulauan Riau	7	6	85,71
31	Dki Jakarta	6	6	100,00
32	Jawa Barat	27	26	96,30
33	Jawa Tengah	35	34	97,14
34	Di Yogyakarta	5	5	100,00
35	Jawa Timur	38	38	100,00
36	Banten	8	8	100,00
51	Bali	9	9	100,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	18	81,82
61	Kalimantan Barat	14	13	92,86
62	Kalimantan Tengah	14	13	92,86
63	Kalimantan Selatan	13	10	76,92
64	Kalimantan Timur	10	8	80,00
65	Kalimantan Utara	5	4	80,00
71	Sulawesi Utara	15	11	73,33
72	Sulawesi Tengah	13	10	76,92
73	Sulawesi Selatan	24	20	83,33
74	Sulawesi Tenggara	17	10	58,82
75	Gorontalo	6	5	83,33
76	Sulawesi Barat	6	5	83,33
81	Maluku	11	6	54,55
82	Maluku Utara	10	8	80,00
91	Papua Barat	13	8	61,54
94	Papua	29	16	55,17

## Lampiran 29. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Pasar Tradisional

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Tradisional	
			Jumlah	Per센 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	182	62,98
12	Sumatera Utara	455	358	78,68
13	Sumatera Barat	179	157	87,71
14	Riau	172	149	86,63
15	Jambi	144	117	81,25
16	Sumatera Selatan	241	206	85,48
17	Bengkulu	129	116	89,92
18	Lampung	229	188	82,10
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	35	74,47
21	Kepulauan Riau	76	31	40,79
31	DKI Jakarta	44	39	88,64
32	Jawa Barat	627	450	71,77
33	Jawa Tengah	576	553	96,01
34	DI Yogyakarta	78	74	94,87
35	Jawa Timur	666	625	93,84
36	Banten	155	117	75,48
51	Bali	57	56	98,25
52	Nusa Tenggara Barat	117	89	76,07
53	Nusa Tenggara Timur	315	256	81,27
61	Kalimantan Barat	174	91	52,30
62	Kalimantan Tengah	136	112	82,35
63	Kalimantan Selatan	155	140	90,32
64	Kalimantan Timur	103	83	80,58
65	Kalimantan Utara	55	37	67,27
71	Sulawesi Utara	171	117	68,42
72	Sulawesi Tengah	176	143	81,25
73	Sulawesi Selatan	311	277	89,07
74	Sulawesi Tenggara	222	181	81,53
75	Gorontalo	77	66	85,71
76	Sulawesi Barat	69	53	76,81
81	Maluku	118	50	42,37
82	Maluku Utara	117	53	45,30
91	Papua Barat	218	56	25,69
94	Papua	576	168	29,17

### Lampiran 30. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Pasar Tradisional

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Pasar Tradisional	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	23	100,00
12	Sumatera Utara	33	33	100,00
13	Sumatera Barat	19	19	100,00
14	Riau	12	12	100,00
15	Jambi	11	11	100,00
16	Sumatera Selatan	17	17	100,00
17	Bengkulu	10	10	100,00
18	Lampung	15	15	100,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
21	Kepulauan Riau	7	7	100,00
31	DKI Jakarta	6	5	83,33
32	Jawa Barat	27	27	100,00
33	Jawa Tengah	35	35	100,00
34	DI Yogyakarta	5	5	100,00
35	Jawa Timur	38	38	100,00
36	Banten	8	8	100,00
51	Bali	9	9	100,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00
61	Kalimantan Barat	14	14	100,00
62	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
63	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
64	Kalimantan Timur	10	10	100,00
65	Kalimantan Utara	5	5	100,00
71	Sulawesi Utara	15	15	100,00
72	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
73	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
74	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00
75	Gorontalo	6	6	100,00
76	Sulawesi Barat	6	6	100,00
81	Maluku	11	11	100,00
82	Maluku Utara	10	10	100,00
91	Papua Barat	13	13	100,00
94	Papua	29	29	100,00

**Lampiran 31. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus		
			Khusus Hewan	Khusus Buah dan Sayur	Khusus Beras
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	289	23	29	1
12	Sumatera Utara	455	12	6	0
13	Sumatera Barat	179	18	3	1
14	Riau	172	7	4	0
15	Jambi	144	8	8	1
16	Sumatera Selatan	241	8	10	3
17	Bengkulu	129	2	1	0
18	Lampung	229	13	7	0
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	2	1	0
21	Kepulauan Riau	76	2	6	0
31	DKI Jakarta	44	7	6	2
32	Jawa Barat	627	84	17	3
33	Jawa Tengah	576	172	38	6
34	DI Yogyakarta	78	20	8	1
35	Jawa Timur	666	221	43	4
36	Banten	155	6	4	1
51	Bali	57	7	2	0
52	Nusa Tenggara Barat	117	10	2	0
53	Nusa Tenggara Timur	315	4	6	0
61	Kalimantan Barat	174	6	6	0
62	Kalimantan Tengah	136	4	5	0
63	Kalimantan Selatan	155	8	8	2
64	Kalimantan Timur	103	1	3	0
65	Kalimantan Utara	55	1	4	0
71	Sulawesi Utara	171	3	2	0
72	Sulawesi Tengah	176	4	1	0
73	Sulawesi Selatan	311	7	2	0
74	Sulawesi Tenggara	222	0	2	0
75	Gorontalo	77	5	2	0
76	Sulawesi Barat	69	0	1	0
81	Maluku	118	0	3	0
82	Maluku Utara	117	0	7	0
91	Papua Barat	218	0	8	0
94	Papua	576	4	15	2

## Lampiran 32. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus (Lanjutan)

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus	
			Khusus Palawija	Khusus Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	2	9
12	Sumatera Utara	455	0	7
13	Sumatera Barat	179	1	3
14	Riau	172	0	4
15	Jambi	144	1	6
16	Sumatera Selatan	241	3	5
17	Bengkulu	129	0	1
18	Lampung	229	0	2
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	0	0
21	Kepulauan Riau	76	0	0
31	DKI Jakarta	44	0	5
32	Jawa Barat	627	4	11
33	Jawa Tengah	576	1	39
34	DI Yogyakarta	78	4	11
35	Jawa Timur	666	11	53
36	Banten	155	0	2
51	Bali	57	0	6
52	Nusa Tenggara Barat	117	0	2
53	Nusa Tenggara Timur	315	1	0
61	Kalimantan Barat	174	0	6
62	Kalimantan Tengah	136	0	0
63	Kalimantan Selatan	155	0	4
64	Kalimantan Timur	103	0	2
65	Kalimantan Utara	55	0	1
71	Sulawesi Utara	171	0	3
72	Sulawesi Tengah	176	0	4
73	Sulawesi Selatan	311	0	2
74	Sulawesi Tenggara	222	0	3
75	Gorontalo	77	0	0
76	Sulawesi Barat	69	0	2
81	Maluku	118	0	2
82	Maluku Utara	117	1	4
91	Papua Barat	218	2	1
94	Papua	576	7	4

**Lampiran 33. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Pasar Khusus**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus		
			Khusus Hewan	Khusus Buah dan Sayur	Khusus Beras
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	23	11	16	1
12	Sumatera Utara	33	11	5	0
13	Sumatera Barat	19	11	3	1
14	Riau	12	7	4	0
15	Jambi	11	6	5	1
16	Sumatera Selatan	17	4	6	2
17	Bengkulu	10	2	1	0
18	Lampung	15	5	5	0
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	2	1	0
21	Kepulauan Riau	7	2	4	0
31	DKI Jakarta	6	3	5	2
32	Jawa Barat	27	24	10	3
33	Jawa Tengah	35	34	23	6
34	DI Yogyakarta	5	4	5	1
35	Jawa Timur	38	38	24	4
36	Banten	8	6	2	1
51	Bali	9	4	2	0
52	Nusa Tenggara Barat	10	7	2	0
53	Nusa Tenggara Timur	22	4	5	0
61	Kalimantan Barat	14	6	5	0
62	Kalimantan Tengah	14	4	4	0
63	Kalimantan Selatan	13	6	6	1
64	Kalimantan Timur	10	1	3	0
65	Kalimantan Utara	5	1	3	0
71	Sulawesi Utara	15	3	2	0
72	Sulawesi Tengah	13	3	1	0
73	Sulawesi Selatan	24	7	2	0
74	Sulawesi Tenggara	17	0	2	0
75	Gorontalo	6	4	2	0
76	Sulawesi Barat	6	0	1	0
81	Maluku	11	0	3	0
82	Maluku Utara	10	0	5	0
91	Papua Barat	13	0	6	0
94	Papua	29	4	12	2

### Lampiran 34. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Pasar Khusus (Lanjutan)

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Pasar Khusus	
			Khusus Palawija	Khusus Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	2	7
12	Sumatera Utara	33	0	7
13	Sumatera Barat	19	1	2
14	Riau	12	0	2
15	Jambi	11	1	4
16	Sumatera Selatan	17	2	4
17	Bengkulu	10	0	1
18	Lampung	15	0	2
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	0
21	Kepulauan Riau	7	0	0
31	DKI Jakarta	6	0	4
32	Jawa Barat	27	4	8
33	Jawa Tengah	35	1	22
34	DI Yogyakarta	5	3	4
35	Jawa Timur	38	6	25
36	Banten	8	0	2
51	Bali	9	0	4
52	Nusa Tenggara Barat	10	0	1
53	Nusa Tenggara Timur	22	1	0
61	Kalimantan Barat	14	0	4
62	Kalimantan Tengah	14	0	0
63	Kalimantan Selatan	13	0	3
64	Kalimantan Timur	10	0	2
65	Kalimantan Utara	5	0	1
71	Sulawesi Utara	15	0	3
72	Sulawesi Tengah	13	0	4
73	Sulawesi Selatan	24	0	2
74	Sulawesi Tenggara	17	0	3
75	Gorontalo	6	0	0
76	Sulawesi Barat	6	0	2
81	Maluku	11	0	2
82	Maluku Utara	10	1	3
91	Papua Barat	13	2	1
94	Papua	29	5	4

**Lampiran 35. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	18	78,26
12	Sumatera Utara	33	27	81,82
13	Sumatera Barat	19	19	100,00
14	Riau	12	9	75,00
15	Jambi	11	9	81,82
16	Sumatera Selatan	17	13	76,47
17	Bengkulu	10	10	100,00
18	Lampung	15	15	100,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,43
21	Kepulauan Riau	7	5	71,43
31	DKI Jakarta	6	5	83,33
32	Jawa Barat	27	26	96,30
33	Jawa Tengah	35	35	100,00
34	DI Yogyakarta	5	5	100,00
35	Jawa Timur	38	36	94,74
36	Banten	8	7	87,50
51	Bali	9	9	100,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	9	90,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	17	77,27
61	Kalimantan Barat	14	11	78,57
62	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
63	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
64	Kalimantan Timur	10	8	80,00
65	Kalimantan Utara	5	5	100,00
71	Sulawesi Utara	15	14	93,33
72	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
73	Sulawesi Selatan	24	20	83,33
74	Sulawesi Tenggara	17	13	76,47
75	Gorontalo	6	5	83,33
76	Sulawesi Barat	6	5	83,33
81	Maluku	11	11	100,00
82	Maluku Utara	10	8	80,00
91	Papua Barat	13	7	53,85
94	Papua	29	13	44,83

**Lampiran 36. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang Terdapat Kegiatan Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi Sungai, Kanal, Waduk, Pantai	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	19	82,61
12	Sumatera Utara	33	25	75,76
13	Sumatera Barat	19	18	94,74
14	Riau	12	10	83,33
15	Jambi	11	11	100,00
16	Sumatera Selatan	17	14	82,35
17	Bengkulu	10	9	90,00
18	Lampung	15	15	100,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	71,43
21	Kepulauan Riau	7	6	85,71
31	DKI Jakarta	6	5	83,33
32	Jawa Barat	27	25	92,59
33	Jawa Tengah	35	35	100,00
34	DI Yogyakarta	5	4	80,00
35	Jawa Timur	38	35	92,11
36	Banten	8	6	75,00
51	Bali	9	9	100,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	16	72,73
61	Kalimantan Barat	14	13	92,86
62	Kalimantan Tengah	14	11	78,57
63	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
64	Kalimantan Timur	10	7	70,00
65	Kalimantan Utara	5	4	80,00
71	Sulawesi Utara	15	12	80,00
72	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
73	Sulawesi Selatan	24	21	87,50
74	Sulawesi Tenggara	17	17	100,00
75	Gorontalo	6	5	83,33
76	Sulawesi Barat	6	4	66,67
81	Maluku	11	9	81,82
82	Maluku Utara	10	9	90,00
91	Papua Barat	13	10	76,92
94	Papua	29	12	41,38

**Lampiran 37. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Kendaraan Pemadam Kebakaran**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Kendaraan Pemadam Kebakaran	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	96	33,22
12	Sumatera Utara	455	99	21,76
13	Sumatera Barat	179	58	32,40
14	Riau	172	56	32,56
15	Jambi	144	63	43,75
16	Sumatera Selatan	241	84	34,85
17	Bengkulu	129	38	29,46
18	Lampung	229	39	17,03
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	10	21,28
21	Kepulauan Riau	76	17	22,37
31	DKI Jakarta	44	42	95,45
32	Jawa Barat	627	108	17,22
33	Jawa Tengah	576	95	16,49
34	DI Yogyakarta	78	11	14,10
35	Jawa Timur	666	94	14,11
36	Banten	155	67	43,23
51	Bali	57	24	42,11
52	Nusa Tenggara Barat	117	31	26,50
53	Nusa Tenggara Timur	315	13	4,13
61	Kalimantan Barat	174	66	37,93
62	Kalimantan Tengah	136	87	63,97
63	Kalimantan Selatan	155	98	63,23
64	Kalimantan Timur	103	68	66,02
65	Kalimantan Utara	55	20	36,36
71	Sulawesi Utara	171	20	11,70
72	Sulawesi Tengah	176	21	11,93
73	Sulawesi Selatan	311	106	34,08
74	Sulawesi Tenggara	222	21	9,46
75	Gorontalo	77	4	5,19
76	Sulawesi Barat	69	16	23,19
81	Maluku	118	8	6,78
82	Maluku Utara	117	11	9,40
91	Papua Barat	218	10	4,59
94	Papua	576	22	3,82

### Lampiran 38. Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terdapat Kendaraan Pemadam Kebakaran

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Kendaraan Pemadam Kebakaran	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	22	95,65
12	Sumatera Utara	33	30	90,91
13	Sumatera Barat	19	19	100,00
14	Riau	12	12	100,00
15	Jambi	11	11	100,00
16	Sumatera Selatan	17	15	88,24
17	Bengkulu	10	9	90,00
18	Lampung	15	12	80,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
21	Kepulauan Riau	7	7	100,00
31	DKI Jakarta	6	6	100,00
32	Jawa Barat	27	24	88,89
33	Jawa Tengah	35	34	97,14
34	DI Yogyakarta	5	4	80,00
35	Jawa Timur	38	32	84,21
36	Banten	8	8	100,00
51	Bali	9	8	88,89
52	Nusa Tenggara Barat	10	8	80,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	12	54,55
61	Kalimantan Barat	14	13	92,86
62	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
63	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
64	Kalimantan Timur	10	10	100,00
65	Kalimantan Utara	5	5	100,00
71	Sulawesi Utara	15	11	73,33
72	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
73	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
74	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
75	Gorontalo	6	4	66,67
76	Sulawesi Barat	6	6	100,00
81	Maluku	11	7	63,64
82	Maluku Utara	10	10	100,00
91	Papua Barat	13	9	69,23
94	Papua	29	16	55,17

### Lampiran 39. Banyaknya Kecamatan yang Terdapat Kegiatan Simulasi Bencana Alam

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang Terdapat Kegiatan Simulasi Bencana Alam	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	289	68	23,53
12	Sumatera Utara	455	106	23,30
13	Sumatera Barat	179	96	53,63
14	Riau	172	83	48,26
15	Jambi	144	45	31,25
16	Sumatera Selatan	241	82	34,02
17	Bengkulu	129	32	24,81
18	Lampung	229	78	34,06
19	Kepulauan Bangka Belitung	47	12	25,53
21	Kepulauan Riau	76	17	22,37
31	DKI Jakarta	44	34	77,27
32	Jawa Barat	627	341	54,39
33	Jawa Tengah	576	361	62,67
34	DI Yogyakarta	78	65	83,33
35	Jawa Timur	666	274	41,14
36	Banten	155	82	52,90
51	Bali	57	36	63,16
52	Nusa Tenggara Barat	117	62	52,99
53	Nusa Tenggara Timur	315	69	21,90
61	Kalimantan Barat	174	87	50,00
62	Kalimantan Tengah	136	93	68,38
63	Kalimantan Selatan	155	70	45,16
64	Kalimantan Timur	103	69	66,99
65	Kalimantan Utara	55	16	29,09
71	Sulawesi Utara	171	65	38,01
72	Sulawesi Tengah	176	73	41,48
73	Sulawesi Selatan	311	108	34,73
74	Sulawesi Tenggara	222	38	17,12
75	Gorontalo	77	29	37,66
76	Sulawesi Barat	69	13	18,84
81	Maluku	118	38	32,20
82	Maluku Utara	117	27	23,08
91	Papua Barat	218	17	7,80
94	Papua	576	22	3,82

## Lampiran 40. Banyaknya Kebupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Simulasi Bencana Alam

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terdapat Kegiatan Simulasi Bencana Alam	
			Jumlah	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Aceh	23	22	95,65
12	Sumatera Utara	33	29	87,88
13	Sumatera Barat	19	18	95,00
14	Riau	12	12	100,00
15	Jambi	11	11	100,00
16	Sumatera Selatan	17	17	100,00
17	Bengkulu	10	10	100,00
18	Lampung	15	15	100,00
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	86,00
21	Kepulauan Riau	7	6	86,00
31	DKI Jakarta	6	5	83,00
32	Jawa Barat	27	27	100,00
33	Jawa Tengah	35	35	100,00
34	DI Yogyakarta	5	5	100,00
35	Jawa Timur	38	35	92,11
36	Banten	8	8	100,00
51	Bali	9	9	100,00
52	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
53	Nusa Tenggara Timur	22	21	95,45
61	Kalimantan Barat	14	14	100,00
62	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
63	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
64	Kalimantan Timur	10	9	90,00
65	Kalimantan Utara	5	4	80,00
71	Sulawesi Utara	15	15	100,00
72	Sulawesi Tengah	13	12	92,00
73	Sulawesi Selatan	24	22	92,00
74	Sulawesi Tenggara	17	16	94,12
75	Gorontalo	6	6	100,00
76	Sulawesi Barat	6	6	100,00
81	Maluku	11	11	100,00
82	Maluku Utara	10	9	90,00
91	Papua Barat	13	8	61,54
94	Papua	29	11	37,93

**Lampiran 41. Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Kejadian Bencana**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terjadi Bencana			
			Tanah longsor	Banjir	Banjir bandang	Gempa bumi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Aceh	23	16	22	10	19
12	Sumatera Utara	33	26	28	6	14
13	Sumatera Barat	19	15	16	7	15
14	Riau	12	3	12	0	0
15	Jambi	11	6	11	2	3
16	Sumatera Selatan	17	5	15	4	3
17	Bengkulu	10	6	10	2	7
18	Lampung	15	4	13	3	3
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	5	0	0
21	Kepulauan Riau	7	3	6	0	0
31	DKI Jakarta	6	2	5	0	0
32	Jawa Barat	27	25	25	6	12
33	Jawa Tengah	35	29	33	11	8
34	DI Yogyakarta	5	4	3	0	3
35	Jawa Timur	38	29	35	13	27
36	Banten	8	5	8	1	3
51	Bali	9	8	7	0	6
52	Nusa Tenggara Barat	10	7	9	4	8
53	Nusa Tenggara Timur	22	21	22	7	11
61	Kalimantan Barat	14	6	14	1	0
62	Kalimantan Tengah	14	2	14	2	0
63	Kalimantan Selatan	13	6	12	1	0
64	Kalimantan Timur	10	5	10	0	0
65	Kalimantan Utara	5	3	5	0	1
71	Sulawesi Utara	15	11	14	3	9
72	Sulawesi Tengah	13	8	11	4	13
73	Sulawesi Selatan	24	19	23	2	6
74	Sulawesi Tenggara	17	5	13	0	1
75	Gorontalo	6	4	6	3	5
76	Sulawesi Barat	6	5	6	1	6
81	Maluku	11	4	8	0	6
82	Maluku Utara	10	4	9	5	9
91	Papua Barat	13	6	9	0	7
94	Papua	29	15	15	2	6

## Lampiran 42. Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Kejadian Bencana (Lanjutan)

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terjadi Bencana			
			Tsunami	Gelombang Pasang Laut/Badai	Angin Puyuh/Putting Beliung/Angin Topan	Gunung Meletus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Aceh	23	1	15	11	1
12	Sumatera Utara	33	1	13	23	2
13	Sumatera Barat	19	0	6	13	0
14	Riau	12	0	3	6	0
15	Jambi	11	0	1	5	0
16	Sumatera Selatan	17	0	2	9	0
17	Bengkulu	10	0	4	3	0
18	Lampung	15	0	7	12	0
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	0	4	4	0
21	Kepulauan Riau	7	0	7	4	0
31	DKI Jakarta	6	0	2	0	0
32	Jawa Barat	27	0	11	20	0
33	Jawa Tengah	35	0	14	26	2
34	DI Yogyakarta	5	0	1	4	1
35	Jawa Timur	38	0	21	23	1
36	Banten	8	0	4	4	0
51	Bali	9	0	5	4	0
52	Nusa Tenggara Barat	10	0	9	5	0
53	Nusa Tenggara Timur	22	0	14	20	1
61	Kalimantan Barat	14	0	4	2	0
62	Kalimantan Tengah	14	0	2	2	0
63	Kalimantan Selatan	13	0	3	4	0
64	Kalimantan Timur	10	0	3	3	0
65	Kalimantan Utara	5	0	1	0	0
71	Sulawesi Utara	15	0	11	6	0
72	Sulawesi Tengah	13	0	11	5	0
73	Sulawesi Selatan	24	0	8	16	0
74	Sulawesi Tenggara	17	0	12	9	0
75	Gorontalo	6	0	4	4	0
76	Sulawesi Barat	6	0	5	2	0
81	Maluku	11	0	10	7	0
82	Maluku Utara	10	0	9	6	1
91	Papua Barat	13	0	4	0	0
94	Papua	29	0	7	2	0

**Lampiran 43. Banyaknya Kabupaten/Kota Menurut Kejadian Bencana (Lanjutan)**

Kode Provinsi	Provinsi	Total Kabupaten	Banyaknya Kabupaten/Kota yang Terjadi Bencana		
			Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan (lahan)	Abrasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	23	6	9	16
12	Sumatera Utara	33	8	10	7
13	Sumatera Barat	19	5	9	5
14	Riau	12	10	7	6
15	Jambi	11	3	2	1
16	Sumatera Selatan	17	5	5	0
17	Bengkulu	10	1	2	5
18	Lampung	15	0	4	5
19	Kepulauan Bangka Belitung	7	2	0	2
21	Kepulauan Riau	7	5	3	2
31	DKI Jakarta	6	0	0	1
32	Jawa Barat	27	4	16	9
33	Jawa Tengah	35	6	19	14
34	DI Yogyakarta	5	0	3	0
35	Jawa Timur	38	3	12	8
36	Banten	8	3	4	3
51	Bali	9	2	1	3
52	Nusa Tenggara Barat	10	2	4	4
53	Nusa Tenggara Timur	22	11	19	13
61	Kalimantan Barat	14	9	7	5
62	Kalimantan Tengah	14	5	4	3
63	Kalimantan Selatan	13	4	2	3
64	Kalimantan Timur	10	5	4	5
65	Kalimantan Utara	5	2	2	1
71	Sulawesi Utara	15	0	1	6
72	Sulawesi Tengah	13	1	3	10
73	Sulawesi Selatan	24	3	4	9
74	Sulawesi Tenggara	17	0	4	9
75	Gorontalo	6	0	3	3
76	Sulawesi Barat	6	2	2	5
81	Maluku	11	3	4	8
82	Maluku Utara	10	4	1	8
91	Papua Barat	13	0	0	7
94	Papua	29	3	2	7







# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jl. dr. Sutomo No.6-8, Jakarta 10710  
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291, Fax. (021) 3857046  
Homepage: <http://www.bps.go.id> Email: [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)